

**KAJIAN PEMANFAATAN LAHAN
PADA DAERAH RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**JOKO PURWOKO SURANTO
L4D 007 007**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**KAJIAN PEMANFAATAN LAHAN
PADA DAERAH RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**JOKO PURWOKO SURANTO
L4D 007 007**

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 20 Desember 2008

Dinyatakan **Lulus**
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Desember 2008

Pembimbing Pendamping,



Ir. Artiningsih, M.Si.

Pembimbing Utama,



Ir. Parfi Khadiyanto, MSL.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, 20 Desember 2008



JOKO PURWOKO SURANTO

NIM L4D 007 007

HALAMAN PERSEMBAHAN

JAS MERAH : Jangan sekali-kali melupakan sejarah
JAS MERLI : Jangan sekali-kali merusak lingkungan

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Bagus, Rizky dan Elis yang tercinta
Adik dan orang tua yang selalu mendorong
Rekan-rekan yang selalu membantu
R-5232-UA yang setia menemani perjalanan

ABSTRAK

Perkembangan suatu wilayah yang cukup pesat memicu peningkatan kebutuhan lahan. Keterbatasan lahan tidak akan mampu menampung dalam memenuhi kebutuhan dan aktivitas manusia dalam mendukung perkembangan wilayah dalam beberapa tahun lagi dan nilai tambah dari lahan di pusat perkotaan menjadi tinggi, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya masyarakat mengarah pada daerah yang seharusnya tidak untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Perkembangan wilayah perkotaan ini akan berimbas pada perkembangan pemanfaatan lahan di wilayah perdesaan. Selain hal tersebut pengaruh sosial masyarakat dalam bermukim yang tidak jauh dari lokasi kegiatan untuk pemenuhan ekonomi menjadikan masyarakat bersikukuh untuk bermukim di daerah yang tidak layak huni.

Kejadian alam dalam bentuk erosi dan tanah longsor merupakan salah satu faktor penghambat dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah. Disisi lain masyarakat memerlukan lahan tersebut dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu perlu upaya perencanaan pemanfaatan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang dapat menyeimbangkan antara karakteristik fisik alam dengan manfaat ekonomi dari lahan tersebut.

Tujuan penelitian adalah mengkaji pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor di Gununglurah, Cilongok, Banyumas. Hasil akhir penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi dalam pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor.

Penelitian ini mengarah pada pendekatan teori untuk melakukan analisis secara analogi, digunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dan data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis karakteristik fisik alam, tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat, alasan pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor dan kebijakan penataan ruang,

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa karakteristik fisik alam mempengaruhi sebagian masyarakat dalam menentukan jenis pekerjaan yaitu petani dan buruh tani yang akan berpengaruh pula pada tingkat pendapatan mereka. Jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan, sosial kemasyarakatan, pemahaman terhadap lingkungan dan tingkat aksesibilitas berpengaruh terhadap tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat. Secara umum tingkat kapasitas masyarakat masih rendah dan tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana relatif tinggi. Daerah penelitian mempunyai tingkat potensi bencana tanah longsor rendah sampai tinggi. Pemanfaatan lahan di daerah penelitian didasarkan pada faktor turun-temurun, nilai lahan yang ada dan kondisi lingkungan yang masih alami serta tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat. Kondisi daerah yang mempunyai potensi tanah longsor dan aktivitas masyarakat akan memicu daerah penelitian mempunyai tingkat resiko bencana tanah longsor tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan rekomendasi perlunya upaya peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan masyarakat sehingga sumber daya manusia meningkat dan masyarakat dapat memahami kondisi alam. Perlunya pengembalian fungsi kawasan lindung dan pengendalian aktivitas pada kawasan penyangga sehingga tidak terjadi pembebanan tanah dan penegasan regulasi penataan ruang agar lebih mudah dalam pengendalian pemanfaatan lahan. Perlunya upaya relokasi agar masyarakat mendapat permukiman yang layak huni.

Kata Kunci: Pemanfaatan Lahan, Bencana Tanah Longsor, Perencanaan Wilayah

ABSTRACT

Regional development that is fast enough triggers improvement of land requirement. Land limitation will not can accomodate in fulfilling requirement and public activity in supporting region development in a few year again and that added land value in center urban becomes height, so that in accomplishment of their basic need leads to area which shouldn't to fulfill requirement and public activity. Urban area development will induce at development of land use in countryside region. Besides public social influence the thing in residence is not far from location of activity for economics accomplishment makes elbow public to live in area that is improper dwells.

Case of nature in the form of erosion and landslide is one of resistor factor in the relation with region expansion. The other side public requires the land in the effort accomplishment of economics requirement. Therefore need to strive exploiting planning of space, exploiting and operation of land exploiting which can balance between characteristic physical of nature with economic benefit from the land.

Purpose of research is to study land use at landslide disaster gristle area in Gununglurah, Cilongok, Banyumas. This research end result serve the purpose of recommendation base in operation of land use at landslide disaster gristle area.

This research leads to approach of theory applied to do analysis in analogy, applied secondary data obtained from various sources and primary data obtained from field observation and interview result, then have been processing and qualitative descriptive analysed. Qualitative descriptive analysed applied to analyse characteristic physical of nature, public capacities and susceptance level, land use reason at landslide disaster gristle area and settlement of space policy.

Based on analysis result, obtainable of result that characteristic physical of nature influences some of publics in determining work type that is farmer and farmworker which will have an effect on also at their earnings level. Work type, education and earnings level, social, tinning to area and accessibility level influential to public capacities and susceptance level. In general, public capacities level still be low and public susceptance level in facing possibility that relative disaster of height. Research area is having low until height landslide disaster potency level area. Land use in research area based on hereditary factor, the land values and condition of natural area and public capacities and susceptance level. Condition of research area having landslide potency and public activity will make research area to have height level landslide disaster risk.

Based on research result, required recommendation the importance of improvement effort of capacities and reduction public susceptance so human resource increases and public to get the picture of nature condition. The importance to return function of covert area and controls of activity at support area so not happened land encumbering and affirmative settlement of space regulation that be easier in land use controls. The importance to relocation effort that public gets good settlement to dwells.

Keywords: Land Use, Landslide Disaster, Regional Planning

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “*Kajian Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Gununglurah, Cilongok, Banyumas*”, yang merupakan salah satu persyaratan dalam menempuh dan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK), Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan Tesis, banyak pihak yang telah membantu. Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kapusbindiklatren Bappenas, yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
2. Bupati Banyumas beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah memberi kesempatan penulis untuk mengikuti program Tugas Belajar;
3. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, M.Sc., selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
4. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL., selaku dosen Pembimbing Utama;
5. Ir. Artiningsih, M.Si., selaku dosen Pembimbing Pendamping;
6. Sri Rahayu, S.Si., M.Si., selaku dosen Penguji I;
7. Ir. Hadi Nugroho, MT., selaku dosen Penguji II;
8. Seluruh pengajar dan staf pengelola Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa MTPWK kelas Bappenas angkatan IV;
10. Orang tua, Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan dukungan moral, pengertian dan waktunya;
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penelitian ini dan penyusunan Tesis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Desember 2008

Penulis,

Joko Purwoko Suranto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran	5
1.3.1. Maksud dan Tujuan	5
1.3.2. Sasaran	5
1.4. Ruang Lingkup Studi	6
1.4.1. Ruang Lingkup Substansi	6
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial	7
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota	9
1.7. Kerangka Pikir	10
1.8. Metodologi Penelitian	12
1.8.1. Pendekatan Penelitian	12
1.8.2. Pelaksanaan Penelitian	13
1.8.2.1. Kerangka Analisis	13
1.8.2.2. Data yang Digunakan	14
1.8.2.3. Tahapan Pengumpulan Data	15
1.8.2.4. Teknik Analisis	19
1.9. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN LITERATUR PEMANFAATAN LAHAN PADA DAERAH RAWAN TANAH LONGSOR	24
2.1. Mekanisme Gerakan Tanah	24
2.1.1. Jenis-jenis Longsoran	25
2.1.2. Faktor Pengontrol Terjadinya Gerakan Tanah	27
2.2. Pemanfaatan Lahan sebagai Pengontrol Resiko Gerakan Tanah	33
2.2.1. Pemanfaatan Lahan	33
2.2.2. Peran Vegetasi dalam Pengendalian Erosi dan Longsor	35
2.3. Kemampuan Lahan	38
2.4. Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat	40

2.4.1.	Persepsi Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat	41
2.4.2.	Pengaruh Kondisi Masyarakat pada Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat	42
2.4.3.	Perilaku Masyarakat yang Mempengaruhi Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat	43
2.5.	Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Ruang	45
2.5.1.	Kebijakan Penataan Ruang	45
2.5.2.	Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Lahan	48
2.6.	Pertimbangan Potensi Bencana dalam Pengembangan Wilayah	50
2.7.	Pemanfaatan SIG untuk menunjang Pengembangan Wilayah .	53
2.8.	Sintesis Literatur	55

BAB III KONDISI EKSTISTNG DESA GUNUNGLURAH DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

	57
3.1.	Letak dan Aksesibilitas Daerah Penelitian	57
3.2.	Kondisi Fisik Daerah Penelitian	57
3.2.1.	Kemiringan Lereng	57
3.2.2.	Geomorfologi	58
3.2.3.	Geologi	61
3.2.4.	Struktur Geologi	61
3.2.5.	Curah Hujan	63
3.2.6.	Hidrogeologi Umum	64
3.2.7.	Potensi Gerakan Tanah	64
3.2.8.	Tata Guna Lahan	66
3.2.8.1.	Permukiman	68
3.2.8.2.	Sawah	68
3.2.8.3.	Kebun	69
3.2.8.4.	Hutan	69
3.2.8.5.	Semak Belukar	70
3.3.	Kondisi Sosial Ekonomi	71
3.4.	Kejadian Gerakan Tanah	75
3.5.	Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Ruang	78

BAB IV ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN PADA DAERAH RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

	82
4.1.	Analisis Karakteristik Fisik Desa Gununglurah	83
4.2.	Analisis Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat Gununglurah .	90
4.2.1.	Kependudukan	90
4.2.2.	Tingkat Pendidikan	92
4.2.3.	Mata Pencaharian	93
4.2.4.	Tingkat Pendapatan	95
4.2.5.	Tingkat Sosial Kemasyarakatan	96

4.2.6. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan	98
4.2.7. Tingkat Aksesibilitas Masyarakat	101
4.3. Analisis Penyebab Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Gununglurah	103
4.4. Analisis Kebijakan tentang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor	106
4.5. Analisis Pemanfaatan Lahan Pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Desa Gununglurah	113
4.6. Hubungan antar Analisis	117
4.7. Temuan Studi	119
BAB V PENUTUP	121
5.1. Kesimpulan	121
5.2. Rekomendasi	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Keaslian Penelitian	9
Tabel I.2	: Data yang Digunakan	14
Tabel I.3	: Jenis dan Jumlah Narasumber	19
Tabel II.1	: Jenis-jenis Longsoran	26
Tabel II.2	: Klasifikasi Gerakan Tanah	27
Tabel II.3	: Faktor Pengontrol Gerakan Tanah	28
Tabel II.4	: Pembagian Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	30
Tabel II.5	: Klasifikasi Lereng	31
Tabel II.6	: Batuan Penyusun Daerah Penelitian	32
Tabel II.7	: Klasifikasi Pemanfaatan Lahan	33
Tabel II.8	: Hubungan Tipe Vegetasi dengan Air Limpasan	37
Tabel II.9	: Kriteria Kelas Kemampuan Lahan	39
Tabel II.10	: Sintesis Literatur	56
Tabel III.1	: Pemanfaatan Lahan di Gununglurah, Cilongok, Banyumas	66
Tabel III.2	: Distribusi Prosentese PDRB Kabupaten Banyumas Per Kecamatan Menurut Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 ...	72
Tabel III.3	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Gununglurah, Cilongok, Banyumas	73
Tabel III.4	: Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Gununglurah, Cilongok, Banyumas	74
Tabel III.5	: Tingkat Pendidikan Penduduk di Gununglurah, Cilongok, Banyumas	75
Tabel III.6	: Kejadian Gerakan Tanah 5 (Lima) Tahun Terakhir di Gununglurah, Cilongok, Banyumas	76
Tabel III.7	: Banyaknya Curah Hujan (mm) Tiap Bulan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir	78
Tabel IV.1	: Potensi Gerakan Tanah di Gununglurah, Cilongok, Banyumas ..	83
Tabel IV.2	: Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat di Desa Gununglurah, Cilongok, Banyumas	102
Tabel IV.3	: Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Kondisi Daerah Penelitian	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Lokasi Penelitian	8
Gambar 1.2.	Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota	10
Gambar 1.3.	Kerangka Pikir Penelitian	11
Gambar 1.4.	Kerangka Analisis	13
Gambar 3.1	Peta Kelerengn Daerah Penelitian	59
Gambar 3.2	Peta Geomorfologi Daerah Penelitian	60
Gambar 3.3	Peta Geologi Daerah Penelitian	62
Gambar 3.4	Peta Curah Hujan Rata-Rata Tahunan Kabupaten Banyumas	63
Gambar 3.5	Peta Potensi Gerakan Tanah Daerah Penelitian	65
Gambar 3.6	Peta Tata Guna Lahan Daerah Penelitian	67
Gambar 3.7.	Foto pemanfaatan lahan sebagai permukiman di lahan dengan kelerengn curam. Difoto dari Grumbul Pesawahan LP 01	68
Gambar 3.8.	Foto pemanfaatan lahan sebagai sawah di lahan dengan kelerengn agak curam dengan latar belakang perbukitan. Difoto dari Grumbul Karangklesem LP 02	68
Gambar 3.9.	Foto pemanfaatan lahan dalam tegalan/kebun campuran. Difoto dari Grumbul Rinjing LP 11	70
Gambar 3.10.	Foto pemanfaatan lahan dalam bentuk hutan dengan pohon berupa pinus dan damar. Difoto dari Grumbul Pesawahan LP 02	70
Gambar 3.11.	Foto kejadian tanah longsor yang sudah mengancam permukiman masyarakat. Difoto dari Grumbul Bojongkidul LP 16	75
Gambar 3.12.	Foto pemanfaatan lahan sebagai kolam ikan dengan latar belakang kejadian tanah longsor. Difoto dari Karangklesem LP 08	75
Gambar 3.13	Peta Lokasi Pengamatan	77
Gambar 3.14	Peta Kawasan Lindung Daerah Penelitian	80
Gambar 4.1.	Foto kelerengn lahan landai dengan latar belakang lahan agak curam. Difoto dari Grumbul Glempangwetan LP 05	84
Gambar 4.2.	Foto kenampakan lahan dengan kelerengn sangat curam. Difoto dari Grumbul Karangpucung LP 09	84
Gambar 4.3.	Foto litologi penyusun daerah penelitian berupa breksi gunung api yang telah mengalami pelapukan. Difoto dari Grumbul Pesawahan LP 01	86
Gambar 4.4.	Foto pelapukan yang cukup tebal dari endapan lahar gunung api Slamet. Difoto dari Grumbul Munggangwuni LP 12	86
Gambar 4.5.	Foto pemotongan lereng untuk pembuatan jalan yang dapat meningkatkan ketidakstabilan lereng. Difoto dari Grumbul Rinjing LP 11	88
Gambar 4.6.	Foto perilaku masyarakat <i>repek</i> yang semakin mengkhawatirkan. Difoto dari Grumbul Pesawahan LP 02	88
Gambar 4.7.	Peta Resiko Gerakan Tanah Daerah Penelitian	89
Gambar 4.8	Pengaruh Karakteristik Fisik Terhadap Potensi Gerakan Tanah .	90

Gambar 4.9.	Foto tingkat sosial masyarakat dalam gotong royong membantu korban tanah longsor. Difoto dari Grumbul Karangklesem LP 08	97
Gambar 4.10.	Foto pembuatan talud untuk mengurangi kejadian tanah longsor. Difoto dari Grumbul Bumiwastu LP 03	97
Gambar 4.11.	Foto jembatan titian bambu yang ada merupakan akses utama masuk ke Grumbul Rinjing. Difoto dari Grumbul Karangpucung LP 10	101
Gambar 4.12.	Foto jalan desa yang ada merupakan satu-satunya akses masuk ke Grumbul Pesawahan. Difoto dari LP 01	101
Gambar 4.13.	Pengaruh Karakteristik Masyarakat terhadap Aktivitas Masyarakat dan Resiko Gerakan Tanah	103
Gambar 4.14.	Pengaruh Alasan dan Aktivitas Masyarakat pada Pemanfaatan Lahan di Daerah Rawan Bencana	106
Gambar 4.15.	Pengaruh Kerentanan dan Bahaya Terhadap Bencana	115
Gambar 4.16.	Peta Penyimpangan Pemanfaatan Lahan	116
Gambar 4.17.	Pola Hubungan antar Analisis	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepulauan Indonesia terletak pada wilayah pertemuan 3 (tiga) lempeng besar dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pada daerah pertemuan antar lempeng tersebut terjadi zona penunjaman atau *subduction zone* yang mengakibatkan pembentukan gunungapi di busur kepulauan dengan kemiringan sedang hingga terjal. Material hasil letusan gunungapi mempunyai porositas tinggi dan kurang kompak dan tersebar di daerah dengan kemiringan terjal, jika terganggu keseimbangan hidrologinya, daerah tersebut akan rawan terhadap tanah longsor. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah yang berada dalam busur kepulauan bersifat rawan terhadap tanah longsor (Sutikno, 2001).

Tanah longsor adalah suatu peristiwa alam yang pada saat ini frekuensi kejadiannya semakin meningkat. Fenomena alam ini berubah menjadi bencana alam tanah longsor manakala tanah longsor tersebut menimbulkan korban baik berupa korban jiwa maupun kerugian harta benda dan hasil budaya manusia. Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa daerah perbukitan dan pegunungan, menyebabkan sebagian wilayah Indonesia menjadi daerah yang rawan kejadian tanah longsor. Intensitas curah hujan yang tinggi dan kejadian gempa yang sering muncul, secara alami akan dapat memicu terjadinya bencana alam tanah longsor.

Kekuatan tanah tergantung dari ikatan antara partikel penyusun tanah, sedangkan untuk batuan lebih banyak ditentukan oleh retakan pada batuan itu.

Air hujan dalam jumlah yang kecil menyebabkan tanah menjadi lembab dan mempunyai efek memperkuat tanah, namun apabila tanah menjadi jenuh air efeknya akan melemahkan ikatan partikel. Molekul air menyusup ke partikel tanah dan menjadi katalisator proses gelinciran antara partikel. Faktor ini yang menyebabkan tanah longsor banyak terjadi pada musim penghujan.

Faktor penyebab lainnya yaitu pendayagunaan sumberdaya alam secara tidak teratur atau melampaui daya dukungnya akan memicu terjadinya bencana. Nilai suatu lahan yang rendah atau mempunyai kondisi geologi dan jenis medan yang kurang baik jika tidak diperhatikan secara cermat dalam perluasan lahan usahanya, akan mengundang bencana alam tanah longsor (Verstappen, 1983).

Perkembangan suatu wilayah akan meningkatkan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal dan beraktivitas ekonomi, adapun ketersediaan lahan yang ada tidak mengalami perkembangan. Penduduk terpaksa menempati lokasi yang tidak layak huni seperti di daerah perbukitan dan lereng pegunungan. Aktivitas masyarakat tersebut menyebabkan tingkat kerawanan bencana menjadi semakin meningkat, manakala lahan dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lahan.

Ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan rawan tanah longsor beserta peraturan yang bisa dijadikan dasar dalam setiap aktivitas pengembangan merupakan hal yang sangat diperlukan demi mencegah dan meminimalkan korban jiwa dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana alam tanah longsor, dan lebih jauh sebagai masukan bagi penyusunan tata ruang dalam suatu kawasan rawan tanah longsor.

Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kejadian tanah longsor. 14 dari 27 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas adalah wilayah yang mempunyai tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kejadian tanah longsor. Berdasarkan pemetaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Kecamatan Cilongok merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian tanah longsor, khususnya di Desa Gununglurah yang hampir setiap tahun selalu terjadi tanah longsor.

1.2. Perumusan masalah

Perkembangan Kabupaten Banyumas, terutama perkotaan Purwokerto dan sekitarnya termasuk didalamnya Kecamatan Cilongok yang makin pesat dalam kurun waktu beberapa tahun ini mempunyai dampak pada peningkatan kebutuhan lahan untuk sarana permukiman dan beraktivitas lainnya karena hal itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Perkembangan ini berbanding lurus dengan nilai lahan yang ada menjadi tinggi. Tingginya nilai lahan dan keterbatasan lahan yang tersedia pada daerah yang layak huni, menyebabkan kawasan yang memiliki kondisi kurang layak huni bahkan tidak layak huni dimanfaatkan masyarakat yang sebagian besar tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam lahan di daerah layak huni sebagai kawasan budidaya.

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan tingginya intensitas aktifitas manusia dalam mengubah tata guna lahan akan mempertinggi tingkat resiko pada daerah rawan bencana tanah longsor. Keadaan ini terus saja berlangsung karena

rendahnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah disamping lemahnya *law enforcement* terhadap pengawasan pembangunan dan perkembangan di kawasan rawan tanah longsor ini. Adanya ketidakstabilan tanah di suatu daerah dapat memberikan pengaruh yang bervariasi tergantung pada sifat, besar dan jangkauan dari kawasan tanah longsor tersebut.

Bencana alam tanah longsor ini sifatnya sulit dideteksi dan dipredikasi kapan akan terjadi dan sampai kapan kejadian akan berlangsung, maka usaha untuk menghindari bencana tersebut mengalami kesulitan untuk dilaksanakan. Suatu permukiman baru tidak selalu terdapat pada lokasi lahan yang ideal sesuai dengan tata guna lahan yang telah ditetapkan, beberapa faktor dapat berpengaruh terhadap lokasi lahan ini, seperti jalur gempa bumi, jalur ketidakstabilan lereng atau terdapatnya zona longsor, (Leverson, 1980).

Bencana merupakan fenomena sosial akibat kolektif atas komponen ancaman yang berupa fenomena alam dan atau buatan di satu pihak, dengan kerentanan komunitas di pihak lain serta resiko yang ditimbulkan. Ancaman menjadi bencana apabila komunitas yang ada mempunyai tingkat kemampuan lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman beresiko yang mungkin terjadi padanya atau bahkan menjadi salah satu sumber ancaman tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas sudah berupaya membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana terhadap kegiatan budidaya lahan. Dalam RTRW yang telah disusun tersebut dinyatakan bahwa daerah rawan bencana difungsikan sebagai

kawasan lindung. Namun kenyataannya, masih ada pemanfaatan lahan di daerah rawan tanah longsor dan pemerintah daerah belum dapat menerapkan kebijakan tersebut secara optimal, hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk sudah lama bermukim di daerah rawan bencana bahkan sudah ada yang turun-temurun. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana alam tanah longsor.

Berdasarkan latar belakang yang ada dan perumusan masalah tersebut diatas, maka pada penelitian ini dimunculkan suatu *research question*, yaitu "*Bagaimana pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor?*"

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi fisik alam, sosial ekonomi, penyebab pemanfaatan lahan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Tujuannya adalah mengkaji pemanfaatan lahan yang ada pada daerah rawan bencana alam tanah longsor di Gununglurah, Cilongok, Banyumas.

1.3.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk menjawab tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi karakteristik fisik alam yang ada di Gununglurah;
- b. Menganalisis kapasitas dan kerentanan masyarakat di Gununglurah;
- c. Menganalisis dasar penyebab pemanfaatan lahan di Gununglurah;
- d. Menganalisis kebijakan pemerintah tentang penataan ruang;

- e. Menganalisis pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana alam tanah longsor di Gununglurah.

1.4. Ruang Lingkup Studi

Dalam memperjelas ruang lingkup studi pada tujuan penelitian maka perlu dibedakan ruang lingkup studi menjadi 2 (dua) bagian ruang lingkup, yaitu ruang lingkup substansial dan spasial, yang diuraikan berikut ini:

1.4.1. Ruang Lingkup Substansi

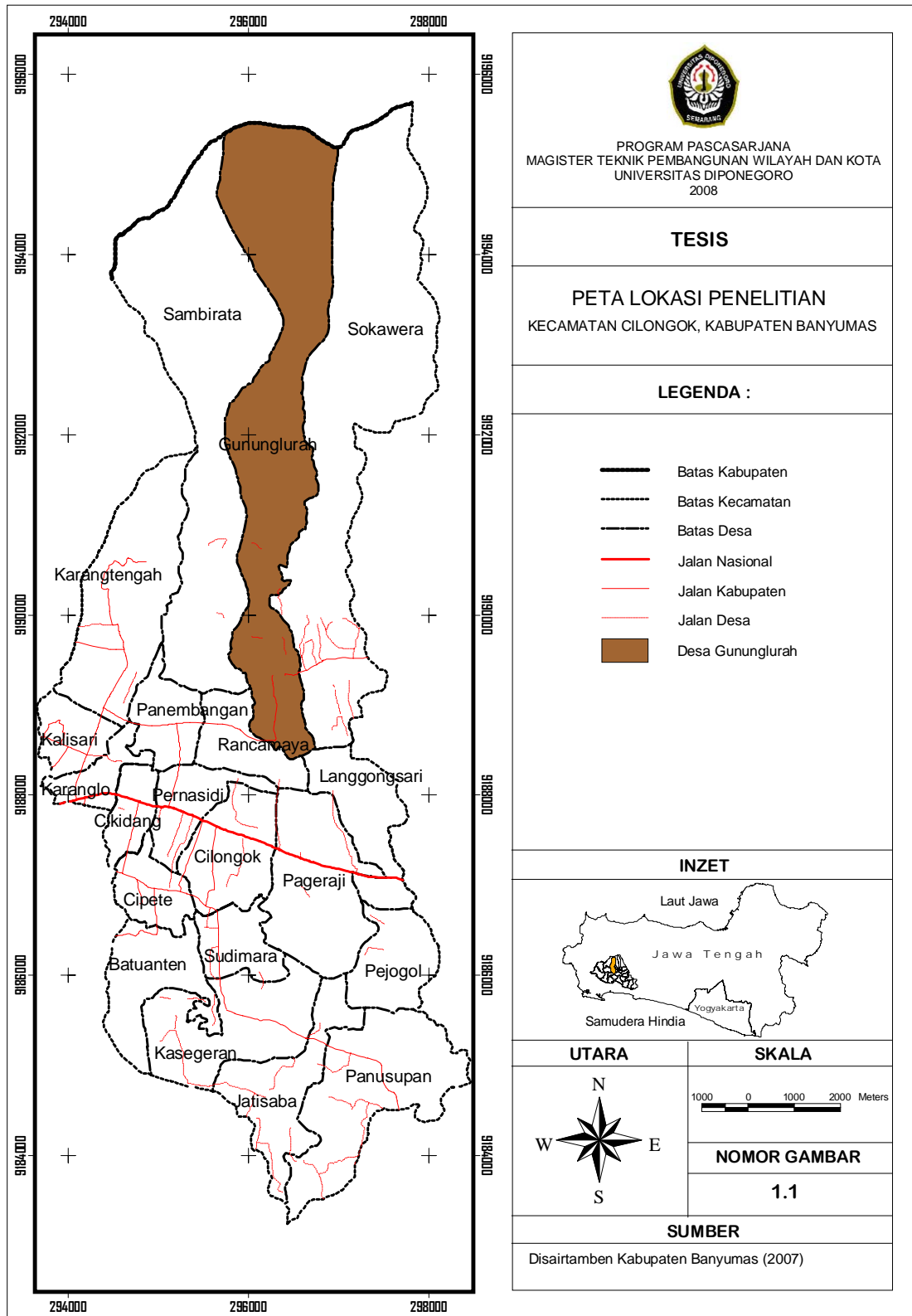
Pembatasan materi penelitian dilakukan pada ruang lingkup substansi berdasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan di atas akan didapatkan suatu batasan penelitian yang berfungsi agar penelitian ini tidak lepas dari tema dan judul yang diangkat. Batasan materi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Tanah Longsor. Pembahasan daerah rawan tanah longsor ini didasarkan regulasi dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Kawasan Pertambangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada penelitian ini dibahas persebaran potensi tanah longsor yang ada di Gununglurah;
2. Pemanfaatan Lahan. Pembahasan pemanfaatan lahan yaitu jenis pemanfaatan lahan yang ada khususnya hasil aktivitas manusia baik berupa permukiman, lahan pertanian dan infrastruktur yang lain. Pada penelitian ini dibahas persebaran pemanfaatan lahan yang ada di Gununglurah;
3. Kemampuan lahan. Pembahasan kemampuan lahan berupa kesesuaian lahan bagi pemanfaatan lahan di atasnya. Pada penelitian ini dibahas kesesuaian lahan bagi pemanfaatan lahan yang ada di Gununglurah;

4. Kondisi Sosial Ekonomi. Pembahasan kondisi sosial ekonomi adalah berupa tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, tingkat pendapatan, nilai lahan dan tingkat pemahaman masyarakat pada daerah rawan tanah longsor;
5. Persepsi Masyarakat. Pembahasan berupa alasan yang mendasari masyarakat untuk bermukim pada daerah rawan bencana yang meliputi kondisi sosial ekonomi, faktor aksesibilitas, kekerabatan dan ketidakadaan pilihan;
6. Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat. Pembahasan ini berupa sumberdaya dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang memungkinkan untuk mencegah, menanggulangi dan memitigasi dari kemungkinan bencana. Adapun kerentanan berupa sekelompok kondisi yang ada dan melekat yang melemahkan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak dari suatu bahaya;
7. Kebijakan pemerintah. Pembahasan kebijakan pemerintah yang dibahas difokuskan pada kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang dan pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Daerah yang mempunyai wilayah perbukitan mempunyai potensi bencana khususnya bencana tanah longsor. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai potensi terhadap bencana alam tanah longsor, salah satunya berada di Kecamatan Cilongok. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas karena hampir setiap tahun terjadi tanah longsor. Secara administrasi ruang lingkup spasial ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.



1.5. Keaslian Penelitian

Perbandingan penelitian dengan penelitian sejenis yang pernah dilaksanakan, dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian ini. Keaslian penelitian dapat dilihat dari materi yang dibahas, lokasi penelitian maupun metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu, seperti terlihat pada Tabel I.1.

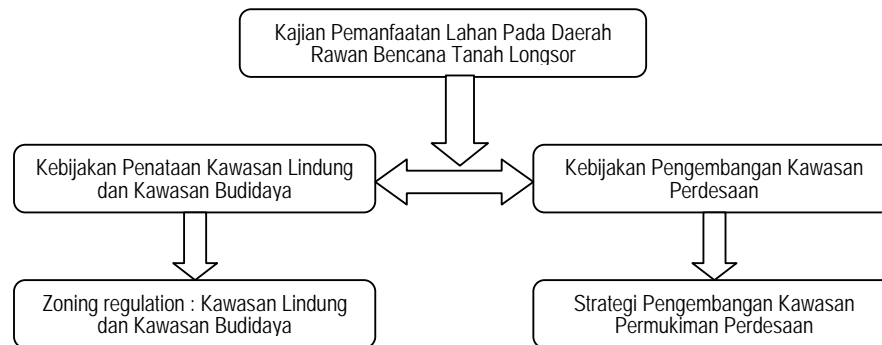
TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN

PENELITI	JUDUL	MATERI	LOKASI	METODE	HASIL
Sukendar Asikin dan Prastistho, 1992	Peta Geologi Lembar Banyumas, Jawa, Skala 1:100.000	Pemetaan geologi skala 1:100.000	Kabupaten Banyumas dan sekitarnya	Pendekatan kuantitatif metode pemetaan	Peta Geologi Skala 1 : 100.000
Muhammad Djuri dkk., 1996	Peta Geologi Teknik Lembar Tegal - Purwokerto, Jawa, Skala 1:100.000	Pemetaan geologi skala 1:100.000	Kota Tegal - Purwokerto dan sekitarnya	Pendekatan kuantitatif metode pemetaan	Peta Geologi Skala 1 : 100.000
Ariono Poerwanto Boedi Prasetyo, 2004	Pengelolaan Mitigasi Bencana Alam Gerakan Tanah Di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	Pengelolaan mitigasi bencana alam gerakan tanah	Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	Pendekatan kuantitatif metode analisis SWOT	Peta Potensi Gerakan Tanah dan Upaya Mitigasi Bencana
Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi, 2007	Pemetaan Daerah Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah di Wilayah Cilongok Kabupaten Banyumas	Pemetaan daerah rawan bencana alam skala 1:25.000	Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	Pendekatan kuantitatif metode <i>scoring</i>	Peta Potensi Gerakan Tanah Skala 1 : 25.000
Joko Purwoko Suranto, 2008	Kajian Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Gununglurah, Cilongok, Banyumas	Kompilasi peta, pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor dan kebijakan penataan ruang	Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas	Pendekatan fenomenologi analisis deskriptif kualitatif	Penyimpangan Pemanfaatan Pahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan

Sumber: Hasil Studi Literatur (2008)

1.6. Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

Posisi penelitian terhadap perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai pertimbangan *stakeholder* guna menyusun kebijakan penataan ruang dan pengembangan kawasan. Posisi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2.



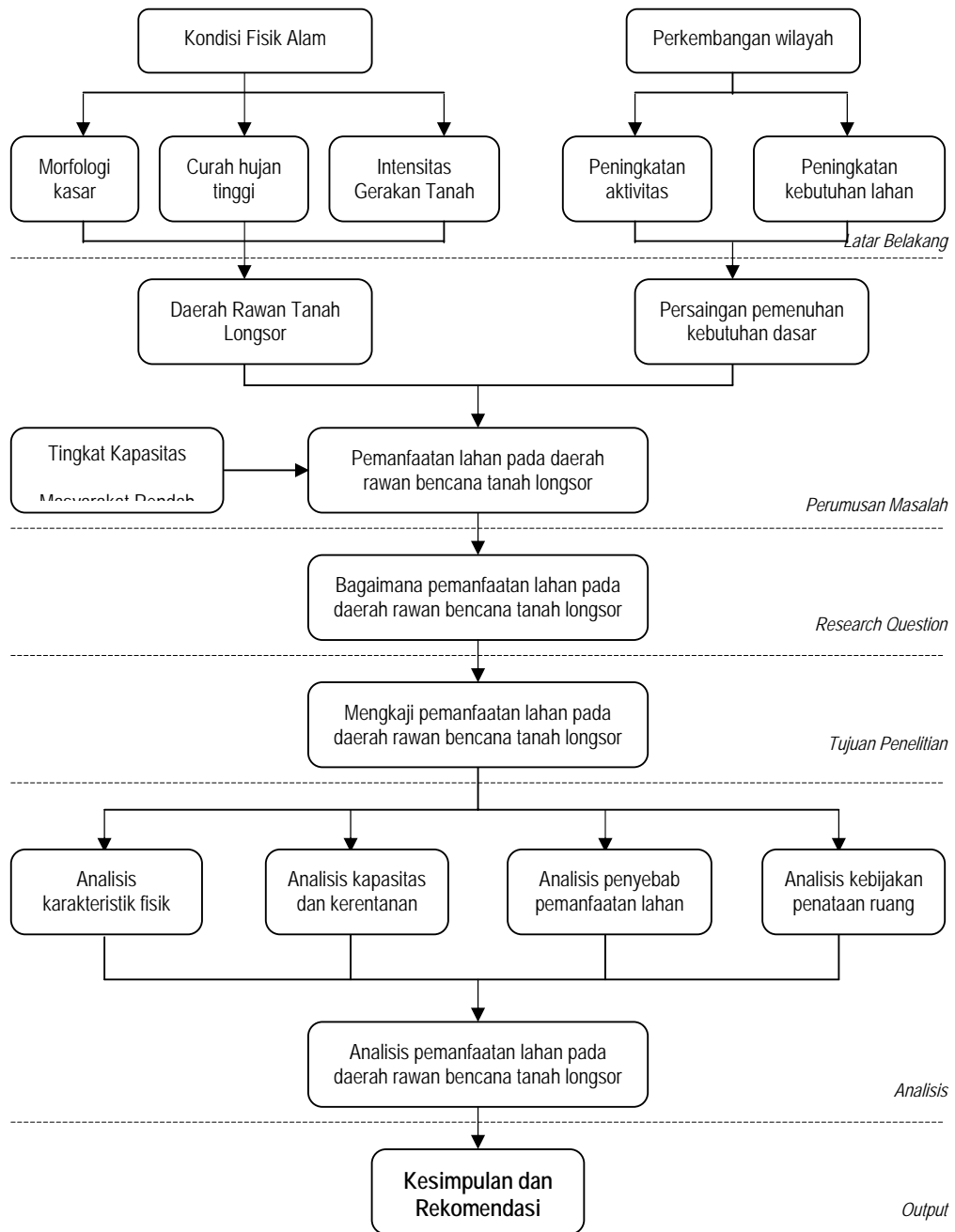
Sumber: Hasil analisis (2008)

GAMBAR 1.2
POSISI PENELITIAN DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

1.7. Kerangka Pikir

Perkembangan dari suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan untuk mendukung aktivitas manusia termasuk untuk permukiman. Kebutuhan pemanfaatan lahan yang ada tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang layak huni. Keterbatasan lahan yang murah dan layak huni akan menimbulkan permasalahan baru yaitu pemanfaatan lahan pada daerah yang tidak layak huni termasuk pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana untuk kegiatan budidaya.

Pemanfaatan lahan yang terjadi pada daerah rawan bencana tanah longsor sebagai kawasan budidaya akan menimbulkan suatu permasalahan. Kerangka pikir yang dipergunakan untuk dapat menjawab *research question*, yaitu *Bagaimana pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor?* disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 1.3.



GAMBAR 1.3
KERANGKA PIKIR PENELITIAN

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan Penelitian

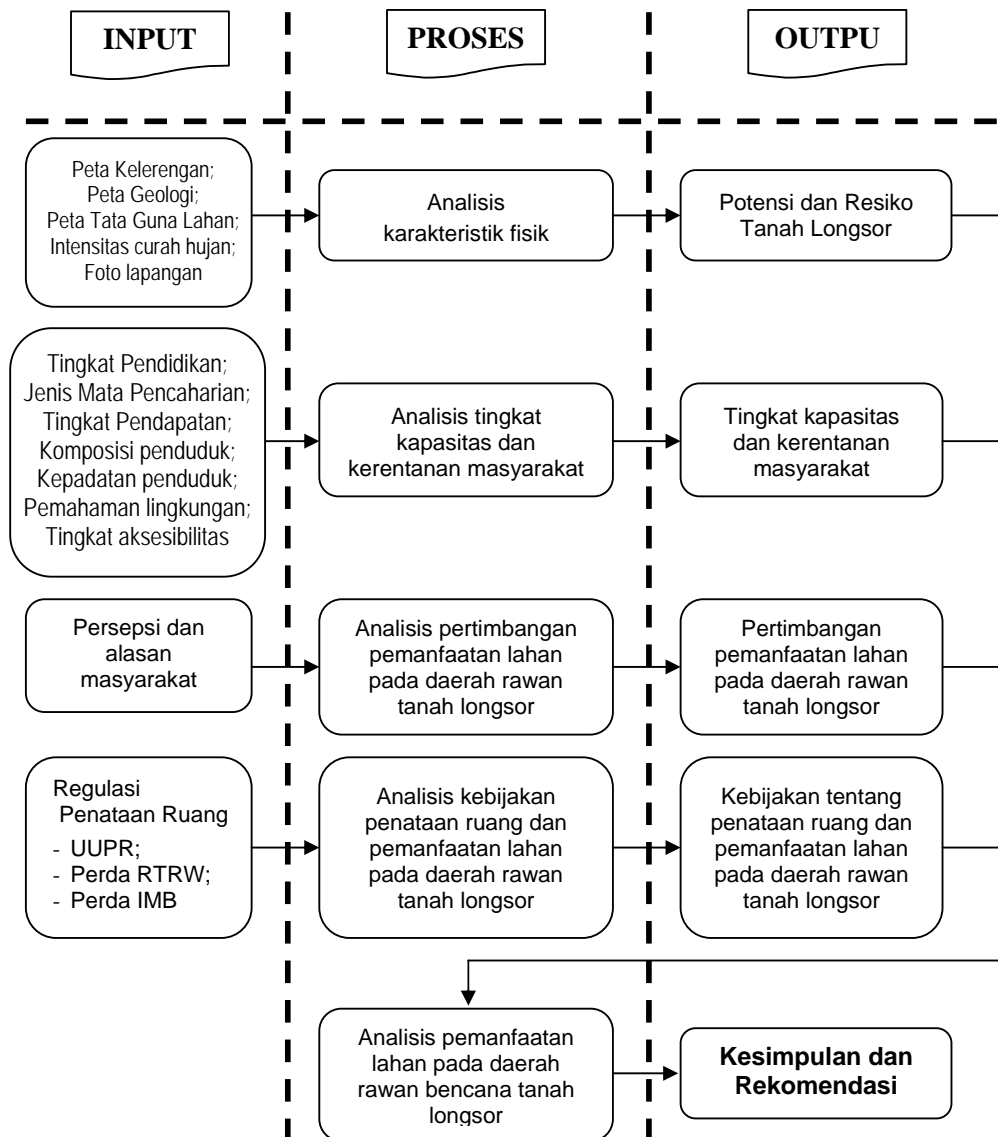
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk jenis pendekatan non eksperimen dan deskriptif. Penelitian tidak melakukan suatu percobaan tetapi lebih ke arah pendalaman suatu kasus atau keadaan dan dideskripsikan mendalam (Arikunto, 1996). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian deskriptif bermaksud meneliti status sekelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian jenis ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam metode pendekatan deskriptif diselidiki juga kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain (Natzir, 1988).

Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini akan menghasilkan data secara deskriptif, dalam bentuk kata secara tertulis, gambar dan sebagainya yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2000). Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial ekonomi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap lingkungan dan alasan penyebab pemanfaatan lahan serta mengetahui kebijakan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana di Gununglurah, Cilongok, Banyumas.

1.8.2. Pelaksanaan Penelitian

1.8.2.1. Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang dilakukan pada penelitian ini, diuraikan dalam bentuk diagram seperti pada Gambar 1.4 dibawah ini:



GAMBAR 1.4
KERANGKA ANALISIS

1.8.2.2. Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari 2 (dua) sumber yang ada, yaitu data primer dan data sekunder (Marzuki, 2002) dengan target variabel yang sudah ditetapkan seperti pada Tabel I.2.

TABEL I.2
DATA YANG DIGUNAKAN

NO	SASARAN	PENGGUNAAN DATA	JENIS DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	SUMBER
1	2	3	4	5	6
1	Analisis karakteristik fisik alam di daerah rawan tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peta Kelerengan; ➤ Peta Geologi; ➤ Peta Tata Guna Lahan; ➤ Intensitas curah hujan; ➤ Foto lapangan 	Primer dan Sekunder	Observasi, wawancara dan Studi Pustaka	Dinas ESDM; Dinas SDABM
2	Identifikasi dan analisis tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat Pendidikan; ➤ Jenis Mata Pencarian; ➤ Tingkat Pendapatan; ➤ Komposisi penduduk; ➤ Kepadatan penduduk; ➤ Pemahaman lingkungan; ➤ Tingkat aksesibilitas 	Primer dan Sekunder	Wawancara dan Studi Pustaka	Masyarakat; BPS
3	Analisis dasar penyebab pemanfaatan lahan di daerah rawan tanah longsor	Data tentang hal-hal yang mendasari pemanfaatan lahan	Primer	Wawancara	Masyarakat
4	Analisis kebijakan tentang penataan ruang dan pemanfaatan lahan di daerah rawan tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU tentang Penataan Ruang; ➤ Perda tentang RTRW; ➤ Perda tentang Bangunan 	Sekunder	Studi Pustaka	Bappeda; Dinas CKKTR
5	Analisis pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fisik Lingkungan; ➤ Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat; ➤ Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Ruang; ➤ Alasan/Penyebab Pemanfaatan Lahan 	Primer dan Sekunder	Wawancara dan Studi Pustaka	Masyarakat; Bappeda; Dinas ESDM; Dinas CKKTR

Sumber: Penulis (2008)

1.8.2.3. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan dan cara pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka penelitian ini adalah studi literatur, survei dan observasi lapangan serta wawancara.

a. Tahap Studi Literatur

Tahap pertama berupa studi literatur diperlukan guna mendapatkan teori yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain:

- i. Studi literatur mengenai tanah longsor, faktor penyebab tanah longsor;
- ii. Studi literatur mengenai kebijakan penataan ruang;
- iii. Studi literatur mengenai kapasitas dan kerentanan masyarakat.

b. Tahap Survei dan Observasi Lapangan

Tahap kedua berupa survei dan observasi lapangan perlu dilakukan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain:

- i. Survey institusional untuk mengumpulkan data dari instansi:
 - Instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan, pekerjaan fisik, pendataan dan koordinasi seperti BAPPEDA, BPS dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Instansi yang menangani pekerjaan fisik, seperti instansi yang berada di wilayah seperti Kecamatan Cilongok dan Desa Gununglurah;
- ii. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapat data primer yang berkaitan dengan kondisi fisik alam, jenis pemanfaatan lahan dan aktivitas yang ada pada masyarakat.

c. Tahap Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal dengan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Berdasarkan golongannya, wawancara terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu wawancara tertutup yang bentuk pertanyaannya sedemikian rupa sehingga jawaban dari narasumber sangat terbatas dan wawancara terbuka yang bentuk pertanyaannya sedemikian rupa sehingga jawaban dari narasumber tidak terbatas dan dapat berupa cerita panjang, (Koentjaraningrat, 1977). Sedangkan menurut prosedurnya, wawancara terbagi menjadi:

- i. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok persoalan dari fokus penelitian dan orang yang diwawancarai.
- ii. Wawancara terpimpin, adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti. Ciri pokoknya pewawancara terikat oleh suatu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data yang relevan dengan maksud penelitian yang dipersiapkan, serta ada pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab untuk memudahkan kelancaran wawancara.
- iii. Wawancara bebas terpimpin, adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung

mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan narasumber apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

Pada penelitian ini, golongan wawancara yang dipilih adalah wawancara terbuka dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik wawancara. Hal ini mengingat bahwa teknik campuran ini masih memberi kebebasan kepada narasumber dalam batas tertentu, namun juga tidak terlalu memberi ruang bagi penyimpangan masukan narasumber dari topik bahasan.

Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksud untuk menjangkau narasumber yang jumlahnya relatif banyak, wawancara dilakukan kepada sejumlah narasumber yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. Panduan wawancara yang telah ditentukan digunakan untuk mengarahkan pertanyaan dalam panduan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat. Adapun kegunaan wawancara yang dilakukan antara lain:

- i. Mendapatkan informasi dan data di tangan pertama (primer);
- ii. Pelengkap teknik pengumpulan lainnya;
- iii. Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *purposive sampling*. Moleong (2000) mengidentifikasi ciri-ciri *purposive sampling* yaitu:

- a. Pemilihan data secara berurutan dengan tujuan untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya yang hanya dapat dicapai bila pemilihan satuan data sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui;
- b. Penyesuaian berkelanjutan dari data, pada mulanya setiap data dapat sama kegunaannya, namun semakin banyak informasi dan semakin dalam maka data yang dipilih atas dasar fokus penelitian;
- c. Jika sudah terjadi pengulangan informasi, pemilihan data dihentikan.

Faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik *purposive sampling* adalah:

- a. Mempermudah mencari narasumber yang representatif pada populasinya dan menguasai objek studi, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya;
- b. Diperoleh narasumber yang memahami permasalahan atau latar belakang adanya pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor.

Pengumpulan dan pengambilan data berupa wawancara dilakukan terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara rinci yang melatarbelakangi adanya pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor di Gununglurah, Cilongok, Banyumas dengan cara dialog atau bercakap-cakap secara langsung. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel I.3, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memahami tentang pemanfaatan lahan di daerah penelitian;
- b. Masyarakat yang memahami kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah penelitian;

- c. Aparatur pemerintah daerah yang ada di wilayah;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan, pekerjaan fisik, pendataan dan koordinasi.

TABEL I.3
JENIS DAN JUMLAH NARASUMBER

NO	JENIS NARASUMBER	JUMLAH
1	Bappeda	1
2	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	2
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1
4	Camat Cilongok	1
5	Kades Gununglurah	1
6	BPD Gununglurah	1
7	Kadus di Gununglurah	1
8	RW / RT	3
9	Tokoh Agama/Masyarakat/Pemuda	2
Jumlah		13

Sumber: Penulis, 2008

1.8.2.4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada teknik analisis kualitatif ini data yang disajikan berwujud kata dan bukan rangkaian angka (Miles dan Huberman, 1992). Data itu telah dimunculkan dalam berbagai macam cara yaitu intisari dokumen, observasi dan wawancara yang diproses terlebih dahulu sebelum digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu: *reduksi data*, *penyajian data* dan *penarikan kesimpulan*. Reduksi data dilakukan sebelum

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data merupakan bagian analisis yang berupa deret dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak matriks merupakan kegiatan analisis yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data kualitatif yang dilakukan dalam analisis ini melalui cuplikan kartu sikap yang berisi informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri sebagai satuan data akan ditampilkan dengan menggunakan kode yang menandai kategori data, cara pengumpulan, nomor narasumber dan intisari jawaban. Data dengan kode KFL.W.04.07, berarti kategori data adalah KFL (Karakteristik Fisik Lingkungan), W (wawancara) sebagai cara pengumpulan data, 04 adalah nomor narasumber dan 07 adalah intisari jawaban dari pertanyaan nomor 7.

Langkah akhir dari teknik analisis ini dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, analisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin dan alur sebab-akibat.

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut diatas, namun penggunaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan variabel penelitian. Sehingga proses pelaksanaannya lebih banyak menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data-data yang diperoleh dari peta-peta yang ada untuk mengetahui tingkat resiko gerakan tanah di lokasi penelitian. Teknik analisis berupa overlay peta ini dilakukan dengan menumpangsusunkan dua atau lebih peta tematik kemudian diinterpretasikan. Peta yang digunakan dalam analisis ini adalah peta potensi gerakan tanah dengan peta tata guna lahan digunakan untuk menentukan tingkat resiko gerakan tanah.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Analisis karakteristik fisik alam yang ada di Gununglurah

Analisis ini untuk mengetahui kondisi fisik yang ada di daerah penelitian. Data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil observasi maupun wawancara terhadap narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari instansi berupa kajian pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

b. Analisis tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat di Gununglurah

Analisis ini untuk mengetahui tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat di Gununglurah. Data yang digunakan berupa data primer berupa wawancara terhadap narasumber serta data sekunder yang meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat pemahaman terhadap kondisi lingkungan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

c. Analisis dasar penyebab pemanfaatan lahan di Gununglurah

Analisis ini untuk mengetahui dasar penyebab pemanfaatan lahan. Data yang digunakan berupa data primer berupa wawancara terhadap narasumber. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

d. Analisis kebijakan pemerintah tentang penataan ruang dan pemanfaatan lahan pada daerah rawan tanah longsor

Analisis ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang penataan ruang dan pemanfaatan lahan pada daerah rawan tanah longsor. Data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber serta data sekunder yang meliputi data regulasi pemerintah tentang penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

e. Analisis pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana alam tanah longsor di Gununglurah

Analisis ini untuk mengetahui pemanfaatan lahan yang terjadi di Gununglurah. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini adalah keempat hasil analisis diatas. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil akhir berupa penyimpangan pemanfaatan lahan, pola hubungan antar analisis dan temuan studi.

1.9. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ilmiah ini disusun sebagai tesis yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tujuan penelitian ini dilakukan dan tahapan proses penelitian yang sudah dilakukan serta sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Literatur Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Tanah Longsor

Bab ini mengulas teori yang digunakan dalam mendukung penelitian, yang terdiri dari: teori mekanisme gerakan tanah, kapasitas dan kerentanan masyarakat, kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan lahan dan potensi bencana dalam pengembangan wilayah.

Bab III. Kondisi Eksisting Desa Gununglurah dan Kebijakan Penataan Ruang

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran kondisi eksisting di daerah penelitian, yang terdiri dari karakteristik fisik alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kejadian gerakan tanah dan kebijakan pemerintah tentang penataan ruang.

Bab IV Analisis Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Gununglurah, Cilongok, Banyumas

Bab ini terdiri dari analisis yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran penelitian berupa; analisis karakteristik fisik alam, analisis kapasitas dan kerentanan masyarakat, analisis penyebab pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor, analisis kebijakan pemerintah tentang penataan ruang dan pemanfaatan lahan dan analisis pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor serta hubungan antar analisis.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan dan rekomendasi berupa upaya penanganan pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor di daerah penelitian.

BAB II

KAJIAN LITERATUR PEMANFAATAN LAHAN PADA DAERAH RAWAN TANAH LONGSOR

Kajian literatur atau *literature review* yang terkait dengan tema penelitian ini adalah konsep pemanfaatan lahan termasuk proses gerakan tanah atau tanah longsor, kebijakan pemerintah tentang penataan ruang, kapasitas dan kerentanan masyarakat serta pertimbangan potensi rawan bencana dalam pengembangan wilayah. Beberapa literatur disesuaikan dengan sasaran pada penelitian ini maka akan didapatkan variabel-variabel dalam penelitian. Variabel-variabel tersebut merupakan input dalam melakukan proses analisis.

2.1. Mekanisme Gerakan Tanah

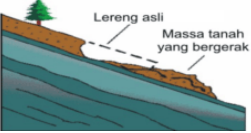

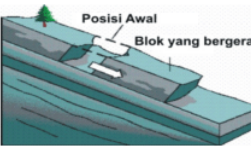

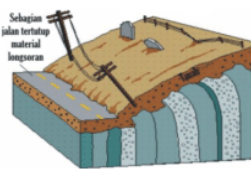
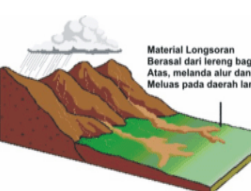
Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia, Anwar (2003). Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian dari lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi, dan selanjutnya setelah terjadi longsor lereng akan seimbang atau stabil kembali. Jadi longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng mengikuti gaya gravitasi akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila massa yang bergerak pada lereng ini didominasi oleh tanah dan gerakannya melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring maupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut sebagai

longsor tanah. Suripin (2002) mendefinisikan tanah longsor adalah merupakan suatu bentuk erosi dimana pengangkutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat dalam volume yang relatif besar. Ditinjau dari segi gerakannya, maka selain erosi longsor masih ada beberapa erosi yang diakibatkan oleh gerakan massa tanah, yaitu rayapan (*creep*), runtuhuan batuan (*rock fall*) dan aliran lumpur (*mud flow*). Karena massa yang bergerak dalam longsor merupakan massa yang besar maka seringkali kejadian tanah longsor akan membawa korban, berupa kerusakan lingkungan, lahan pertanian, permukiman dan infrastruktur serta harta bahkan hilangnya nyawa manusia.

2.1.1. Jenis-jenis Longsor

Menurut Subowo (2003), ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuhuan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan seperti pada Tabel II.1. Dari keenam jenis longsor tersebut, jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia, hal tersebut dikarenakan tingkat pelapukan batuan yang tinggi, sehingga tanah yang terbentuk cukup tebal. Sedangkan longsor yang paling banyak menelan korban harta, benda dan jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan, hal tersebut dikarenakan longsor jenis aliran bahan rombakan ini dapat menempuh jarak yang cukup jauh yaitu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan meter, terutama pada daerah-daerah aliran sungai di daerah sekitar gunungapi. Kecepatan longsor jenis ini sangat dipengaruhi oleh kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis materialnya.

TABEL II.1
JENIS-JENIS LONGSORAN

No	Jenis Longsoran	Sketsa	Keterangan
1	2	3	4
1	Longsoran Translasi		Longsoran translasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.
2	Longsoran Rotasi		Longsoran rotasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung.
3	Pergerakan Blok		Pergerakan blok adalah Bergeraknya batuan pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut longsoran translasi blok batu
4	Runtuhan Batu		Runtuhan batu adalah runtuhnya sejumlah besar batuan atau material lain Bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung.
5	Rayapan Tanah		Rayapan tanah adalah jenis gerakan tanah yang Bergerak lambat. Jenis gerakan tanah ini hampir tidak dapat dikenali. Rayapan tanah ini bisa menyebabkan tiang telepon, pohon, dan rumah miring.
6	Aliran Bahan Rombakan		Gerakan tanah ini terjadi karena massa tanah Bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran dipengaruhi kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ribuan meter.

Sumber : Subowo (2003)

2.1.2. Faktor Pengontrol Terjadinya Gerakan Tanah

Proses terjadinya gerakan tanah melibatkan interaksi yang kompleks antara aspek geologi, geomorfologi, hidrologi, curah hujan dan tata guna lahan. Pengetahuan tentang kontribusi masing-masing faktor tersebut pada kejadian gerakan tanah sangat diperlukan dalam menentukan daerah-daerah rawan berdasarkan jenis gerakan tanahnya. Varnes (1978) membagi jenis dan mekanisme terjadinya gerakan tanah ke dalam beberapa kelas (jenis gerakan tanah), seperti Tabel II.2.

TABEL II.2
KLASIFIKASI GERAKAN TANAH

Jenis Gerakan Tanah			Jenis Material		
Runtuhan			Batuan	Tanah Teknik	
				Berbutir kasar	Berbutir halus
			Runtuhan batuan	Runtuhan bahan rombakan	Runtuhan tanah
Robohan			Robohan batuan	Robohan bahan rombakan	Robohan tanah
Longsor	Rotasi	Beberapa unit	Nendatan batuan (<i>slump</i>) Bidang luncuran lengkung	Nendatan batuan (<i>slump</i>) Bidang luncuran lengkung	Nendatan tanah
	Translasi	Banyak unit	Luncuran blok batuan Luncuran batuan (bidang lurus)	Longsor blok bahan rombakan Longsor bahan rombakan	Longsor blok tanah Longsor tanah
Pencaran Lateral			Pencaran batuan	Pencaran bahan rombakan	Pencaran tanah
Aliran			Aliran batuan (rayapan dalam)	Aliran bahan rombakan solifluction Lawina bahan rombakan Rayapan bahan rombakan Aliran blok	Aliran pasir/anau basah Aliran pasir kering Aliran tanah Aliran lepas
Kompleks			Campuran dari dua (atau lebih) jenis gerakan		

Sumber : Varnes (1978)

TABEL II.3
FAKTOR PENGONTROL GERAKAN TANAH

Faktor Pengontrol	Jenis Gerakan Tanah			
	Runtuhan/ Jatuhan & Robohan	Luncuran	Nendatan	Aliran, Rayapan, Pergerakan Lateral
Kondisi Lereng (Kemiringan Lereng)	Kemiringan umumnya lebih dari 45°	Kemiringan menengah hingga curam (20° - 65°)	Kemiringan menengah (20°- 45°)	Kaki pegunungan dengan kemiringan (12° - 20°)
Tanah/batuan penyusun lereng a. Massa yang bergerak	Batuan yang terpotong-potong oleh bidang-bidang retakan atau kekar umumnya berupa blok-blok batuan	1. Tanah residu (Latosol / Andosol) 2. Koluvium 3. Endapan vulkanik yang lapuk 4. Rombakan batuan	1. Tanah residu (Latosol / Andosol) 2. Koluvium 3. Endapan vulkanik yang lapuk 4. Rombakan batuan	Tanah lempung jenis <i>smectit</i> (<i>monmorilonit</i> dan <i>vermicullit</i>)
b. Bidang gelincir	Tanpa bidang gelincir	Merupakan bidang kontak antara material penutup yang bersifat		
c. Masa tanah/ batuan yang tidak bergerak	Blok-blok batuan yang masih stabil	Tanah/batuan dasar yang bersifat lebih kompak dan lebih masif, misal batuan dasar berupa breksi andesit dan andesit.		
Kondisi Geologi a. Kondisi struktur geologi pada lereng	Beberapa lereng bergerak karena kehadiran bidang kekar atau bidang perlapisan batuan yang miring searah dengan kemiringan lereng, serta kemiringan lereng lebih curam dari pada kemiringan bidang tersebut dan lebih besar dari besar sudut gesekan dalam pada bidang tersebut			
b. Sejarah Geologi	Daerah geologi yang aktif yang terletak pada zona penunjaman, umumnya berasosiasi dengan aktivitas gunung api dan morfologi perbukitan			
Iklm dan curah hujan	1. Intensitas hujan yang tinggi (lebih dari 70 mm/jam atau 2.500 mm/tahun) 2. Intensitas hujan yang kurang dari 70 mm/jam yang terjadi terus menerus selama beberapa jam, hari atau beberapa minggu.			
Kondisi hidrologi pada lereng	1. Kondisi muka air tanah dangkal pada lereng yang tersusun oleh tanah/ dan batuan yang membentuk akuifer tak tertekan 2. Kondisi muaka air tanah dalam namun diatas muka air tanah terdapat akuifer menggantung 3. Pada lereng terdapat pipa atau saluran alam yang arah alirannya searah kemiringan lereng			
Lain-lain penggunaan lahan pada lereng	Lahan pada lereng jenuh air, misalnya akibat adanya persawahan dan saluran air untuk domestik yang mengakibatkan rembesan air ke dalam lereng.			

Sumber : Karnawati (2003)

Secara umum Karnawati (2003) mengungkapkan faktor pengontrol terjadinya longsor pada suatu lereng dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi geologi batuan dan tanah penyusun lereng, kemiringan lereng (geomorfologi lereng), hidrologi dan struktur geologi, sedangkan faktor eksternal yang disebut juga sebagai faktor pemicu yaitu curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng serta getaran gempa, seperti terlihat dalam Tabel II.3.

Zona kerentanan gerakan tanah dapat dianalisis berdasarkan penghitungan variabel lingkungan fisik suatu daerah yang mempengaruhi terjadinya gerakan tanah. Variabel yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dari penentuan zona kerentanan terhadap gerakan tanah adalah variabel kemiringan lereng (topografi), tekstur tanah, kondisi fisik batuan, curah hujan (iklim) dan penggunaan lahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa daerah yang memiliki kerawanan terhadap bencana tanah longsor dikategorikan dalam kawasan fungsi lindung. Sedangkan batasan kawasan lindung diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 837/KPTS/UM/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, seperti terlihat pada Tabel II.4.

Adapun variabel lingkungan fisik yang mempengaruhi tingkat zona kerentanan gerakan tanah adalah sebagai berikut:

TABEL II.4
PEMBAGIAN KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA

NO	FUNGSI KAWASAN	TOTAL NILAI SCORE
1	Kawasan Lindung	> 175
2	Kawasan Penyangga	125 – 174
3	Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan	< 125
4	Kawasan Budidaya Tanaman Semusim	< 125
5	Kawasan Terbangun	< 125

Sumber: SK Mentan Nomor 837/KPTS/UM/11/1980

a. Topografi

Pada dasarnya daerah perbukitan atau pegunungan yang membentuk lahan miring merupakan daerah rawan terjadi gerakan tanah. Kelerengan dengan kemiringan lebih dari 20° (atau sekitar 40%) memiliki potensi untuk bergerak atau longsor, namun tidak selalu lereng atau lahan yang miring punya potensi untuk longsor tergantung dari kondisi geologi yang bekerja pada lereng tersebut, Karnawati (2003) menjelaskan bahwa dari beberapa kajian terhadap kejadian longsor dapat teridentifikasi tiga tipologi lereng yang rentan untuk bergerak/longsor, yaitu:

1. Lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah residu yang dialasi oleh batuan atau tanah yang lebih kompak;
2. Lereng yang tersusun oleh perlapisan batuan yang miring searah kemiringan lereng maupun berlawanan dengan kemiringan lereng;
3. Lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan.

Kemiringan lereng dari suatu daerah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gerakan tanah seperti pada Tabel II.5.

TABEL II.5
KLASIFIKASI LERENG

NO	KELERENGAN (%)	DESKRIPSI	SATUAN MORFOLOGI
1	0 – 8	Datar	Dataran
2	8 – 15	Landai	Perbukitan berelief halus
3	15 – 25	Agak Curam	Perbukitan berelief sedang
4	25 – 45	Curam	Perbukitan berelief kasar
5	> 45	Sangat Curam	Perbukitan berelief sangat kasar

Sumber : van Zuidam (1983)

b. Geologi

Potensi terjadinya gerakan tanah pada lereng tergantung pada kondisi tanah dan batuan penyusunnya, dimana salah satu proses geologi yang menjadi penyebab utama terjadinya gerakan tanah adalah pelapukan batuan, Selby (1993). Proses pelapukan batuan yang sangat intensif banyak dijumpai di negara-negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Tingginya intensitas curah hujan dan penyinaran matahari menjadikan proses pelapukan batuan lebih intensif. Batuan yang banyak mengalami pelapukan akan menyebabkan berkurangnya kekuatan batuan yang pada akhirnya membentuk lapisan batuan lemah dan tanah residu yang tebal. Apabila hal ini terjadi pada lereng maka lereng akan menjadi kritis. Faktor geologi lainnya yang menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah adalah aktivitas vulkanik dan tektonik.

Faktor geologi dapat dianalisis melalui variabel tekstur tanah dan jenis batuan. Tekstur tanah dan jenis batuan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gerakan tanah yang diukur berdasarkan sifat tanah dan kondisi fisik batuan, dapat dilihat seperti pada Tabel II.6.

TABEL II.6
BATUAN PENYUSUN DAERAH PENELITIAN

NO	SATUAN BATUAN	JENIS BATUAN	KARAKTERISTIK FISIK
1	Qls = endapan Lahar G.Slamet	Breksi gunungapi, lava dan tufa	Keras rapuh dan lunak agak padat
2	Qvs = Batuan G.Slamet Tak Teruraikan	Lahar dengan beberapa lapisan lava	Lepas, lunak berlembar

Sumber : Asikin dan Prastistho (1992), Djuri, dkk. (1996)

c. Curah hujan

Curah hujan akan meningkatkan presepitasi dan kejenuhan tanah serta naiknya muka air tanah. Jika hal ini terjadi pada lereng dengan material penyusun (tanah dan atau batuan) yang lemah maka akan menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah/batuan dan menambah berat massa tanah, pada dasarnya ada dua tipe hujan pemicu terjadinya longsor, yaitu hujan deras yang mencapai 70 mm hingga 100 mm perhari dan hujan kurang deras namun berlangsung menerus selama beberapa jam hingga beberapa hari yang kemudian disusul dengan hujan deras sesaat, Karnawati (2003). Hujan juga dapat menyebabkan terjadinya aliran permukaan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi pada kaki lereng dan berpotensi menambah besaran sudut kelerengan yang akan berpotensi menyebabkan longsor.

d. Tata guna lahan

Tata guna lahan merupakan bagian dari aktivitas manusia, secara umum yang dapat menyebabkan longsor adalah yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur seperti pemotongan lereng yang merubah kelerengan, hal ini juga akan merubah aliran air permukaan dan muka air

tanah. Penggundulan hutan maupun penggunaan lahan yang tidak memperhatikan ekosistem dapat pula memicu terjadinya gerakan tanah dan erosi. Faktor pemanfaatan lahan dapat dianalisis melalui variabel jenis kegiatan dari pemanfaatan lahan yang terjadi pada daerah penelitian, seperti pada Tabel II.7.

TABEL II.7
KLASIFIKASI PEMANFAATAN LAHAN

NO	PEMANFAATAN LAHAN	KETERANGAN
1	Hutan tidak sejenis	Tidak peka terhadap erosi
2	Hutan sejenis	Kurang peka terhadap erosi
3	Perkebunan	Agak peka terhadap erosi
4	Permukiman, Sawah, Kolam	Peka terhadap erosi
5	Tegalan, Tanah terbuka	Sangat peka terhadap erosi

Sumber : Karnawati (2003)

2.2. Pemanfaatan Lahan sebagai Pengontrol Resiko Gerakan Tanah

2.2.1. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan atau tata guna lahan (*land use*) adalah pengaturan penggunaan lahan. Tata guna lahan terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: tata guna yang berarti penataan atau pengaturan penggunaan, hal ini merupakan sumber daya manusia dan tanah yang berarti ruang, hal ini merupakan sumber daya alam serta memerlukan dukungan berbagai unsur lain seperti air, iklim, tubuh tanah, hewan, vegetasi, mineral, dan sebagainya. Jadi secara prinsip dalam tata guna lahan diperhitungkan faktor geografi budaya atau faktor geografi sosial dan faktor geografi alam serta relasi antara manusia dengan alam (Jayadinata, 1999).

Kegiatan manusia dikenal sebagai salah satu faktor paling penting terhadap terjadinya erosi tanah yang cepat dan intensif. Kegiatan tersebut kebanyakan berkaitan dengan perubahan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap erosi, misalnya perubahan penutup tanah akibat penggundulan/pembabatan hutan untuk permukiman, lahan pertanian dan ladang gembalaan. Perubahan topografi secara mikro akibat penerapan terasering, penggemburan tanah untuk pengolahan serta pemakaian stabiliser dan pupuk yang berpengaruh pada struktur tanah. Kegiatan manusia di muka bumi sering mengganggu keseimbangan antara regenerasi (pembentukan) tanah dan laju erosi tanah.

Karnawati (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan lahan dapat menjadi faktor pengontrol gerakan tanah dan meningkatkan resiko gerakan tanah karena pemanfaatan lahan akan berpengaruh pada tutupan lahan (*land cover*) yang ada. Tutupan lahan dalam bentuk tanaman-tanaman hutan akan mengurangi erosi. Adapun tutupan lahan dalam bentuk permukiman, sawah dan kolam akan rawan terhadap erosi, lebih-lebih lahan tanpa penutup akan sangat rawan terhadap erosi yang akan mengakibatkan gerakan tanah.

Vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan terhadap pengaruh faktor-faktor lain yang erosif seperti hujan, topografi dan karakteristik tanah. Menurut Suripin (2002) pengaruh vegetasi dalam memperkecil laju erosi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Vegetasi mampu menangkap (intersepsi) butir air hujan sehingga energi kinetiknya terserap oleh tanaman dan tidak menghantam langsung pada tanah;
2. Tanaman penutup mengurangi energi aliran, meningkatkan kekasaran

sehingga mengurangi kecepatan aliran permukaan dan memotong kemampuan aliran permukaan untuk melepas dan mengangkut partikel sedimen;

3. Perakaran tanaman meningkatkan stabilitas tanah dengan meningkatkan kekuatan tanah, granularitas dan porositas tanah;
4. Aktivitas biologi yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman memberikan dampak positif pada porositas tanah;
5. Tanaman mendorong transpirasi air, sehingga lapisan tanah atas akan menjadi kering dan memadatkan lapisan di bawahnya.

2.2.2. Peran Vegetasi dalam Pengendalian Erosi dan Longsor

Pengendalian erosi dan gerakan tanah dengan daur air sering merupakan satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan. Akhir-akhir ini masyarakat semakin banyak menopangkan harapan pada vegetasi untuk mengatasi masalah pengendalian daur air dan longsor lahan (Sujoko, 2003). Peran vegetasi dalam pengendalian longsor lahan antara lain sebagai evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, lensa tanah air di bawah dan di atas permukaan. Sifat vegetasi yang dapat berperan seperti hutan dalam pengendalian daur air adalah:

- a. Sifatnya dinamik tergantung pada waktu
- b. Nilai perannya ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutan (vegetasi)
- c. Perlu disadari bahwa peran hutan dalam pengendalian daur air maupun dalam pengendalian longsor lahan untuk suatu keadaan ekosistem hutan tertentu dibatasi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi.

Menurut Paimin (2005) bahwa tanah dan vegetasi mengalami proses interaktif yang berpengaruh terhadap limpasan air permukaan maupun erosi, proses tersebut meliputi :

- a. pengikatan tanah secara fisis oleh akar serta elektrokhemis dan nutrien antara akar dan tanah;
- b. penahanan tetes air hujan dan air limpasan oleh serasah organik;
- c. peningkatan infiltrasi di sepanjang daerah perakaran;
- d. peningkatan bahan organik ke dalam tanah, sehingga struktur tanah dan kualitas penahanan air (*water holding*) lebih baik;
- e. peningkatan aktivitas biologi didalam tanah sehingga struktur tanah lebih baik.

Efektifitas tanaman penutup dalam mengurangi erosi tergantung pada kontinuitas penutupan, kerapatan penutup tanah dan perakaran. Tanaman penutup tidak hanya mengurangi kecepatan aliran permukaan karena meningkatnya kekasaran, tetapi juga mencegah terkonsentrasinya aliran permukaan. Penurunan kecepatan aliran permukaan memberi peluang waktu untuk terjadi infiltrasi. Hutan yang terpelihara dengan baik, terdiri dari pepohonan dikombinasikan dengan tanaman penutup tanah, seperti rerumputan, semak atau perdu dan belukar merupakan pelindung tanah yang ideal terhadap bahaya erosi (Suripin, 2002).

Seyhan (1990) menyatakan bahwa hutan merupakan rintangan terhadap gerakan menurun air. Tanah-tanah hutan cenderung memiliki laju infiltrasi yang tinggi karena timbunan sesesah (dari tetesan yang jatuh dari daun, ranting dan cabang) pada lantai hutan, penetrasi akar (pengaruh perforasi) ke dalam sistem tanah dan lebih jarang terjadinya suhu beku (*frost*). Limpasan bawah permukaan

lebih tinggi di bawah hutan dibandingkan pada tipe-tipe penutup tanah lainnya pada tanah-tanah yang sebanding dan limpasan bawah permukaan merupakan bagian terbesar limpasan secara langsung seperti terlihat pada Tabel II.8.

TABEL II.8
HUBUNGAN TIPE VEGETASI DENGAN AIR LIMPASAN

NO	TIPE VEGETASI	LIMPASAN PERMUKAAN (%)	LIMPASAN BAWAH PERMUKAAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Hutan	5 – 10	90 – 95
2	Tanah Gundul	60 – 80	15 – 95
3	Rumput	80	20

Sumber: Seyhan (1990)

Limpasan permukaan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berhutan adalah jarang sekali. Pada umumnya, dengan meningkatnya penahanan permukaan (*surface detention*) seperti intersepsi pada vegetasi dan meningkatnya laju infiltrasi yang disebabkan karena kapasitas penyerap seresah yang tinggi, aliran maksimum yang diharapkan dari kawasan yang berhutan akan lebih rendah.

Pengaruh vegetasi adalah pada penambahan beban lereng, menambah tekanan geser, gaya mendorong atau gaya menahan. Beban tanaman/vegetasi tersebut akan menambah kemantapan lereng pada sudut lereng sekitar 34° atau kurang, sedang untuk sudut yang lebih besar maka beban tanaman akan dapat mengganggu kestabilan lereng. Sistem perakaran dari tanaman dapat menambah kohesi yang akan menghambat terjadinya longsor (Selby, 1993). Vegetasi akan memodifikasi kandungan air dalam tanah dengan menurunkan muka air tanah akibat adanya evapotranspirasi, sehingga dapat menunda tingkat kejenuhan air tanah. Dengan demikian akan menambah kemantapan lereng (Sudarsono 2003).

Disamping itu vegetasi akan menghasilkan seresah yang akan menjaga kelembaban tanah, sehingga pembentukan retakan pada tanah dapat terkendali. Dengan berkurangnya retakan pada tanah lempungan maka air yang masuk menjadi berkurang dengan demikian lereng menjadi lebih stabil. Tutupan lahan oleh vegetasi dengan segala bentuknya dapat mempengaruhi aliran air pada suatu lereng. Tutupan vegetasi tersebut dapat berupa hutan alami, vegetasi yang dibudidayakan, vegetasi sebagai tanaman pagar atau vegetasi monokultur (misalnya hutan tanaman industri).

Pengaruh vegetasi pada hidrologi lereng adalah sebagai berikut :

- a. Menghalangi air hujan agar tidak jatuh langsung di permukaan tanah, sehingga kekuatan untuk menghancurkan tanah dapat dikurangi;
- b. Menghambat aliran permukaan dan memperbanyak air infiltrasi;
- c. Penyerapan air kedalam tanah diperkuat oleh transpirasi melalui vegetasi.

2.3. Kemampuan Lahan dalam Mendukung Pemanfaatan Lahan

Kemampuan lahan merupakan kapasitas lahan untuk dapat berproduksi secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu panjang. Kemampuan lahan diartikan sebagai pengklasifikasian tanah yang didasarkan pada faktor penghambat kerusakan tanah yang bersifat permanen. Suripin (2002) membagi kemampuan lahan ke dalam klasifikasi teknis, yaitu klasifikasi lahan yang didasarkan pada sifat lahan yang berpengaruh pada kemampuan tanah untuk penggunaan kegiatan tertentu. Penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan akan menciptakan pemanfaatan ruang yang tepat guna dan berhasil guna.

TABEL II.9
KRITERIA KELAS KEMAMPUAN LAHAN

NO	KELAS TANAH	FUNGSI	KRITERIA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kelas I	Punya sedikit faktor pembatas yang bersifat tetap, begitu juga dengan resiko kerusakan. Tanah ini bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan non pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi datar ➤ Drainase baik – agak baik ➤ Kedalaman tanah > 90 cm ➤ Bahaya erosi tidak ada ➤ Tekstur tanah agak halus – sedang
2	Kelas II	Punya kendala yang bersifat moderat. Kelas ini walaupun tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif namun bisa digunakan untuk berbagai kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi landai ➤ Drainase agak buruk ➤ Kedalaman tanah > 90 cm ➤ Bahaya erosi ringan ➤ Tekstur tanah halus – agak kasar
3	Kelas III	Kelas lahan ini hanya bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian sedang disertai usaha dengan kemungkinan untuk diusahakan dengan penggunaan yang lain	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi bergelombang ➤ Drainase buruk ➤ Kedalaman tanah 50 - 90 cm ➤ Bahaya erosi ringan ➤ Tekstur tanah halus – agak kasar
4	Kelas IV	Punya faktor pembatas lebih banyak. Kelas ini masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian semusim disertai dengan usaha konservasi tanah yang intensif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi miring berbukit ➤ Drainase sangat buruk ➤ Kedalaman tanah 25 - 50 cm ➤ Bahaya erosi sedang ➤ Tekstur tanah halus – agak kasar
5	Kelas V	Kelas lahan ini tidak dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian semusim, namun dapat diusahakan untuk kegiatan non pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi miring berbukit ➤ Drainase sangat buruk ➤ Kedalaman tanah 25 - 50 cm ➤ Bahaya erosi sedang ➤ Tekstur tanah halus – agak kasar
6	Kelas VI	Kelas lahan ini tidak cocok untuk pertanian semusim, namun cocok untuk penggembalaan dan cagar alam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi agak curam ➤ Drainase sangat buruk ➤ Kedalaman tanah < 25 cm ➤ Bahaya erosi berat ➤ Tekstur tanah halus – agak kasar
7	Kelas VII	Kelas lahan ini harus dipertahankan dengan vegetasi permanen namun dapat dimanfaatkan sebagai hutan produksi dengan perlakuan khusus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi curam ➤ Drainase sangat buruk ➤ Kedalaman tanah < 25 cm ➤ Bahaya erosi sangat berat ➤ Tekstur tanah halus – agak kasar
8	Kelas VIII	Kelas lahan ini harus dibiarkan secara alami dan cocok untuk cagar alami	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi sangat curam ➤ Drainase sangat buruk ➤ Kedalaman tanah < 25 cm ➤ Bahaya erosi sangat berat ➤ Tekstur tanah kasar

Sumber: Rahim (2000)

Rahim (2000) membagi kelas kemampuan lahan yang didasarkan pada kondisi fisik alam yang menunjukkan kesesuaian pada penggunaan lahan di atasnya. Pembagian kelas kemampuan lahan tersebut terbagi menjadi 8 (delapan) kelas, seperti terlihat di Tabel II.9.

2.4. Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat

Kapasitas adalah sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, masyarakat atau negara yang memungkinkan untuk menanggulangi, mempertahankan diri, mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi atau dengan cepat memulihkan diri dari suatu bencana. Adapun kerentanan adalah sekelompok kondisi yang ada dan melekat pada diri seseorang, masyarakat atau negara baik bersifat fisik, ekonomis, sosial dan perilaku yang berpengaruh melemahkan kemampuan dari suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak dari suatu bencana (Sadisun, 2008).

Konsep dasarnya adalah bahwa seseorang terlemah di dalam suatu komunitas mempunyai beberapa ketrampilan, sumberdaya, kekuatan dan kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dan bahkan sangat dimungkinkan untuk dapat menolong orang lain yang ada di sekitarnya. Kondisi lingkungan yang berada di daerah rawan menyebabkan masyarakat berada pada kondisi yang rentan. Bencana terjadi ketika masyarakat tidak dapat mengatasi kerentanan tersebut. Kerentanan menjadi tidak tertanggulangi karena kecepatan adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan sekitarnya (yang meningkatkan kerentanan) jauh tertinggal dari kecepatan perubahan lingkungan itu sendiri.

Adapun jenis kerentanan yang ada saat ini meliputi kerentanan fisik/material, kapasitas sosial/kelembagaan, dan kapasitas sikap/motivasi.

2.4.1. Persepsi Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas dan Kerentanan

Persepsi merupakan tanggapan atau pengertian yang terbentuk langsung dari suatu peristiwa atau pembicaraan tapi dapat juga pengertian-pengertian yang terbentuk lewat proses yang diperoleh melalui pancaindera. Persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia yang ada disekitarnya (Winarso, 2002). Dengan demikian setiap orang dimungkinkan akan memiliki perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap objek atau fenomena yang terjadi. Sebuah persepsi berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang suatu fenomena pada saat tertentu dan mencakup pula pada aspek kognitif atau pengetahuan. Jadi persepsi mencakup penafsiran objek atau tanda dari sudut pandang individu yang bersangkutan dan persepsi dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Lebih lanjut dijelaskan bahwa persepsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: situasi, kebutuhan dan keinginan begitu juga keadaan emosi.

Persepsi masyarakat setempat yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penentuan tindakan untuk memanfaatkan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor merupakan suatu penilaian dan pengumpulan keinginan ataupun harapan dari individu masyarakat yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan pemanfaatan lahan di objek tersebut. Dari

persepsi seseorang terhadap objek sehingga menimbulkan suatu preferensi. Preferensi disini memiliki pengertian adalah kecenderungan seseorang dalam melakukan suatu pilihan atau memilih suatu prioritas terhadap objek yang dianggapnya paling sesuai dengan kondisi dirinya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka persepsi dapat diartikan sebagai hal yang dirasakan atau dimengerti oleh subjek (penduduk yang bermukim dan memanfaatkan lahan yang ada) terhadap suatu objek (daerah rawan tanah longsor) yang diamati, dirasakan atau dimengerti (Winarso, 2002). Dalam penelitian ini persepsi masyarakat dapat diartikan sebagai penilaian terhadap kondisi daerah rawan bencana tanah longsor yang dirasakan dan dimengerti saat ini. Dari berbagai konsep tentang persepsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses perjalanan sejak dikenalnya suatu objek melalui organ-organ indera sampai diperolehnya gambaran yang jelas dan dapat dimengerti serta diterimanya objek tersebut untuk untuk selanjutnya dilakukan tindakan.

2.4.2. Pengaruh Kondisi Masyarakat pada Kapasitas dan Kerentanan

Kondisi masyarakat dalam bentuk tingkat sosial ekonomi akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tersebut, baik dalam bentuk, pemenuhan permukiman maupun aktivitas untuk pemenuhan ekonomi lainnya. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat sosial masyarakat dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kapasitas dan kerentanan yang ada pada masyarakat. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat sosial masyarakat yang rendah dan tingkat pemahaman masyarakat yang buruk terhadap

kondisi lingkungan yang ada akan meningkatkan kerentanan masyarakat setempat dalam menghadapi bahaya bencana alam.

Menurut Yudohusodo et. al (1991) variabel yang biasa dipakai dalam menentukan suatu lokasi untuk pemanfaatan lahan, khususnya permukiman adalah faktor kependudukan yaitu faktor sosial ekonomi masyarakat yang menyangkut tentang mata pencaharian, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Biasanya, orang yang memiliki mata pencaharian mapan, tingkat pendidikan cukup dan tingkat pendapatan yang tinggi berkeinginan untuk memiliki rumah tinggal di permukiman yang layak huni, aman dari gangguan alam maupun sosial sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan tenang dan aman.

Tinjauan konteks kemasyarakatan terhadap kerentanan dan resiko bencana perlu dilakukan untuk mengubah keadaan dari situasi kerentanan tinggi dan kapasitas rendah menjadi lebih baik dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal ini akan dapat mengurangi adanya korban dan dapat melakukan upaya pemulihan yang lebih mengutamakan kapasitas lokal. Sehingga penting untuk melakukan identifikasi dan mengelola kemampuan lokal sebagai dasar utama dari aktivitas pengelolaan bencana.

2.4.3. Perilaku Masyarakat yang Mempengaruhi Kapasitas dan Kerentanan

Perilaku masyarakat dalam budidaya adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, sekelompok masyarakat yang dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan disekitarnya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan termasuk didalamnya berupa kebutuhan

untuk permukiman. Selain hal tersebut, masyarakat membudidayakan lahan yang ada untuk keperluan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengelolaan lahan sebagai lahan sawah, kolam ikan, kebun/tegalan, pengelolaan hutan sebagai dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Perilaku masyarakat dalam bermukim akan memberikan beban kepada tanah pendukung, budidaya sawah dan kolam ikan akan meningkatkan kejenuhan air tanah sehingga akan memicu terjadinya gerakan tanah (Karnawati, 2003). Hal tersebut akan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap resiko bencana alam tanah longsor. Adapun perilaku masyarakat dalam mengelola kebun/tegalan dan hutan dengan membudidayakan tanaman keras dan tanaman tahunan akan mempertinggi gaya geser tanah sehingga akan mengurangi tingkat kerentanan terhadap bencana alam tanah longsor

Turner dalam Yunus (2000), mengemukakan teori mobilitas tempat tinggal (*residential mobility*), terdiri dari 4 (empat) faktor yang mempengaruhi orang dalam menentukan tempat tinggal, yaitu:

- a. Dimensi lokasi. Lokasi dalam konteks ini berkaitan erat dengan jarak terhadap tempat budidaya ekonomi masyarakat (aksesibilitas);
- b. Dimensi penguasaan tempat tinggal (*tenure*). Masalah penguasaan tempat tinggal dalam bentuk warisan, turun temurun, menyewa atau memiliki sendiri;
- c. Dimensi rumah (*shelter*). Terdiri dari rumah sangat sederhana, sederhana, sedang dan mewah. Pemilihan jenis rumah tergantung dari kemampuan dan persepsi orang tersebut terhadap rumah;

- d. Dimensi penghasilan. Besar kecilnya penghasilan sangat mempengaruhi pemilihan dimensi rumah.

Teori ini didasari oleh asas keseimbangan atau *equilibrium*, dengan pengertian bahwa mereka yang lebih kuat ekonominya memperoleh sesuatu yang lebih baik dalam hal *residential location*.

2.5. Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Ruang

Pemanfaatan lahan adalah menyangkut semua jenis penggunaan atas tanah oleh manusia yang meliputi penggunaan untuk perumahan, pertokoan hingga segala jenis kegiatan yang menyangkut masalah fisik, sosial dan ekonomi. Selain itu penggunaan lahan adalah keadaan penggunaan lahan yang ada pada saat sekarang ini berdasarkan atas penutup tanah yang ada diatas permukaan bumi dan keadaan penutup tanah tersebut sesuai dengan pengguna. Jayadinata (1999), mengemukakan bahwa baik di perkotaan ataupun di perdesaan, tanah (lahan) digunakan untuk kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan di perkotaan lebih banyak digunakan untuk industri, perdagangan dan jasa.

2.5.1. Kebijakan Penataan Ruang

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Dalam perencanaan wilayah mencakup kegiatan penataan ruang, sedangkan perencanaan aktivitas tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah (Tarigan, 2004). Perencanaan wilayah memandang suatu wilayah sebagai satu kesatuan ruang yang terpadu dan menggambarkan bagaimana keadaan suatu wilayah di masa datang secara

komprehensif. Perencanaan wilayah menjadi penting karena beberapa argumentasi yaitu; potensi setiap wilayah terbatas dan berbeda, dampak kemajuan teknologi tidak seimbang dengan kemampuan rehabilitasi dan antisipasi dampaknya, perlunya upaya mengatasi masalah lahan yang terbatas untuk setiap aktivitas manusia, sifat wilayah yang lintas dan multi sektor serta lintas daerah memerlukan penanganan yang secara komprehensif.

Pemanfaatan ruang merupakan bagian dari perencanaan penataan ruang, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak. Berdasarkan pengertian tersebut, penataan ruang pada hakekatnya adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Selain itu, penataan ruang dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan pengelolaan dan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada berdasarkan kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang di atas, produk penataan ruang dibedakan menjadi penataan raung wilayah Nasional (RTRW Nasional), wilayah Provinsi (RTRW Provinsi), dan wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kabupaten/Kota).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang atau UUPR pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruang, tata ruang dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- 2) Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
- 3) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Sedangkan BAB III tentang Klasifikasi Penataan Ruang pada Pasal 4 dan 5 menyebutkan Penataan Ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama, wilayah administratif, kegiatan dan nilai strategis kawasan.

- 1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
- 2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- 3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- 4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan;
- 5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan kawasan strategis nasional, penataan kawasan strategis provinsi, dan penataan kawasan strategis kabupaten/kota.

Secara garis besar dalam penataan ruang yang utama adalah penetapan kawasan yaitu meliputi penataan kawasan fungsi lindung dan kawasan budidaya pada wilayah administrasi tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), kemudian baru menetapkan fungsi atas aspek kegiatan yang terjadi atau yang diinginkan. Di dalam penataan ruang terdapat rencana tata guna lahan yang mengatur daerah-daerah yang dapat digunakan bagi berbagai jenis budi daya misalnya permukiman, lahan pertanian, industri, perdagangan dan jasa, dan lain-lain.

2.5.2. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Lahan

Ditinjau dari fungsi utama kawasan, penataan ruang meliputi kawasan lindung dan budidaya. Berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan, penataan ruang dibedakan atas kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu, tanpa terlepas dari pembagian menurut fungsi administrasinya. Penataan kawasan tertentu diselenggarakan untuk mengembangkan kawasan yang strategis dan perlu diprioritaskan guna mendukung pembangunan nasional dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UUPR, prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan penegakan hukum. Tujuan penataan ruang sendiri adalah untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan runag yang berkualitas.

Dalam implementasinya, penataan ruang yang terdiri dari perencanaan pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang akan dihadapkan pada berbagai masalah yang signifikan, antara lain:

- a. Rencana tata ruang yang saat ini ada masih berorientasi pada batasan wilayah administrasi;
- b. Belum adanya persamaan persepsi dari berbagai instansi mengenai pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada pola tata ruang;
- c. Terbatasnya ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dalam penyusunan pola tata ruang;
- d. Kemampuan kelembagaan penataan ruang yang masih terbatas dan;
- e. Perangkat hukum yang memahami penataan ruang masih terbatas dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyebab utama dari ketidakberhasilan penanganan masalah atau tidak optimalnya penanganan penataan ruang adalah tidak adanya rujukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dapat menyerasikan dan mengkoordinasikan langkah penanganan mulai dari perencanaan pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang dan monitoring/evaluasi pemanfaatan ruang dari suatu kegiatan pembangunan. Berdasarkan uraian diatas, RTRW mempunyai peranan sangat penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, karena dalam RTRW perencanaan dapat dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijaksanaan secara hierarki mulai dari tingkat nasional sampai ke propinsi dan kabupaten/kota. Dengan perkataan lain, RTRW seharusnya dapat menjadi alat koordinasi antar sektor terkait baik secara horisontal maupun vertikal di bidang penataan ruang.

2.6. Pertimbangan Potensi Bencana dalam Pengembangan Wilayah

Potensi bencana alam tanah longsor merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam pengembangan wilayah, terutama diperlukan dalam proses penyusunan tata ruang baik pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Pedoman Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan, untuk keperluan perencanaan wilayah dan kota pada tingkat nasional perlu disusun suatu “kriteria nasional” untuk kawasan rawan bencana, khususnya yang berkaitan dengan kawasan rawan bencana:

- a. yang mutlak “harus” dihindari untuk pemanfaatan apapun
- b. yang masih dapat dikembangkan yang bergradasi dengan memanfaatkan konsep mitigasi.

Berdasar Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, bahwa kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung yang perlu dijaga untuk melindungi manusia dan berbagai kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tanah longsor. Sebagai salah satu upaya pengendalian kawasan lindung, maka pada kawasan rawan bencana dilarang melakukan budidaya kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.

Hal tersebut menjadi sangat penting, sehingga seluruh proses dan prosedur penataan ruang wilayah dan kota di Indonesia harus mempertimbangkan aspek kebencanaan dan konsep mitigasi bencana. Pada saat ini upaya manajemen bencana longsor di Indonesia masih menitikberatkan pada tahap “saat terjadi bencana” dan “pasca bencana” saja, sehingga untuk ke depan peran dan fungsi penataan ruang sebagai aspek mitigasi bencana sebenarnya menjadi sangat strategis berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pertimbangan tersebut sebagai upaya untuk mencegah atau paling tidak dapat meminimalkan korban yang diakibatkan oleh adanya bencana (Karnawati, 2003).

Selanjutnya Karnawati (2003), berpendapat bahwa dalam manajemen bencana alam tanah longsor perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memahami fenomena gerakan tanah, yang menyangkut jenis dan mekanisme, penyebabnya, dan pemicu terjadinya;
- b. Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam manajemen;
- c. Identifikasi akar permasalahan yang mendorong terjadinya penyebab bencana;
- d. Penetapan strategi, sistem dan unsur pelaksana manajemen;
- e. Penetapan program manajemen, prioritas dan jangka waktu pencapaiannya.

Sedangkan sistem manajemen bencana dikelompokkan ke dalam beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap preferensi (pencegahan)

Tahap ini dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan meminimalisir potensi bencana alam tanah longsor, serta meminimalkan atau mencegah

resiko yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Sebagai contoh bahwa bencana alam tanah longsor dapat dicegah atau paling tidak diminimalkan kemungkinan terjadinya korban apabila faktor-faktor penyebab dan pemicunya dapat dikontrol dan dikendalikan, seperti tata guna lahan dan vegetasi penutup.

b. Tahap kesiapsiagaan

Tahap ini merupakan tahap menjelang terjadinya bencana seperti bencana tanah longsor maka tahapan ini dilakukan pada akhir musim kemarau sampai awal musim penghujan, karena bencana longsor biasanya terjadi pada saat tanah mulai jenuh air, yaitu pada pertengahan sampai akhir musim penghujan.

c. Tahap penanggulangan (pasca bencana)

Tahap penanggulangan ini merupakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dari kejadian bencana alam tanah longsor. Tahap ini perlu dilakukan *updating* pemetaan dan inventarisasi bencana tanah longsor serta mengkaji penyebab dan mekanisme terjadinya bencana tersebut, sehingga dapat diketahui zona-zona baru yang rawan bencana tanah longsor yang sangat diperlukan dalam menyusun rencana tata ruang pasca bencana.

Tahap manajemen bencana alam tanah longsor ini tidak berhenti pada tahap penanggulangan saja, tetapi merupakan siklus balik yang terus berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena kejadian bencana alam geologi merupakan suatu siklus yang sangat memungkinkan mengalami pengulangan secara periodik. Bencana gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami memerlukan kajian yang lebih sulit, karena kejadiannya tidak dapat dideteksi

dari pergantian musim, namun bencana alam banjir dan tanah longsor siklus pengulangan relatif lebih mudah untuk diidentifikasi, yaitu pada umumnya terjadi saat musim penghujan.

Pertimbangan adanya potensi bencana alam tanah longsor pada suatu daerah diperlukan dalam penyusunan RTRW dan pengambilan keputusan pemberian perijinan terhadap pengajuan rencana suatu pembangunan. Tujuan pertimbangan potensi rawan bencana alam tanah longsor selama tahap perencanaan pembangunan berdasarkan Pedoman Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan adalah:

- a. Meminimalisir resiko dan pengaruh potensi rawan tanah longsor pada kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
- b. Memastikan berbagai jenis kegiatan pembangunan tidak harus dilakukan di daerah rawan bencana tanah longsor tanpa tindakan pengamanan yang memadai;
- c. Mengembalikan fungsi lahan rawan tanah longsor, bila memungkinkan, menjadi tanah yang produktif; dan
- d. Membantu pengamanan masyarakat dan investasi swasta melalui kompensasi yang sesuai atas kondisi lokasi dan tindakan pencegahan dari kejadian bencana yang diperlukan.

2.7. Pemanfaatan SIG untuk menunjang pengembangan wilayah

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau *Geografic Information System* (GIS) adalah sebagai alat untuk menyimpan atau mengelola, mengolah atau

menganalisis dan menyajikan informasi mulai berkembang sejak akhir tahun 1980-an. Untuk penggunaan dan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) pada saat ini dan di masa depan, tiga komponen diatas secara umum masih tetap mendominasi kegiatan utama Sistem Informasi Geografis (SIG). Perubahan yang akan terjadi hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pergeseran kepentingan atau keperluan dan implementasi atau pemanfaatannya dari ketiga komponen Sistem Informasi Geografis (SIG) diatas (Sumarto, 1999).

Dalam awal perkembangannya teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) ini ditekankan pada pengumpulan dan konversi data dari sistem peta cetak dan data tabular atau numerik yang terkait ke dalam sistem basis data digital, sedangkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang ditekankan pada analisis yang dinamis dan aktif seperti pemodelan dan visualisasi dari data, hal ini sebagai konsekuensi logis untuk memperoleh informasi yang lebih mudah dan informatif.

Dalam bidang perencanaan pengembangan wilayah harus dikembangkan secara optimal potensi dan sumberdaya yang ada pada suatu wilayah untuk pemanfaatannya demi kesejahteraan masyarakat, maka langkah yang mesti ditempuh adalah dengan menginventarisasi keberadaan sumberdaya alam tersebut ke dalam data spasial maupun data tekstual. Berkaitan dengan ini maka dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) semuanya dapat dilakukan secara baik. Dalam analisis untuk perencanaan wilayah yang berkaitan dengan keruangan maka dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) data lebih cepat dalam pengolahan dan analisisnya.

2.8. Sintesis Literatur

Perkembangan dari suatu wilayah berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi wilayah sehingga akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, hal ini sangat diperlukan guna melayani dan mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk yang ada dan perkembangan perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu sarana yang berkaitan erat dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi terjadi adalah kebutuhan akan permukiman yang merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) dari setiap masyarakat dan lahan untuk aktivitas pendukung ekonomi. *Demand* untuk lahan aktivitas ekonomi dan permukiman semakin meningkat sedangkan *supply* lahan yang layak untuk beraktivitas tidak mengalami peningkatan, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya pemanfaatan lahan pada kawasan yang dinyatakan sebagai rawan bencana tanah longsor.

Penelitian ini mengkaji mengenai pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana gerakan tanah di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan persepsi masyarakat yang bermukim pada daerah tersebut digabungkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Secara lengkap sintesa literatur disajikan seperti pada Tabel II.10.

TABEL II.10
SINTESIS LITERATUR

NO	SUBSTANSI	URAIAN	VARIABEL	SUMBER PUSTAKA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor	Fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Tanah longsor menjadi bencana alam kalau mengakibatkan korban jiwa, sarana dan prasarana serta hasil budaya dari manusia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi; Geologi dan Struktur Geologi; ➤ Tata Guna Lahan; ➤ Curah Hujan 	Varnes (1978), Selby (1993), Karnawati (2003), Anwar (2003), Subowo (2003), Sujoko (2003), Paimin (2005),
2	Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat	Perilaku seseorang bersumber dari persepsi terhadap sesuatu dalam menilai diri dan lingkungannya. Persepsi ini akan menghasilkan preferensi seseorang dalam melakukan suatu pilihan. Persepsi masyarakat tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosial Ekonomi; ➤ Persepsi dan motivasi; ➤ Perilaku Masyarakat; ➤ Pemahaman lingkungan; ➤ Tingkat aksesibilitas 	Winarso (2002), Yunus (2000),
3	Kemampuan Lahan	Kapasitas tanah untuk memproduksi secara optimal tanpa menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang panjang. Pengklasifikasian tanah yang didasarkan pada faktor penghambat kerusakan tanah yang bersifat permanen. Penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan akan menciptakan pemanfaatan ruang yang tepat guna dan berhasil guna.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Topografi ➤ Drainase ➤ Kedalaman tanah ➤ Bahaya erosi ➤ Tekstur tanah 	Rahim (2000), Suripin (2001)
4	Kebijakan pemerintah tentang Penataan Ruang	Penataan Ruang sebagai upaya mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Pemanfaatan lahan menyangkut semua jenis penggunaan atas tanah untuk aktivitas manusia. Aktivitas manusia harus dibatasi dengan regulasi pengendalian pemanfaatan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Penataan Ruang; ➤ Perda RTRW; ➤ Perda (RUTRK/RDTRK); ➤ Perda Bangunan (IMB); 	Jayadinata (1999), Tarigan (2004), UU No. 26/2007; Keppres No. 32/1990; SK Mentan No. 837/KPTS/UM/11/1980; Perda No. 43/1995; No. 8/1999; No. 18/2005;

Sumber: Penulis (2008), diolah dari beberapa literatur

BAB III

KONDISI EKSISTING DESA GUNUNGLURAH DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

3.1. Letak dan Kesampaian Daerah Penelitian

Ibukota Kecamatan Cilongok terletak 15 kilometer di sebelah Barat dari Kota Purwokerto ibukota Kabupaten Banyumas. Sedangkan lokasi penelitian yang berada di Desa Gununglurah berada pada bagian Utara dari wilayah Kecamatan Cilongok dengan jarak 7 kilometer.

Lokasi penelitian yaitu di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat atau lebih, sedangkan sebagian besar dari daerah penelitian hanya dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan roda dua bahkan harus dilalui dengan berjalan kaki.

3.2. Kondisi Fisik Daerah Penelitian

3.2.1. Kemiringan Lereng

Secara umum kondisi kelerengan di daerah penelitian sangat bervariasi. Berdasarkan pembagian kelas kelerengan Van Zuidam (1983), kelerengan di Desa Gununglurah terbagi menjadi beberapa satuan kelerengan seperti pada Gambar 3.1, yaitu:

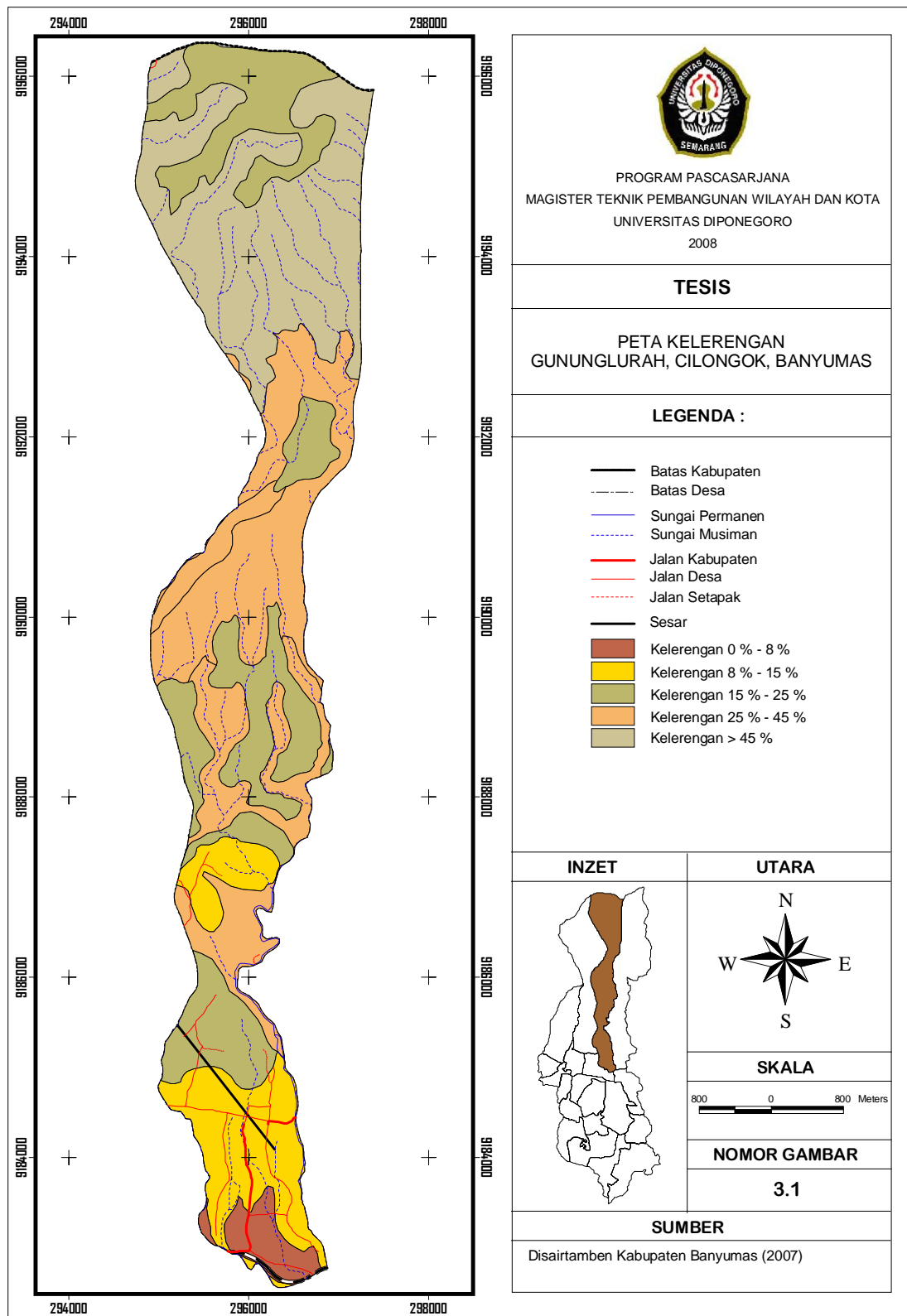
- a. Satuan Datar dengan kelerengan 0% sampai 8% seluas 59,643 Ha (2,99%) yang tersebar di bagian paling Selatan desa;
- b. Satuan Landai dengan kelerengan 8% sampai 15% seluas 265,454 Ha

- (13,30%) yang tersebar di bagian Selatan dan tengah desa;
- c. Satuan kelerengan Agak Curam dengan kelerengan 15% sampai 25% seluas 528,754 Ha (26,49%) yang tersebar merata di bagian tengah, Selatan dan Utara desa;
 - d. Satuan kelerengan Curam dengan kelerengan 25% sampai 45% seluas 579,756 Ha (29,04%) yang tersebar di bagian tengah desa;
 - e. Satuan kelerengan Sangat Curam dengan kelerengan lebih dari 45% seluas 562,629 Ha (28,18%) yang tersebar di bagian Utara desa.

3.2.2. Geomorfologi

Secara umum morfologi daerah penelitian dan sekitarnya merupakan perbukitan bergelombang dengan relief sedang hingga kasar dengan kemiringan lereng bervariasi antara 0% hingga lebih dari 45% dengan ketinggian berkisar antara 400 meter hingga lebih dari 1.400 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kenampakan bentang alam dan proses geologi yang ada, geomorfologi daerah penelitian dipisahkan menjadi 2 (dua) satuan geomorfologi seperti pada Gambar 3.2, yaitu:

- a. Satuan Perbukitan Berelief Sedang. Satuan perbukitan ini tersebar 11,67% pada bagian Selatan dari daerah penelitian dengan penyebaran luas sekitar 232,969 Ha;
- b. Satuan Perbukitan Berelief Kasar. Satuan ini tersebar 88,33% merata di seluruh daerah penelitian kecuali bagian Selatan dengan penyebaran seluas 1.763,531 Ha.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008

TESIS

**PETA KELERENGAN
GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS**

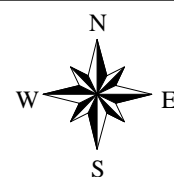
LEGENDA :

- Batas Kabupaten
- - - Batas Desa
- Sungai Permanen
- - - Sungai Musiman
- Jalan Kabupaten
- - - Jalan Desa
- - - Jalan Setapak
- Sesar
- Kelerengan 0 % - 8 %
- Kelerengan 8 % - 15 %
- Kelerengan 15 % - 25 %
- Kelerengan 25 % - 45 %
- Kelerengan > 45 %

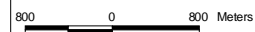
INZET



UTARA



SKALA

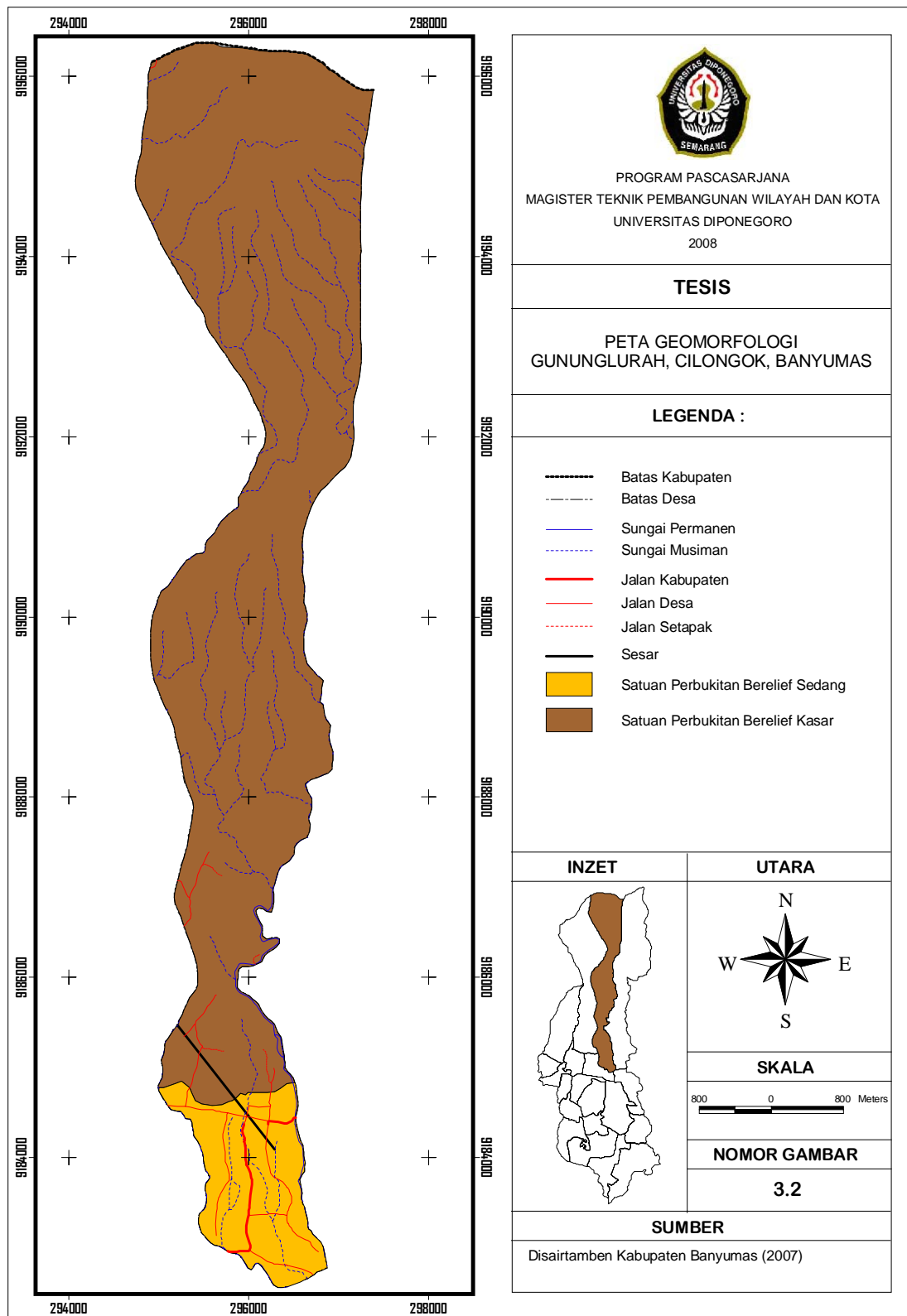


NOMOR GAMBAR

3.1

SUMBER

Disairtamben Kabupaten Banyumas (2007)



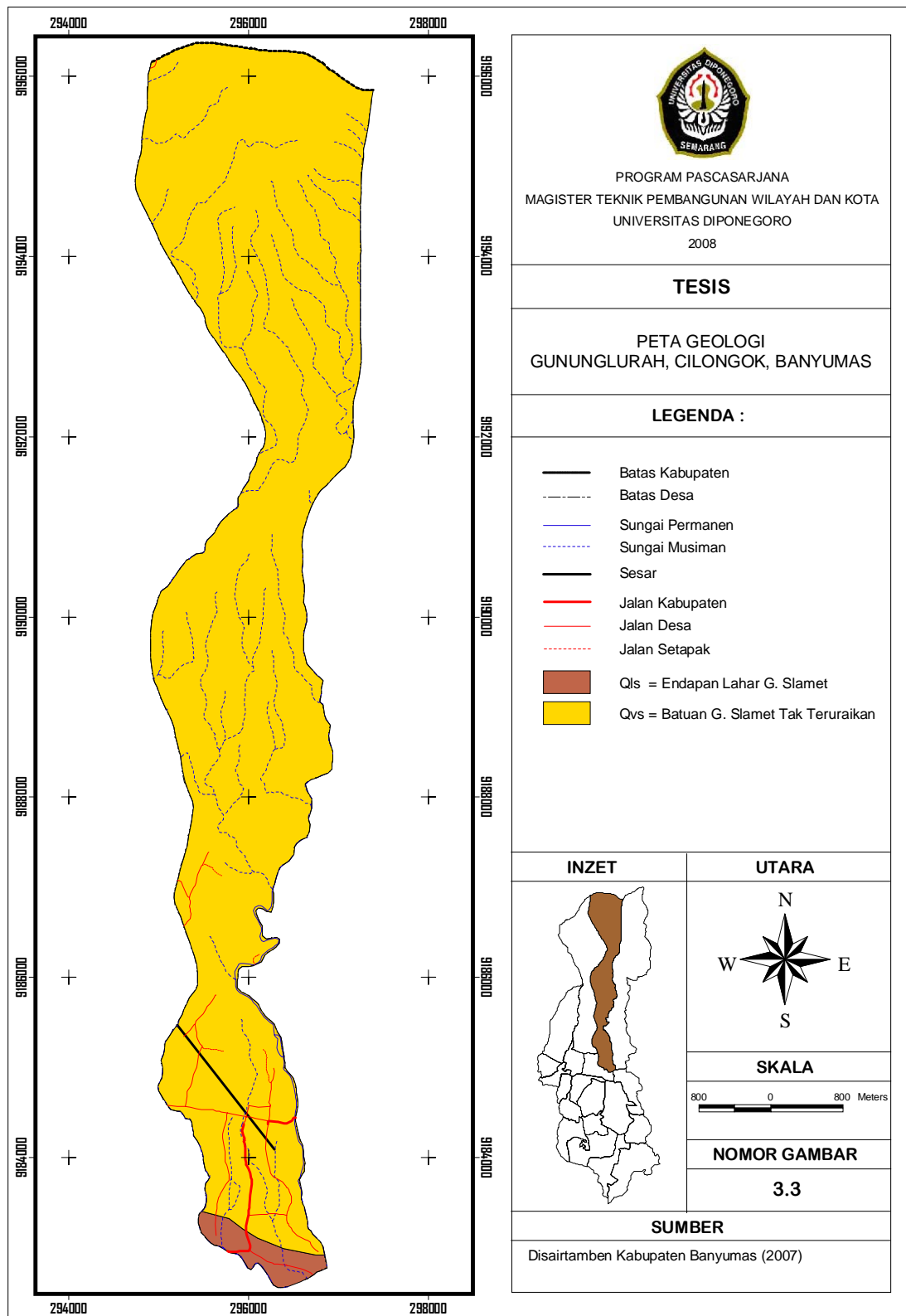
3.2.3. Geologi

Secara fisografi geologi daerah penelitian merupakan bagian dari mandala pegunungan Serayu Utara yang tercakup dalam Peta Geologi Teknik Lembar Tegal–Purwokerto (Djuri, dkk., 1996) dan Peta Geologi Lembar Banyumas dengan skala 1 : 100.000 (Asikin dan Prastistho, 1992). Adapun susunan satuan stratigrafi di daerah penelitian tersusun dari 2 (dua) satuan batuan seperti pada Gambar 3.3, yaitu:

- a. Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) yang tersusun oleh breksi gunungapi, lava dan tufa. Penyebaran satuan ini merata di seluruh daerah penelitian dengan luas 1.950,639 Ha atau 97,66% dan sebarannya membentuk pegunungan dan perbukitan tersebar;
- b. Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls) yang tersusun oleh lahar dengan beberapa lapisan lava di bagian bawah. Satuan ini tersebar di bagian Selatan dari daerah penelitian dengan luas 46,753 Ha atau sekitar 2,34% dan membentuk topografi hampir rata dan punggung yang cukup tajam di sepanjang tepi sungai.

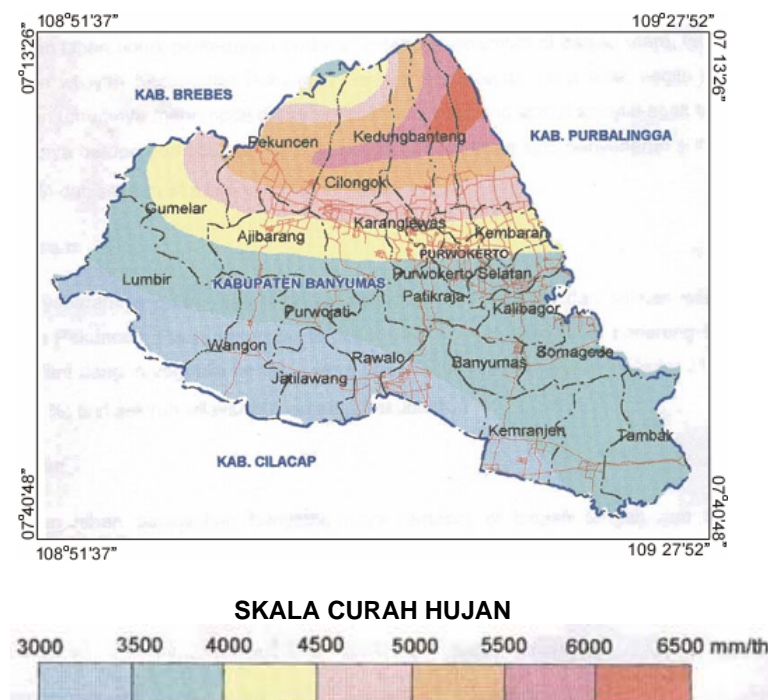
3.2.4. Struktur Geologi

Struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian berupa kelurusan-kelurusan yang berarah Tenggara–Barat Laut, seperti terlihat pada Gambar 3.3. Kenampakan bentang alam di daerah ini mencerminkan adanya struktur geologi tersebut. Penyebaran batuan yang terkekarkan cukup luas meliputi bagian tengah dan Selatan, terutama pada Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) yang berupa breksi vulkanik di bagian tengah daerah penelitian.



3.2.5. Curah Hujan

Curah hujan merupakan salah satu faktor pemicu eksternal yang utama pada proses terjadinya gerakan tanah, sehingga perlu untuk mengetahui besarnya intensitas curah hujan rata-rata bulanan di daerah penelitian. Berdasarkan peta curah hujan rata-rata tahunan Kabupaten Banyumas, besarnya intensitas curah hujan daerah Kecamatan Cilongok antara 3000–6000 mm/tahun, daerah yang mempunyai intensitas curah hujan terendah terdapat di sebelah Selatan antara 3000–3500 mm/tahun, seperti pada Gambar 3.4.



Sumber: Disairtamben Kabupaten Banyumas (2007)

GAMBAR 3.4
PETA CURAH HUJAN RATA-RATA TAHUNAN
KABUPATEN BANYUMAS

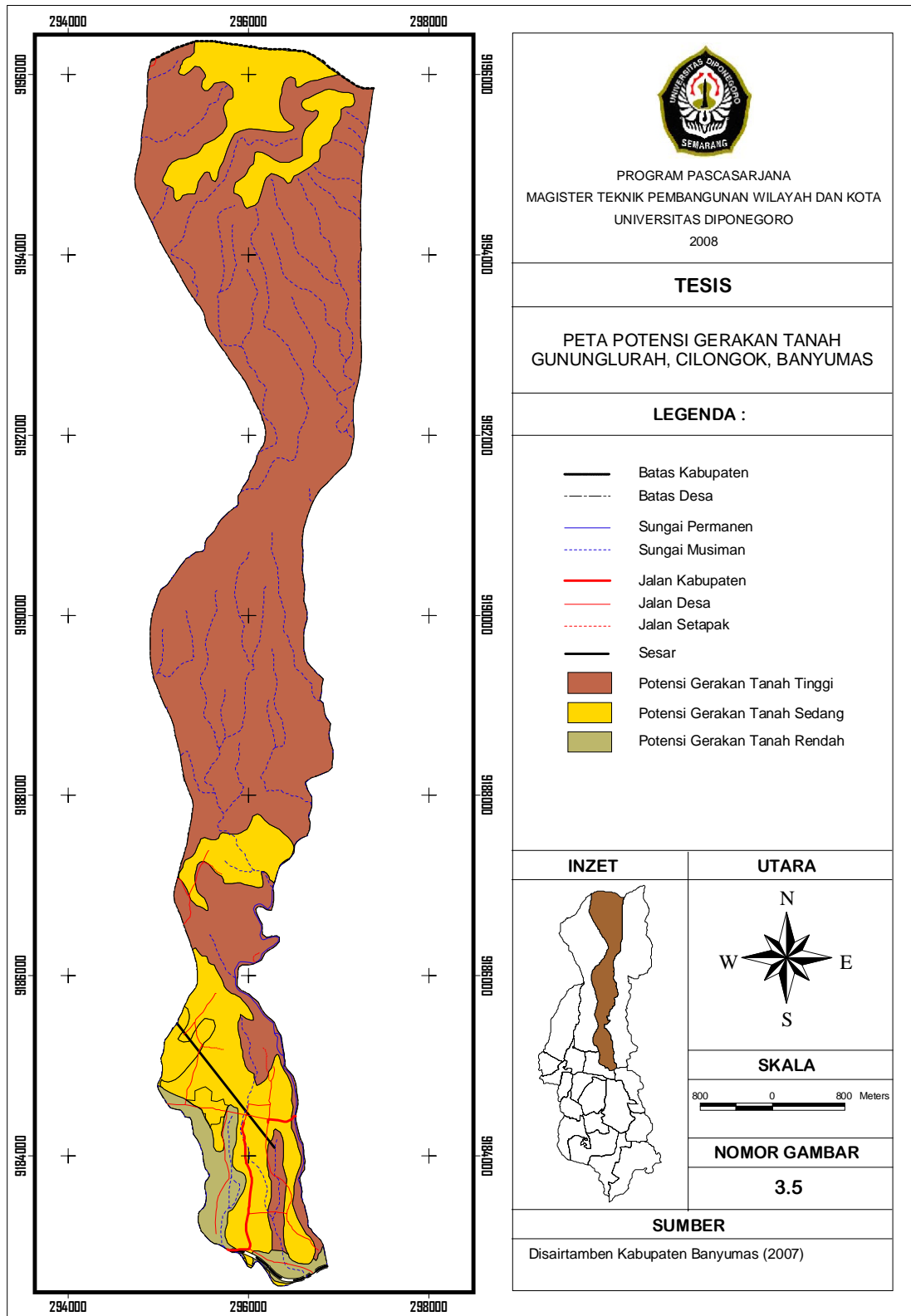
3.2.6. Hidrogeologi Umum

Kondisi hidrogeologi yang sangat berpengaruh pada bencana gerakan tanah adalah kondisi hidrogeologi lereng. Kondisi hidrogeologi lereng menyebabkan terganggunya kestabilan lereng dimana tekanan air dalam pori akan merenggangkan ikatan antar butir tanah sehingga daya dukung tanah akan menurun dan tanah akan bergerak (longsor). Daerah penelitian yang secara umum terletak pada lereng kaki gunungapi (Gunung Slamet) kondisi keairannya sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrogeologi lereng pada daerah tersebut.

Berdasarkan karakter lereng kawasan gunungapi kerucut (seperti Gunung Slamet) serta kondisi geologi batuan gunungapinya, maka kondisi akuifer daerah penelitian termasuk dalam kategori akuifer dengan produktif setempat-setempat. Akuifer penyusun pada daerah lereng kaki Gunungapi Slamet berupa akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer pada daerah ini produktif pada setempat muka air tanah sangat dalam, dan setempat-setempat terdapat mata air dengan debit kecil yang dapat diturap namun pada daerah lereng atas Gunung Slamet banyak pemunculan mataair dengan debit besar.

3.2.7. Potensi Gerakan Tanah

Potensi gerakan tanah yang ada di daerah penelitian didasarkan pada kondisi fisik alam yang ada, antara lain: kemiringan lereng, morfologi, batuan penyusun, struktur geologi yang ada serta kondisi keairan. Adapun potensi gerakan tanah di daerah penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) daerah potensi gerakan tanah seperti pada Gambar 3.5, yaitu:



- a. Potensi Gerakan Tanah Tinggi dengan luas areal 1.462,524 Ha (73,24%).
Sebagian besar daerah berpotensi gerakan tanah tinggi ini berada di bagian Utara sampai tengah daerah penelitian dan secara setempat dapat ditemui di bagian Selatan.
- b. Potensi Gerakan Tanah Sedang dengan luas areal 460,730 Ha atau 23,07%.
Sebagian besar daerah berpotensi gerakan tanah sedang ini berada di bagian Selatan daerah penelitian dan sebagian dijumpai di bagian tengah dan Utara.
- c. Potensi Gerakan Tanah Rendah dengan luas areal 73,714 Ha atau 3,69%.
Daerah berpotensi gerakan tanah rendah berada di bagian Selatan dari daerah penelitian.

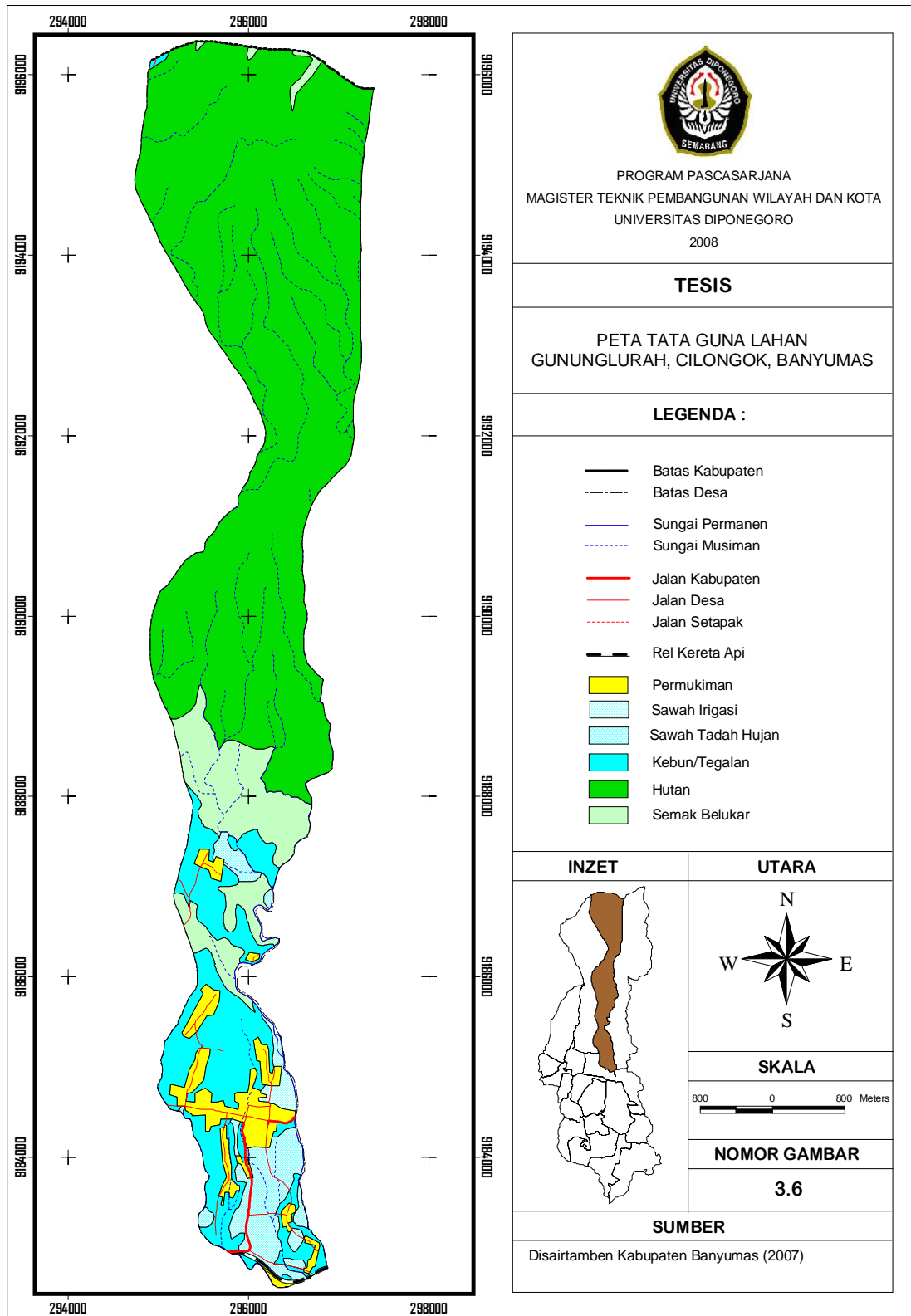
3.2.8. Tata Guna Lahan

Pemanfaatan lahan yang terjadi di daerah penelitian sangat bervariasi, seperti terlihat pada Tabel III.1 dan Gambar 3.6, yaitu:

TABEL III.1
PEMANFAATAN LAHAN
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

NO	JENIS LAHAN	LUAS (Ha)
1	Lahan Sawah	118,978
2	Bangunan/pekarangan	92,900
3	Kebun/Tegalan	252,885
4	Hutan Negara	1.334,305
5	Semak Belukar	188,255
6	Lain-lain	10,067
J u m l a h		1.997,390

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas (2007)



3.2.8.1. Permukiman

Pemanfaatan lahan untuk permukiman menyebar di bagian Selatan dari daerah penelitian dan sebagian kecil berada di bagian tengah daerah penelitian terutama terkonsentrasi di sepanjang jalan yang ada. Penyebaran pemanfaatan lahan ini seluas 92,90 Ha atau 4,65% dari luas Desa Gununglurah.

Pemanfaatan lahan ini menempati daerah-daerah dengan morfologi datar sampai landai dengan relief sedang, sedangkan di beberapa tempat menempati morfologi agak curam sampai curam dengan relief kasar seperti pada Gambar 3.7. Permukiman di Gununglurah sebagian besar berada di daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah sedang, sebagian lagi berada pada daerah dengan potensi gerakan tanah rendah dan tinggi.



Sumber: *Observasi lapangan (2008)*

3.2.8.2. Sawah

Pemanfaatan lahan untuk sawah menyebar di bagian Selatan dan secara setempat-setempat dapat ditemui di bagian tengah daerah penelitian. Penyebaran pemanfaatan lahan ini seluas 118,98 Ha atau 5,96% dari luas Desa Gununglurah.

Pemanfaatan lahan ini menempati daerah-daerah dengan morfologi datar sampai landai dengan relief sedang, sedangkan di beberapa tempat menempati morfologi agak curam dengan relief kasar seperti terlihat pada Gambar 3.8. Pemanfaatan lahan dalam bentuk sawah di Gununglurah sebagian besar berada di daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah sedang, sebagian lagi berada pada daerah dengan potensi gerakan tanah rendah dan tinggi.

3.2.8.3. Kebun

Pemanfaatan lahan untuk kebun menyebar di bagian Selatan sampai tengah dari daerah penelitian dengan jenis perkebunan karet, pinus, kelapa, sengon, mahoni dan jati. Penyebaran pemanfaatan lahan ini seluas 252,89 Ha atau 12,66% dari luas Desa Gununglurah.

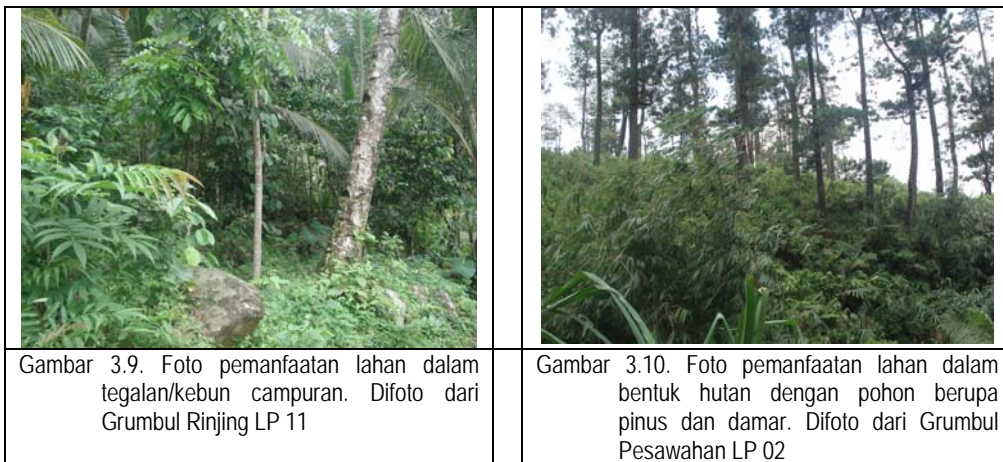
Pemanfaatan lahan ini menempati daerah dengan morfologi landai sampai agak curam dengan relief kasar, sedangkan di beberapa tempat menempati morfologi datar dengan relief sedang dan curam seperti terlihat pada Gambar 3.9. Kebun di Gununglurah sebagian besar berada di daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah sedang, sebagian lagi berada pada daerah dengan potensi gerakan tanah rendah dan tinggi.

3.2.8.4. Hutan

Pemanfaatan lahan untuk hutan terkonsentrasi di bagian Utara dengan vegetasi berupa pohon pinus dan damar sampai bagian tengah dari daerah penelitian dengan jenis pohon antara lain sengon, mahoni dan jati seperti terlihat pada Gambar 3.10. Penyebaran pemanfaatan lahan ini seluas 1.334,32 Ha atau

66,80% dari luas Desa Gununglurah.

Pemanfaatan lahan ini menempati daerah-daerah dengan morfologi curam sampai sangat curam dengan relief kasar, sedangkan di beberapa tempat menempati morfologi agak curam dengan relief kasar. Pemanfaatan lahan dalam bentuk hutan di Gununglurah sebagian besar berada di daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah tinggi, sebagian lagi berada pada daerah dengan potensi gerakan tanah sedang.



Sumber: *Observasi lapangan (2008)*

3.2.8.5. Semak Belukar

Lahan dalam bentuk semak belukar ini terkonsentrasi di bagian tengah dan sebagian kecil di Utara dari daerah penelitian. Penyebaran lahan ini seluas 188,255 Ha atau 9,43% dari luas Desa Gununglurah.

Semak belukar menempati daerah dengan morfologi agak curam sampai curam dengan relief kasar. Pemanfaatan lahan dalam bentuk semak belukar ini sebagian besar berada di daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah tinggi, sebagian lagi berada pada daerah dengan potensi gerakan tanah sedang.

3.3. Kondisi Sosial Ekonomi

Perkembangan wilayah di Kabupaten Banyumas khususnya perkotaan Purwokerto dan sekitarnya termasuk di dalamnya Kecamatan Cilongok, salah satunya dicirikan dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari masing-masing kecamatan. Berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disumbangkan oleh masing-masing kecamatan, Kecamatan Cilongok memberikan kontribusi prosentase terbesar kedua setelah Kecamatan Purwokerto Timur seperti terlihat pada Tabel III.2. Perkembangan wilayah di Kabupaten Banyumas yang cukup pesat dalam kurun waktu beberapa tahun ini menyebabkannya perkembangan nilai lahan yang ada menjadi tinggi karena untuk kegiatan ekonomi khususnya di wilayah perkotaan termasuk didalamnya perkotaan Cilongok.

Perkembangan wilayah perkotaan ini mempunyai dampak pada peningkatan kebutuhan lahan akan sarana permukiman karena hal itu merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Peningkatan kebutuhan akan sarana permukiman berdampak pada ketersediaan lahan untuk permukiman dan beraktivitas lainnya. Tingginya nilai lahan yang ada dan keterbatasan lahan yang tersedia pada daerah yang layak huni, menyebabkan kawasan yang memiliki kondisi kurang layak huni bahkan tidak layak huni dimanfaatkan oleh masyarakat di Gununglurah sebagai kawasan permukiman dan budidaya lainnya.

TABEL III.2
DISTRIBUSI PROSENTESE PDRB KABUPATEN BANYUMAS
PER KECAMATAN
MENURUT ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1	Lumbir	2,26	2,24	2,20	2,20	2,16
2	Wangon	5,41	5,38	5,36	5,29	5,26
3	Jatilawang	3,51	3,49	3,47	3,42	3,40
4	Rawalo	2,54	2,54	2,50	2,48	2,47
5	Kebasen	2,30	2,27	2,24	2,23	2,21
6	Kemranjen	2,54	2,53	2,52	2,49	2,48
7	Sumpiuh	2,69	2,68	2,66	2,64	2,63
8	Tambak	2,10	2,09	2,08	2,06	2,05
9	Somagede	2,31	2,30	2,28	2,25	2,25
10	Kalibagor	3,07	3,07	3,04	3,02	3,00
11	Banyumas	3,54	3,60	3,55	3,51	3,50
12	Patikraja	2,41	2,41	2,38	2,39	2,38
13	Purwojati	2,32	2,32	2,30	2,27	2,25
14	Ajibarang	5,89	5,87	5,86	5,83	5,83
15	Gumelar	1,67	1,67	1,65	1,64	1,62
16	Pekuncen	2,58	2,58	2,53	2,51	2,49
17	Cilongok	6,52	6,44	6,46	6,38	6,32
18	Karanglewas	2,72	2,75	2,72	2,70	2,68
19	Kedungbanteng	2,52	2,49	2,48	2,42	2,40
20	Baturaden	2,80	2,82	2,80	2,79	2,77
21	Sumbang	3,03	3,00	3,01	2,93	2,94
22	Kembaran	3,58	3,61	3,62	3,59	3,57
23	Sokaraja	4,97	4,96	5,00	5,00	5,00
24	Purwokerto Selatan	5,25	5,27	5,35	5,45	5,52
25	Purwokerto Barat	6,03	6,02	6,05	6,16	6,22
26	Purwokerto Timur	12,58	12,72	12,97	13,34	13,56
27	Purwokerto Utara	2,86	2,88	2,92	3,01	3,04
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Banyumas (2007)

Perkembangan perekonomian di Kecamatan Cilongok termasuk cukup tinggi berpengaruh terhadap perkembangan penduduk yang ada di Kecamatan Cilongok khususnya di dalam perkotaan Cilongok. Kondisi sosial masyarakat dapat diukur dengan mengetahui jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat. Perkembangan suatu wilayah sangat dimungkinkan akan dapat berpengaruh terhadap perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah tersebut, namun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di Gununglurah tidak signifikan dengan kondisi ekonomi wilayah Kecamatan Cilongok. Adapun kondisi sosial masyarakat terlihat pada Tabel III.3, III.4 dan III.5.

TABEL III.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN
JENIS KELAMIN DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

KELOMPOK UMUR (Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
0 – 4	243	212	455
5 – 9	293	394	687
10 – 14	291	303	594
15 – 19	285	308	593
20 – 24	293	376	669
25 – 29	273	297	570
30 – 34	321	332	653
35 – 39	366	374	740
40 – 44	311	292	603
45 – 49	307	234	541
50 – 54	296	247	543
55 – 59	233	213	446
> 60	180	88	268
Jumlah	3.692	3.670	7.362

Sumber: Desa Gununglurah (2007)

Pertumbuhan penduduk rata-rata di Kecamatan Cilongok selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas. Pertumbuhan rata-rata penduduk di Kecamatan Cilongok pada tahun 1990-2000 berdasarkan buku revisi RTRW Kabupaten Banyumas didapat data sebesar 1,16%, lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata Kabupaten Banyumas yang hanya sebesar 0,96%. Sedangkan antara tahun 2000–2007 pertumbuhan rata-rata penduduk di Kecamatan Cilongok sebesar 0,75%, lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata di Kabupaten Banyumas yang hanya sebesar 0,46%.

TABEL III.4
JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Petani	667
2	Buruh Tani	913
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	129
5	Buruh Industri	259
6	Buruh Bangunan	188
7	Pedagangan	137
8	Pengangkutan	53
9	PNS	30
10	TNI/POLRI	3
11	BUMN/BUMD	4
12	Pensiunan	11
13	Penggalian	-
14	Jasa Sosial	51
15	Lain-lain	194
J u m l a h		2.639

Sumber: Desa Gununglurah (2007)

TABEL III.5
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tamat PT / Akademi	87
2	Tamat SLTA	557
3	Tamat SLTP	877
4	Tamat SD	2.561
5	Belum Tamat SD	1.736
6	Tidak Tamat SD	1.544
Jumlah		7.362

Sumber: Desa Gununglurah (2007)

3.4. Kejadian Gerakan Tanah

Kejadian bencana tanah longsor menyebar secara setempat-setempat dengan dimensi yang tidak begitu besar. Berdasar laporan dari Camat Cilongok maupun Kepala Desa Gununglurah yang diterima oleh Disairtamben Kabupaten Banyumas dan dilakukan pengamatan langsung di lokasi yang mengalami tanah longsor di daerah penelitian, seperti pada Gambar 3.11, 3.12, 3.13 dan Tabel III.6.

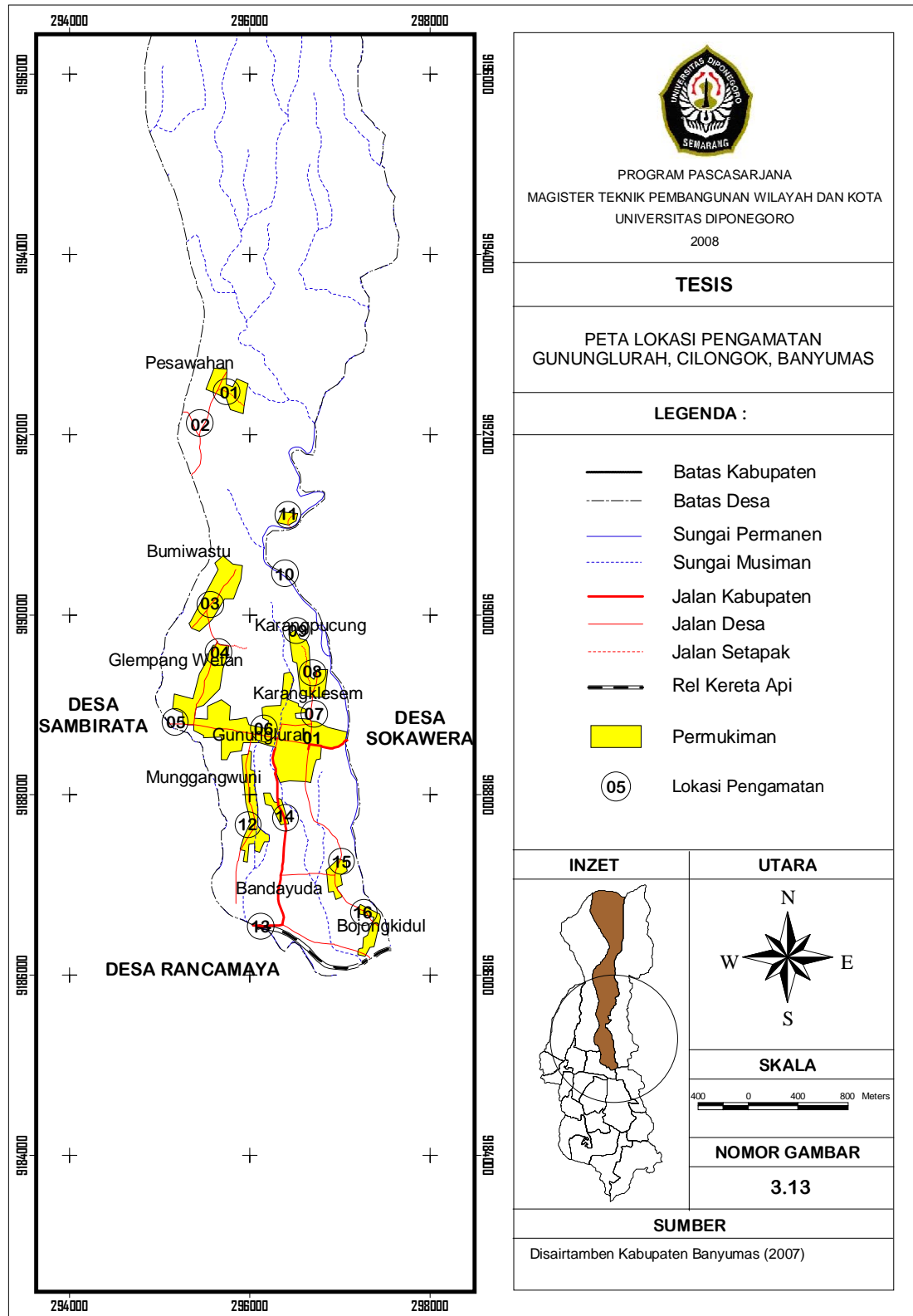


Sumber: Dokumen Disairtamben Kabupaten Banyumas (2008)

TABEL III.6
KEJADIAN GERAKAN TANAH 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

Waktu Kejadian	Wilayah		Lokasi Pengamatan	Kerugian	Zona Potensi Gerakan Tanah
	Grumbul	RT / RW			
1	2	3		5	6
3 Nop 04	Bandayuda	06 / VII	LP 13	Jembatan Kali Pager runtuh	Potensi Gerakan Tanah Menengah
2 Nop 05	Karangpucung	02 / II	LP 09	Jembatan Kali Banyon runtuh	Potensi Gerakan Tanah Tinggi
2 Nop 05	Trenggisi	04 / VI	LP 05	Jembatan Kali Klapa ambrol	Potensi Gerakan Tanah Menengah
1 Des 06	Karangkesem	04 / I	LP 07	Saluran Irigasi rusak 25 m	Potensi Gerakan Tanah Menengah
1 Des 06	Karangpucung	03 / II	LP 08	Tiang listrik, masjid, beberapa rumah terancam	Potensi Gerakan Tanah Tinggi
25 Okt 07	Karangpucung	05 / II	LP 08	1 rumah retak dan 1 rumah terancam	Potensi Gerakan Tanah Tinggi
28 Okt 07	Bandayuda	03 / X	LP 14	3 rumah retak dan mengancam 15 rumah	Potensi Gerakan Tanah Menengah
2 Nop 07	Munggangwuni	06 / VI	LP 12	1 rumah retak	Potensi Gerakan Tanah Menengah
3 Nop 07	Karangpucung	01 / II	LP 09	1 rumah roboh, 1 rumah retak dan 1 rumah terancam	Potensi Gerakan Tanah Tinggi
2 Apr 08	Dukuhwuluh	03 / II	LP 08	3 rumah retak-retak dan beberapa rumah terancam	Potensi Gerakan Tanah Tinggi
2 Apr 08	Bojongkidul	03 / X	LP 16	1 masjid retak-retak	Potensi Gerakan Tanah Menengah

Sumber: Penulis (2008), diolah dari Disairtamben (2007) dan Desa Gununglurah (2008)



Bencana alam tanah longsor terjadi hampir setiap tahun di daerah penelitian, khususnya terjadi pada saat musim penghujan, baik pada awal musim, pertengahan musim ataupun di akhir musim penghujan. Disamping karena kondisi fisik alam yang mempunyai potensi terhadap tanah longsor, kejadian tersebut dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan yang ada di daerah penelitian seperti terlihat pada Tabel III.7.

TABEL III.7
BANYAKNYA CURAH HUJAN (mm) TIAP BULAN
DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

NO	BULAN	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	359	582	501	125	257
2	Februari	414	222	388	464	329
3	Maret	427	409	307	365	371
4	April	145	373	239	303	299
5	Mei	136	109	225	200	15
6	Juni	29	224	53	104	81
7	Juli	149	45	17	13	-
8	Agustus	1	-	-	-	-
9	September	40	160	-	-	
10	Oktober	225	863	10	148	
11	Nopember	1.432	1.013	220	480	
12	Desember	770	312	547	405	
	JUMLAH	4.127	4.312	2.507	2.607	1.352

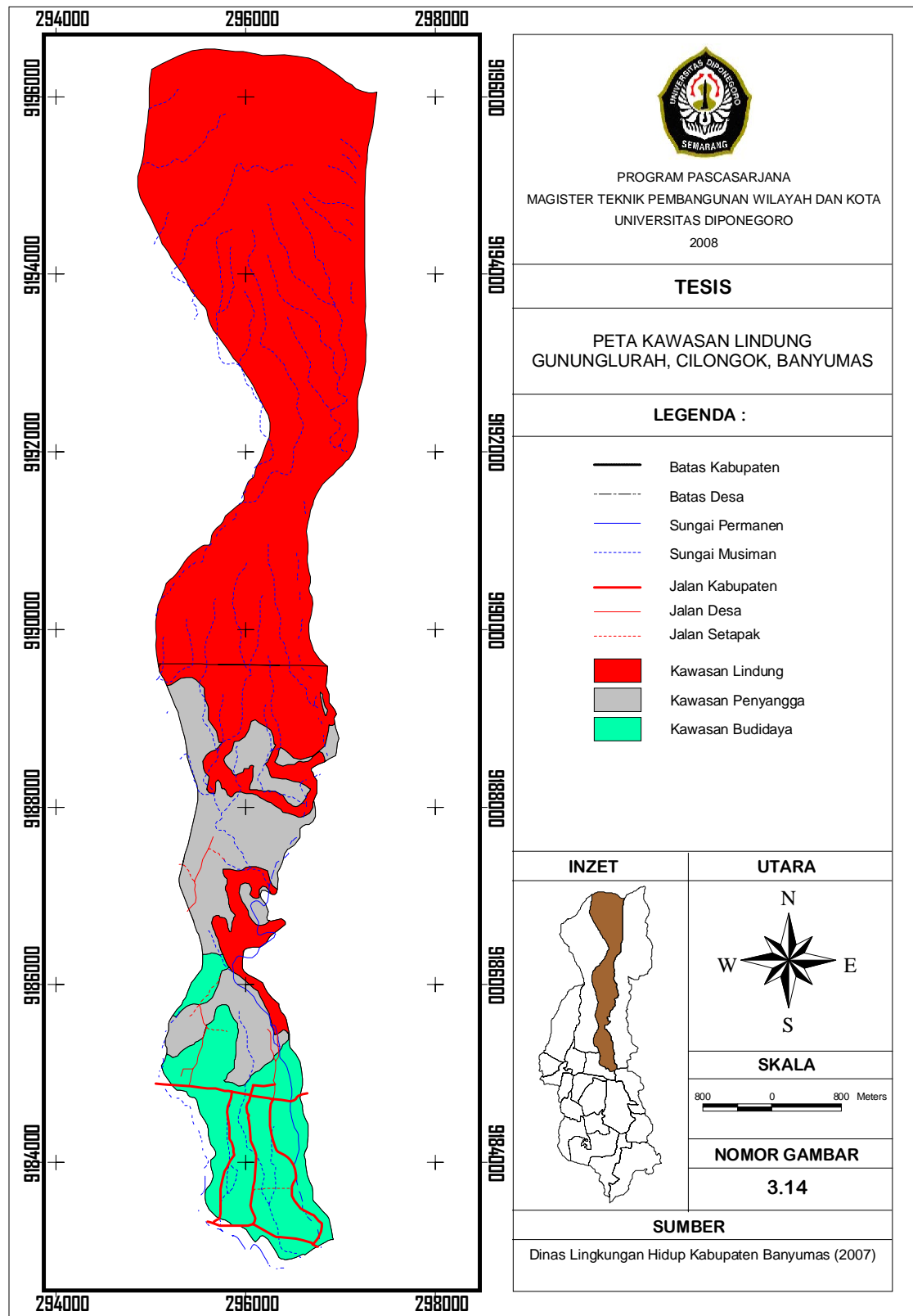
Sumber: Disairtamben Kabupaten Banyumas (2008)

3.5. Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas (2005-2015) sudah berupaya melaksanakan penataan ruang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

dengan membatasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana terhadap kawasan budidaya khususnya permukiman. Di dalam RTRW Kabupaten Banyumas yang telah disusun menyatakan bahwa daerah rawan bencana dimanfaatkan sebagai kawasan fungsi lindung seperti terlihat pada Gambar 3.14. Namun ternyata, masih adanya pemanfaatan lahan di daerah rawan gerakan tanah dan pemerintah daerah belum dapat menerapkan kebijakan tersebut secara optimal, dikarenakan sebagian besar penduduk diindikasikan sudah lama bermukim di daerah rawan bencana bahkan sudah ada yang turun-temurun. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana gerakan tanah.

Pengendalian pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas 2005-2015. Sedangkan khusus di daerah ibukota kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Ibukota Kecamatan Cilongok. Sedangkan Gununglurah berada diluar ibukota Kecamatan Cilongok sehingga pengaturan penataan ruang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas. Peraturan tersebut merupakan arahan dalam pengembangan wilayah karena didalamnya terdapat pembagian fungsi pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kemampuan daya dukung lahan sehingga akibat negatif dari suatu pembangunan dapat diminimalisir.



Selain kedua produk hukum tersebut diatas, pemerintah daerah juga melaksanakan pengendalian pemanfaatan lahan dengan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 1992 tentang Bangunan. Selain perencanaan penataan ruang, untuk mendapatkan IMB maka harus dilengkapi dengan syarat-syarat teknis bangunan seperti kekuatan dan struktur bangunan, keamanan bangunan, dan lain-lain. Dengan demikian dengan diterbitkannya IMB diharapkan semua bangunan yang akan dibangun dapat menyesuaikan dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan, sehingga pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat dikendalikan dan dihindarkan dari kerusakan baik yang disebabkan oleh bencana alam ataupun dari ulah manusia.

BAB IV

ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN PADA DAERAH RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

Pada bagian bab ini dipaparkan analisis sebagai hasil deskripsi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di depan. Berbagai macam data dan informasi berupa kondisi fisik, kebijakan penataan ruang, kapasitas dan kerentanan masyarakat serta penyebab pemanfaatan lahan di lokasi penelitian direkam dan diinterpretasikan dalam rangka menyusun analisis melalui studi pustaka, wawancara dan observasi lapangan.

Analisis data atau informasi telah dilakukan sejak awal data diperoleh. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan direduksi untuk didapatkan bahan analisis yang kemudian disesuaikan dengan tema penelitian yang telah ditetapkan. Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi atas data yang telah didapat tersebut. Proses tersebut selanjutnya dituangkan kembali dalam bentuk tulisan penelitian yang didasarkan pokok bahasan yang telah dilakukan analisis dalam kerangka yang bersifat sementara, Miles and Huberman (1992).

Pembahasan dalam bentuk paparan tidak hanya mendeskripsikan temuan lapangan apa adanya tetapi telah disusun dalam bentuk kerangka penulisan yang diarahkan dan dikaitkan dengan data lainnya secara sistematis. Hasil analisis yang bersifat sementara tersebut diupayakan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

4.1 Analisis Karakteristik Fisik Desa Gununglurah

Berdasarkan identifikasi karakteristik fisik alam di Gununglurah yang diperoleh dari data sekunder dan observasi lapangan, maka didapat diketahui potensi gerakan tanah yang ada di Gununglurah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.1, berikut ini.

TABEL IV.1
POTENSI GERAKAN TANAH
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

NO	VARIABEL PENELITIAN	KONDISI	KETERANGAN	POTENSI
1	2	3	4	5
1	Kelerengan			
	0 – 8 %	Dataran dengan luas 59,64 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan sangat intensif; ➢ Tidak peka terhadap erosi; ➢ Sedimentasi tinggi 	Gerakan Tanah Rendah – Sedang
	8 – 15 %	Relief halus dengan luas 265,45 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan intensif; ➢ Kurang peka terhadap erosi; ➢ Sedimentasi cukup tinggi 	Gerakan Tanah Sedang
	15 – 25 %	Agak curam Relief sedang dengan luas 528,76 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan cukup intensif; ➢ Agak peka terhadap erosi; ➢ Sedimentasi sedang 	Gerakan Tanah Sedang – Tinggi
	25 – 45 %	Relief Kasar dengan luas 578,76 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan cukup intensif; ➢ Peka terhadap erosi; ➢ Sedimentasi sedang 	Gerakan Tanah Tinggi
	> 45 %	Relief sangat kasar dengan luas 562,63 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan cukup intensif; ➢ Sangat peka terhadap erosi; ➢ Sedimentasi rendah 	Gerakan Tanah Tinggi
2	Batuan / Tanah Penyusun			
	Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs)	Breksi gunungapi, tufa dan lapisan lava dengan luas 1.950,64 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan cukup intensif; ➢ Sangat peka terhadap erosi 	Gerakan Tanah Sedang – Tinggi
	Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls)	Lahar dibagian atas dan lapisan lava dibagian bawah dengan luas 46,76 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan sangat intensif; ➢ Peka terhadap erosi 	Gerakan Tanah Sedang
3	Intensitas Curah Hujan			
	4000 – 6000 mm/Tahun	Sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelapukan dan erosi tinggi; ➢ Pemicu gerakan tanah 	Gerakan Tanah Tinggi

Sumber: Disairtamben (2007) dan hasil analisis (2008)

Analisis karakteristik fisik alam dan faktor pemicu terjadinya gerakan tanah di Gununglurah, terdiri dari:

- Analisis karakteristik fisik berdasarkan kelerengan yang meliputi tingkat kemiringan, pelapukan, kepekaan terhadap erosi dan sedimentasi yang terjadi di daerah penelitian. Berdasarkan identifikasi karakteristik fisik, tersusun secara variatif kelerengan antara 0% sampai 8% pada bagian Selatan sampai dengan kelerengan lebih dari 45% pada bagian Utara seperti terlihat pada Gambar 4.1 dan 4.2. Tingkat pelapukan dari kelerengan yang ada, tersusun atas kelerengan dengan pelapukan cukup intensif pada bagian Utara dan kelerengan dengan pelapukan sangat intensif di bagian Selatan desa. Tingkat kepekaan kelerengan terhadap erosi tersusun atas kelerengan tidak peka terhadap erosi pada kelerengan rendah sampai kondisi kelerengan sangat peka terhadap erosi pada kelerengan yang tinggi. Adapun dari tingkat sedimentasi terdiri dari daerah dengan tingkat sedimentasi tinggi pada bagian kelerengan rendah dan tingkat sedimentasi rendah pada bagian kelerengan yang tinggi.



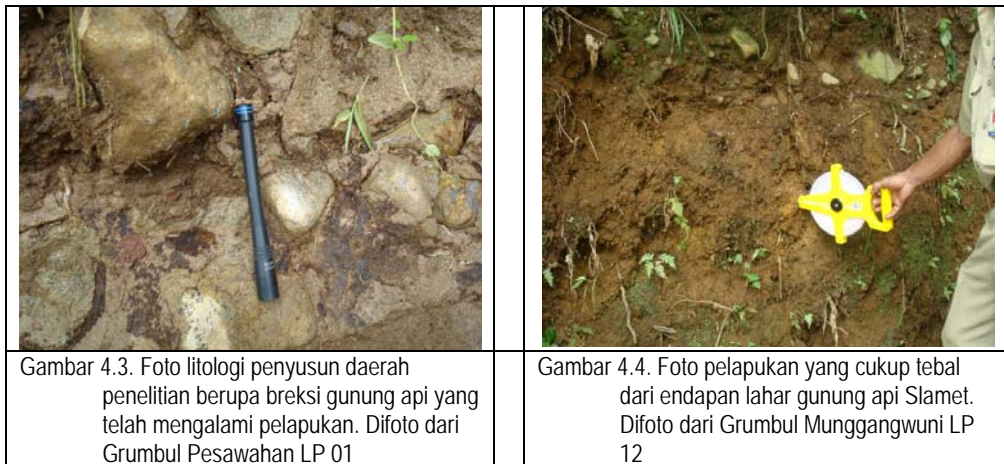
Sumber: *Observasi lapangan (2008)*

- Analisis karakteristik fisik berdasarkan batuan atau tanah penyusun yang ada di Desa Gununglurah meliputi tingkat pelapukan batuan dan tingkat kepekaan tanah penyusun terhadap erosi yang terjadi. Berdasarkan identifikasi karakteristik fisik yang ada di daerah penelitian, tanah penyusun terdiri dari Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) pada bagian Utara desa dengan kondisi tingkat pelapukan batuan cukup intensif dan tanah penyusun sangat peka terhadap erosi serta Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls) pada bagian Selatan dengan kondisi tingkat pelapukan batuan sangat intensif dan tanah penyusun yang peka terhadap erosi.
- Analisis karakteristik fisik berdasarkan intensitas curah hujan yang ada di Gununglurah termasuk sangat tinggi yaitu mencapai 4000–6000 mm/tahun. Tingginya intensitas curah hujan akan meningkatkan pelapukan batuan dan erosi pada tanah penyusun daerah. Selain hal tersebut diatas, intensitas curah hujan yang tinggi akan meningkatkan kejenuhan air tanah dan melemahkan ikatan antar partikel tanah yang akan dapat memicu terjadinya gerakan tanah.

Secara spesifik kondisi fisik alam yang berupa kelerengan, satuan batuan atau tanah yang menjadi penyusun daerah penelitian dan intensitas curah hujan yang menjadi variabel pada kejadian tanah longsor.

”Kondisi fisik alam yang ada di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, mulai dari cekungan di bagian Tenggara sampai pegunungan di bagian Utara. Sedangkan dari batuan penyusunnya, wilayah Banyumas tersusun atas litologi dari Formasi Rambatan (**Tmr**), Formasi Halang (**Tmph**), Formasi Tapak (**Tpt**), Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (**Qvs**) dan Endapan Lahar Gunungapi Slamet (**Qls**). Desa Gununglurah secara fisik tersusun atas pegunungan sampai dengan kaki pegunungan dengan relief sedang sampai kasar. Litologi yang ada berupa Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (**Qvs**) yang tersusun atas breksi gunungapi, tufa dan lapisan lava serta Endapan Lahar Gunungapi Slamet (**Qls**) yang tersusun atas perlapisan lahar dan lava. Secara umum litologi tersebut cukup resisten dalam keadaan *fresh* (segar), namun karena curah hujan sangat tinggi yaitu rata-rata diatas 4000 mm/tahun, maka tingkat pelapukan disana cukup tinggi sehingga tufa dan endapan lahar menjadi lemah, lapuk sampai dengan sekitar 10 m dan sangat berpotensi untuk terjadinya gerakan tanah. Curah hujan yang tinggi

dan adanya aktivitas masyarakat yang memotong lereng untuk kepentingan budidaya khususnya permukiman dan pengolahan sawah akan menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani sebagian berupa pinus dan damar”, (KFL.W.04.07).



Sumber: Dokumentasi Disairtamben Kabupaten Banyumas (2008)

Kejadian tanah longsor yang ada di Desa Gununglurah, hampir setiap tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. Tanah longsor terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan walaupun dengan dimensi yang tidak besar.

“Berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi, frekuensi kejadian tanah longsor di Desa Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini. Kejadian tanah longsor terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan walaupun dimensinya tidak begitu besar. Namun Alhamdulillah sampai saat ini bencana tanah longsor tersebut tidak menelan korban jiwa”, (KFL.W.06.09).

Tingginya intensitas curah hujan yang ada di daerah penelitian akan mempertinggi tingkat kejenuhan air tanah dan mempercepat proses pelapukan batuan penyusun daerah penelitian yang terdiri dari Batuan Gunung Slamet Tak Teruraikan (Qvs) dan Endapan Lahan Gunung Slamet (Qls) sehingga resistensi batuan penyusun akan menjadi lemah dan secara fisik akan berubah menjadi tanah dengan kondisi ikatan antar partikel menjadi lemah. Seiring dengan perjalanan

waktu, tanah hasil pelapukan batuan menjadi semakin tebal. Akumulasi tanah yang berada pada lahan dengan kelerengan tinggi akan mengalami proses erosi sehingga ketebalannya menjadi kecil sedangkan pada lahan dengan kelerengan rendah proses erosi tidak berjalan dengan intensif sehingga tanah hasil pelapukan batuan terlihat tebal. Selain proses erosi tidak berjalan dengan intensif, lahan dengan kelerengan rendah mengalami proses sedimentasi yang cukup tinggi hasil dari rombakan batuan yang ada di kelerengan tinggi. Besarnya akumulasi tanah hasil pelapukan batuan penyusun daerah penelitian akan sangat membahayakan jika terganggu keseimbangannya dan menjadikan daerah penelitian menjadi daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah cukup tinggi.

Selain hal tersebut diatas, kejadian bencana tanah longsor juga dipicu oleh aktivitas masyarakat. Sebagian masyarakat menyadari kondisi daerah yang dibudidayakan merupakan daerah yang rawan bencana tanah longsor, namun beberapa dari mereka masih melakukan aktivitas yang dapat memicu kejadian tanah longsor seperti bermukim di kawasan fungsi lindung, memotong lereng, mengolah sawah dan memelihara kolam dan kegiatan *repek* (memotong ranting pohon) di hutan yang semakin mengkhawatirkan seperti pada Gambar 4.5 dan 4.6.

“Sebagian besar di daerah ini berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik perhutani di beberapa tempat yang lain ada pemanfaatan sebagai sawah dan kolam ikan. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena sudah turun temurun dan keterbatasan lahan yang dimiliki”, (TSE.W.10.04).

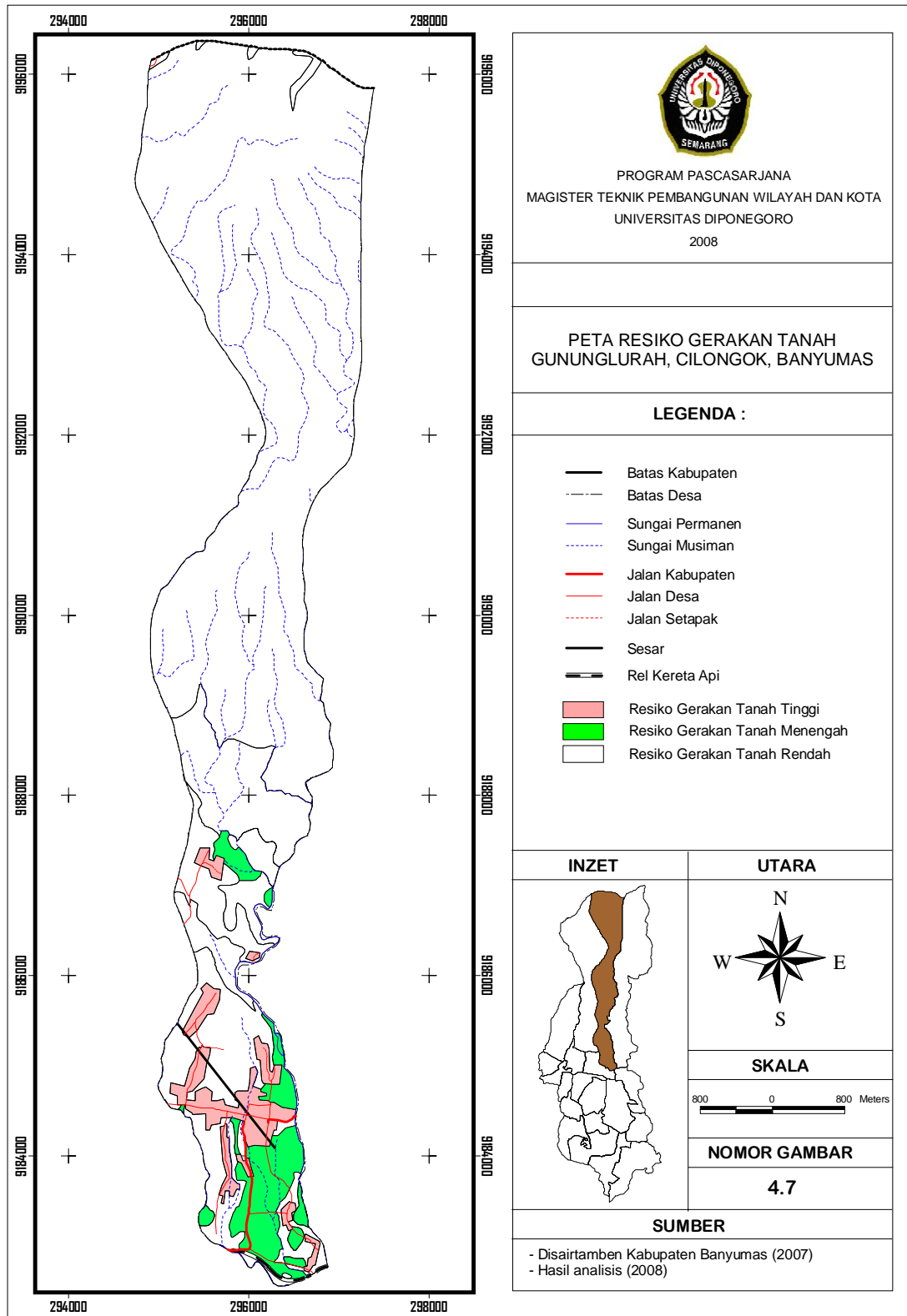
“Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah yang rawan terhadap tanah longsor sehingga warga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti *repek* (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung”, (PKL.W.05.08).



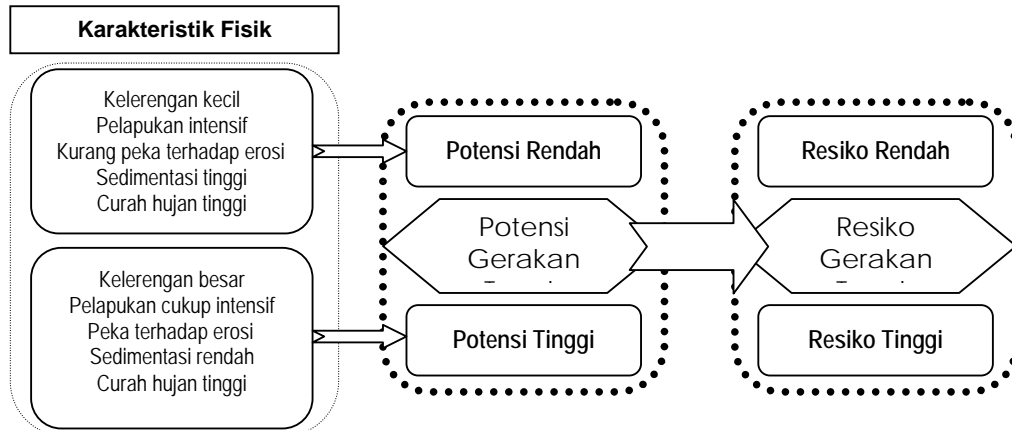
Sumber: *Observasi lapangan (2008)*

Berdasarkan kondisi fisik yang berupa tingkat kelerengan, kondisi batuan atau tanah penyusun dan intensitas curah hujan di atas, daerah penelitian mempunyai beberapa tingkat potensi terhadap gerakan tanah, yaitu potensi gerakan tanah tinggi, potensi gerakan tanah sedang dan potensi gerakan tanah rendah. Aktivitas masyarakat dalam bentuk pengolahan sawah dan budidaya kolam ikan akan meningkatkan kejenuhan air tanah. Aktivitas masyarakat dalam bentuk pemotongan lereng dan penebangan pohon akan mengurangi kemantapan lereng dan aktivitas masyarakat dalam bentuk permukiman akan menambah beban tanah pada daerah penelitian.

Aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang tidak mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan pada daerah penelitian yang mempunyai potensi gerakan tanah akan menjadikan daerah penelitian mempunyai resiko gerakan tanah. Hasil analisis tersebut diatas sesuai dengan teori dari Karnawati (2003), Sujoko (2003) dan Paimin (2005). Tingkat resiko gerakan tanah pada daerah penelitian terlihat seperti pada Gambar 4.7.



Pengaruh karakteristik fisik alam disajikan secara lengkap seperti terlihat pada Gambar 4.8 dibawah ini.



Sumber: Hasil analisis (2008)

GAMBAR 4.8
PENGARUH KARAKTERISTIK FISIK
TERHADAP POTENSI GERAKAN TANAH

4.2 Analisis Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat Di Gununglurah

Berdasarkan identifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat Desa Gununglurah yang diperoleh dari data sekunder dan wawancara, maka dapat diketahui kapasitas dan kerentanan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana tanah longsor yang akan terjadi di daerah penelitian. Tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat meliputi aspek kependudukan, sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan dan tingkat aksesibilitas masyarakat di Desa Gununglurah.

4.2.1. Kependudukan

Analisis kependudukan, dilihat berdasarkan kuantitas, kualitas, dan perwujudan ruang sebagai bentuk manifestasi dari karakteristik kualitas dan kuantitas penduduk. Permasalahan kependudukan, menjadi sangat penting dalam

suatu rencana tata ruang karena pada dasarnya penataan ruang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk secara berkelanjutan. Disisi lain, masalah kependudukan juga dapat menjadi faktor penyebab utama munculnya persoalan pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan hidup. Masalah kependudukan tersebut secara garis besar meliputi: jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur serta kepadatan penduduk.

Penduduk di Desa Gununglurah yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, 10 (sepuluh) RW dan 55 (limapuluh lima) RT berjumlah 7.362 jiwa terdiri atas 3.692 laki-laki dan 3.670 perempuan dengan 1.996 jumlah Kepala Keluarga. Jumlah penduduk di Desa Gununglurah terbagi dalam 66,72% sebagai usia produktif dan 33,28% sebagai usia tidak produktif. Adapun kepadatan penduduk terhadap luas lahan efektif adalah 4 jiwa/ha, sedangkan tingkat kepadatan penduduk terhadap luas lahan terbangun adalah 79 jiwa/ha. Kepadatan penduduk terhadap lahan terbangun tersebut cukup padat, sedangkan untuk kepadatan penduduk terhadap lahan efektif termasuk sangat rendah karena sebagian besar dari lahan yang ada di Desa Gununglurah berupa hutan negara.

Berdasarkan komposisi kependudukan tersebut didapat gambaran bahwa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat yang bermukim di daerah penelitian, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya usia produktif maka akan banyak pula masyarakat yang dapat menanggung jumlah usia non produktif serta tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi akan dapat lebih mudah interaksi sosial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Banyumas, kebutuhan lahan yang layak untuk aktivitas penduduk perdesaan adalah 0,3 hektar per kapita. Kepadatan di daerah penelitian yang cukup tinggi yaitu 79 jiwa per hektar akan menjadikan tingkat kerentanan masyarakat menjadi tinggi karena masyarakat tidak mempunyai lahan yang cukup luas untuk mengelola lahan dengan tanaman keras sebagai upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap gerakan tanah.

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Analisis pendidikan, dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat diselesaikan oleh sejumlah penduduk di Desa Gununglurah. Permasalahan pendidikan, menjadi sangat penting sebagai salah satu faktor untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap tingkat kerawanan terhadap bencana tanah longsor di daerah penelitian sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kapasitas masyarakat. Masalah pendidikan tersebut secara garis besar meliputi tingkat pendidikan yang dapat diselesaikan oleh sejumlah penduduk di daerah penelitian.

Berdasarkan informasi yang diterima, sebagian besar masyarakat yang tinggal di Desa Gununglurah hanya dapat menyelesaikan pada tingkat pendidikan dasar. Sebagian kecil dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah baik tingkat pertama ataupun atas dan selebihnya dapat menamatkan pendidikan di akademi/perguruan tinggi.

“Tingkat pendidikan masyarakat Gununglurah masih cukup memprihatinkan, sebagian besar hanya tamat SD dan tidak tamat SD, selebihnya lulusan sekolah menengah dan sebagian kecil dapat menyelesaikan pendidikan tinggi”, (TSE.W.12.01).

Berdasarkan jumlah penduduk di daerah penelitian, berdasarkan data sekunder dalam RPJM Desa Gununglurah didapat persentase tingkat pendidikan

penduduk yang tidak dan belum tamat SD adalah sebesar 44,55%, tamat SD sebesar 34,79%, tamat sekolah menengah sebesar 19,48% dan selebihnya sebesar 1,18% merupakan tamatan akademi atau perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat di daerah penelitian yang masih relatif dimungkinkan akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan alam yang ada, sehingga dimungkinkan aktivitas masyarakat yang dilakukan tidak dikaitkan langsung dengan upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat akan menjadikan daya saing dalam mencari pekerjaan lebih kecil sehingga mata pencaharian yang dilakukan sebagian besar masyarakat berupa pekerjaan yang tidak diperlukan membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi.

Orang terdidik umumnya mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, informasi yang lebih banyak, sehingga mudah menerima informasi dan inovasi baru. Karena itu, kaum terdidik akan lebih mudah menyesuaikan perubahan-perubahan sosial yang dialami, Ibrahim (2003). Tingkat pendidikan yang dapat diselesaikan oleh sebagian besar masyarakat akan mempengaruhi tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat di daerah penelitian. Banyaknya penduduk yang hanya dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar mengakibatkan tingkat kapasitas masyarakat menjadi rendah dan tingkat kerentanan masyarakat menjadi tinggi. Melihat hal tersebut perlu adanya upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya pendidikan non formal.

4.2.3. Mata Pencaharian

Analisis mata pencaharian, didasarkan pada jenis mata pencaharian yang

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat setempat guna dapat menghidupi keluarganya. Permasalahan mata pencaharian, menjadi sangat penting dalam suatu pemanfaatan lahan karena pada dasarnya pemanfaatan lahan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk secara berkesinambungan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat. Masalah mata pencaharian tersebut secara garis besar meliputi jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat untuk dapat menghidupi keluarganya.

Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah penelitian yang berupa pegunungan dan lereng gunung. Kondisi tanah yang berasal dari aktivitas gunung api yang subur karena berada di lereng pegunungan dan ketersediaan air yang cukup akan menjadi pendorong masyarakat untuk beraktivitas mengolah sawah dan kolam selain penderes kelapa sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu profesi sebagai petani dan buruh tani dirasakan tidak terlalu membutuhkan tingkat pendidikan tinggi, sehingga sebagian besar masyarakat di daerah penelitian yang mempunyai tingkat pendidikan rendah mempunyai mata pencaharian utama di sektor pertanian sebagai petani dan buruh tani.

Profesi sebagai petani dan buruh tani ini sebesar 59,87% dan lebih didominasi oleh kaum laki-laki. 18,95% masyarakat bekerja sebagai buruh industri dan bangunan, 10,08% profesi sebagai wiraswasta dalam bentuk pengusaha dan pedagang, selebihnya sebesar 11,10% bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD, jasa sosial, pensiunan dan lain-lain.

“Pekerjaan masyarakat disini sebagian besar adalah buruh, yaitu buruh tani dan buruh penderes kelapa dan sebagian lagi mengolah kebun/tegalan. Pendapatan mereka masih rendah dan belum dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari”, (TSE.W.11.02).

Berdasarkan kondisi mata pencaharian tersebut didapat gambaran bahwa mata pencaharian merupakan salah satu faktor dapat mempengaruhi tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat di daerah penelitian. Banyaknya penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh tani akan semakin intensif mengolah lahan sawah dan budidaya kolam ikan yang ada bahkan sangat dimungkinkan mereka melakukan ekstensifikasi pertanian ke lahan yang seharusnya menjadi kawasan lindung, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan tingkat kerentanan masyarakat menjadi lebih tinggi.

4.2.4. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat di daerah penelitian dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian yang menjadi sumber penghidupan mereka. Mata pencaharian penduduk setempat sebagai besar adalah petani dan buruh tani dengan pendapatan yang diterimanya kecil. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat setempat, didapatkan data bahwa pendapatan rata-rata masyarakat setempat per hari masih rendah dan tidak menentu.

“Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Berkaitan dengan pendapatan dari 1996 KK yang ada, sekitar 52% masyarakat di Desa Gununglurah termasuk keluarga pra sejahtera dan 18% keluarga sejahtera 1, selebihnya yaitu 30% termasuk keluarga sejahtera 2”, (TSE.W.07.02).

Guna mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga selain pekerjaan utama sebagai buruh tani tersebut sebagian masyarakat

mencari tambahan penghasilan saat tenaga mereka tidak dibutuhkan yakni dengan menjadi buruh bangunan di kota. Adapun kaum perempuan lebih banyak di rumah mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari sambil membantu kepala keluarga dengan *repek* (memotong ranting kayu) di hutan untuk keperluan kayu bakar. Kebutuhan akan kayu kering sebagai bahan bakar industri gula kelapa di kota cukup tinggi, sehingga sebagian masyarakat melakukan aktivitas yang tidak menjaga lingkungan dengan menebang batang kayu guna pemenuhan kebutuhan keluarga seperti terlihat pada Gambar 4.6 di depan.

Banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah mengakibatkan kapasitas masyarakat menjadi rendah. Selain itu, kebutuhan akan kayu kering untuk bahan bakar akan mengintensifkan masyarakat melakukan *repek* di kawasan hutan sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal ini mengakibatkan tingkat kerentanan masyarakat menjadi tinggi. Mengingat hal tersebut diatas perlu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya dengan tidak mengganggu keseimbangan alam seperti kelompok arisan simpan pinjam, kelompok tani hutan, kelompok kerajinan dan sebagainya, Mubyarto (1994).

4.2.5. Tingkat Sosial Kemasyarakatan

Analisis sosial kemasyarakatan, dilihat dari tingkat sosial masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari maupun dalam berinteraksi antar sesama masyarakat. Kehidupan sosial kemasyarakatan dari masyarakat di daerah penelitian masih cukup tinggi, hal ini dicirikan dengan guyupnya masyarakat desa

dalam melaksanakan gotong royong untuk keperluan kampung, termasuk gotong royong untuk keperluan masyarakat setempat yang terkena musibah bencana tanah longsor seperti terlihat pada Gambar 4.9. Media yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk memanggil masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti cukup hanya berupa kentongan, dimana alat tersebut sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat.

“Budaya gotong royong masih berjalan baik dengan menggunakan mediasi alat tradisional berupa kentongan, demikian pula dengan masyarakat setempat yang mempunyai hajat. Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Program Padat Karya yang pernah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, apalagi dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekarang ini, kegiatan gotong royong sedikit mengalami kemunduran karena yang tidak seluruh masyarakat Gununglurah menjadi sasaran dari program tersebut”, (TSM.W.13.06).



Sumber : Dokumentasi Disairtamben (2007) dan Observasi lapangan (2008)

Kondisi tingkat sosial kemasyarakatan yang masih berjalan dengan baik sangat memungkinkan untuk saling berinteraksi antar masyarakat dan budaya gotong royong yang masih berlaku akan dapat membantu masyarakat dan mengurangi beban dari korban bencana tanah longsor. Sosial kemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kapasitas dan

kerentanan masyarakat di daerah penelitian.

Tingginya tingkat sosial kemasyarakatan yang ada dalam bentuk kegiatan gotong royong yang masih dilakukan akan mengakibatkan tingkat kerentanan masyarakat menjadi rendah. Gotong royong yaitu suatu bentuk kerjasama antar warga desa untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Gotong royong merupakan proses sosial yang bersifat assosiatif dengan model kerjasama, Ibrahim (2003). Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaringan Pengaman Sosial yang dirasakan beberapa masyarakat telah menciptakan kesenjangan sosial yang baru. Mengingat hal tersebut diperlukan upaya agar dapat mengurangi kesenjangan sosial karena akan dapat meningkatkan kerentanan yang ada pada masyarakat di daerah penelitian.

4.2.6. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan

Tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisi daerah penelitian yang mereka budidayakan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan akan berpengaruh pada tindakan pengambilan keputusan untuk melakukan aktivitas budidaya di daerah penelitian.

Pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang merupakan daerah rawan bencana tanah longsor yang tinggi akan membuat masyarakat untuk berhati-hati dalam memanfaatkan lahan yang ada sehingga akan dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat. Masyarakat setempat memahami kondisi kerawanan terhadap tanah longsor sebagian besar melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi ini sangat membantu masyarakat

untuk meningkatkan pemahaman terhadap tingkat kerawanan tanah longsor sehingga dapat mengurangi kerentanan yang ada pada masyarakat karena masyarakat mempunyai tingkat kesiapsiagaan yang tinggi terhadap bencana tanah longsor. Berbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menanggulangi dan mengurangi resiko bencana alam tanah longsor, antara lain dengan membuat talud pada pekarangan seperti terlihat pada Gambar 4.10.

“Sosialisasi pernah dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dari beberapa desa yang dianggap rawan longsor untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak dinas terkait dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa. Hal itu cukup membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi Desa Gununglurah yang rawan terhadap longsor. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah khususnya yang bermukim di daerah yang sangat rawan tanah longsor”, (PKL.W.08.07).

Sebagian besar dari masyarakat yang bermukim di Desa Gununglurah mempunyai pemahaman yang cukup tinggi terhadap tingkat kerawanan terhadap bencana tanah longsor yang ada di daerahnya. Dengan pemahaman yang cukup tinggi ini, sebagian besar dari masyarakat setempat mempunyai tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi pula terhadap kejadian tanah longsor yang mungkin akan menimpa.

“Masyarakat mengetahui bahwa Desa Gununglurah merupakan daerah rawan longsor dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, sedangkan sebagian mengetahui setelah adanya kejadian tanah longsor yang terjadi hampir tiap tahun. Dalam menanggapi hal tersebut sebagian besar merasa khawatir khususnya masyarakat yang berada di lokasi tanah longsor, namun mereka masih tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lahan yang mereka sendiri dengan meningkatkan dan memahami gejala alam yang ada khususnya pada musim penghujan”, (PKL.W.08.05).

Sebagian dari masyarakat di daerah penelitian merasa biasa saja hidup dan memanfaatkan lahan di daerah rawan bencana tanah longsor, walaupun mereka mempunyai tingkat pemahaman yang cukup tinggi. Sebagian masyarakat

tersebut masih melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari di lahan yang mereka miliki dengan meningkatkan kewaspadaan dan memahami gejala alam yang ada.

“Kami mengetahui Desa Gunungkurah merupakan daerah rawan tanah longsor dari petugas kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Karena di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor dan sudah terbiasa hidup disini, maka sebagian besar masyarakat disini tidak khawatir”, (PKL.W.09.05).

“Kami tahu kalau Desa Gununglurah adalah daerah rawan tanah longsor dari pegawai kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Kami sudah terbiasa hidup disini dan di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor, maka sebagian besar dari kami tidak khawatir”, (PKL.W.10.05).

Memahami tingkat kerawanan terhadap bencana tanah longsor yang ada, masyarakat berupaya untuk menanggulangi dan mengurangi resiko bencana tanah longsor. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat salah satunya dengan mengupayakan penanaman tanaman keras pada daerah setempat, khususnya pada lahan mereka. Namun demikian masih didapati sebagian dari masyarakat yang melakukan aktivitas yang akan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.

“Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah rawan tanah longsor sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras di lahan masing-masing yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti *repek* (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung”, (PKL.W.06.08).

Pemahaman masyarakat di daerah penelitian terhadap kondisi lingkungan yang mempunyai tingkat kerawanan terhadap bencana alam tanah longsor, akan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat dengan aktivitas yang dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat di daerah penelitian. Peningkatan pemahaman masyarakat akan membuat suatu perubahan sosial yang menyebabkan kemajuan masyarakat yang didasari oleh adanya kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi (*the need for achievement*), Ibrahim (2003).

4.2.7. Tingkat Aksesibilitas Masyarakat

Tingkat aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat di daerah penelitian juga akan mempengaruhi tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat terhadap kondisi daerah rawan bencana tanah longsor yang dibudidayakan. Tingkat aksesibilitas masyarakat dilihat dari tingkat kemudahan dari masyarakat dalam melakukan aktivitas dan mencapai suatu lokasi atau grumbul ke lokasi atau grumbul yang lain. Kemudahan masyarakat dalam beraktivitas mencapai suatu daerah merupakan upaya untuk mengurangi tingkat kerentanan yang ada dalam masyarakat.



Sumber : *Observasi lapangan (2008)*

Infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang digunakan untuk memperlancar aktivitas atau yang menghubungkan antara grumbul satu dengan yang lain merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat aksesibilitas masyarakat. Infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang ada di daerah penelitian tidak semuanya dalam kondisi baik dan layak, bahkan masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi infrastruktur yang demikian

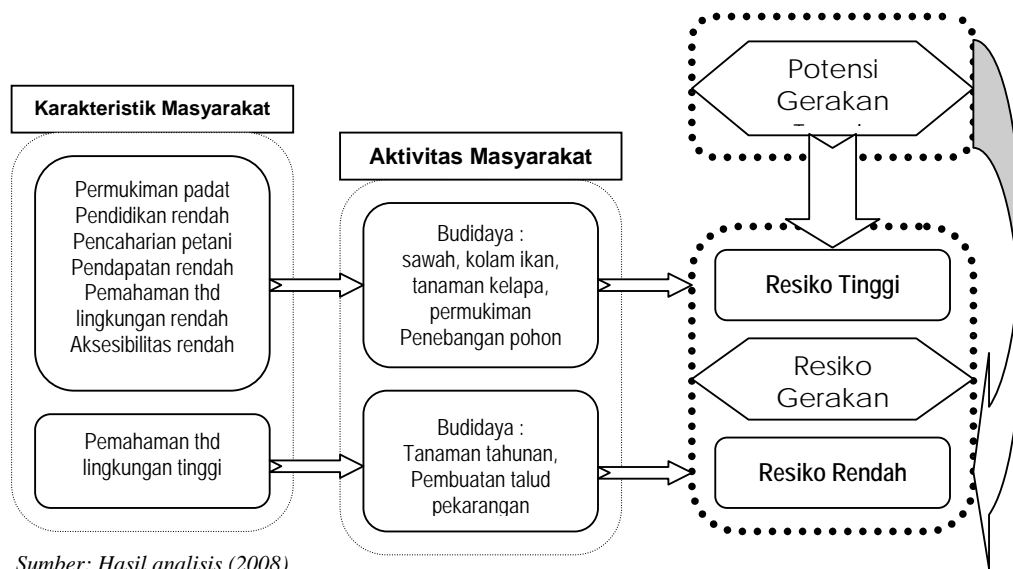
akan mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat setempat dan sangat dimungkinkan akan menghambat proses mitigasi bencana khususnya pada saat terjadi bencana alam tanah longsor sehingga akan dapat meningkatkan kerentanan masyarakat seperti terlihat pada Gambar 4.11 dan 4.12.

TABEL IV.2
KAPASITAS DAN KERENTANAN MASYARAKAT
DI GUNUNGLURAH, CILONGOK, BANYUMAS

NO	VARIABEL PENILAIAN	POTENSI / PERMASALAHAN	KAPASITAS / KERENTANAN
1	2	4	5
1	KEPENDUDUKAN		
	Jumlah Penduduk: 7.362 jiwa dengan usia produktif sebesar 66,72%	Kepadatan penduduk cukup tinggi dengan 79 jiwa/ha dengan permukiman menyebar	Kapasitas tinggi dan Kerentanan tinggi
	Tingkat pendidikan: 79,34% tamat/tidak tamat SD	Banyak penduduk yang berpendidikan rendah	Kapasitas rendah dan Kerentanan tinggi
2	SOSIAL EKONOMI		
	Mata Pencaharian: Sebagian besar petani dan buruh tani	Pengolahan lahan dengan sistem ekstensifikasi pertanian	Kapasitas rendah dan Kerentanan tinggi
	Pendapatan: Sebagian besar masih rendah	Pendapatan sebagai petani dan buruh tani masih rendah	Kapasitas rendah dan Kerentanan tinggi
3	SOSIAL KEMASYARAKATAN		
	Budaya: Gotong royong masih berjalan dengan baik	Interaksi sosial dalam menanggulangi bencana	Kapasitas Tinggi dan Kerentanan rendah
	Pemahaman Masyarakat: Pemahaman terhadap kondisi daerah sudah cukup tinggi	Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam tanah longsor	Kapasitas Tinggi dan Kerentanan rendah
	Tingkat Aksesibilitas: Ketersediaan infrastruktur transportasi masih minim	Keterbatasan aksesibilitas dalam kegiatan mitigasi bencana alam tanah longsor	Kapasitas rendah dan Kerentanan tinggi

Sumber : Hasil analisis (2008)

Rangkuman dari hasil analisis tingkat kapasitas masyarakat dan kerentanan masyarakat disajikan secara lengkap seperti terlihat pada Tabel IV.2 dan Gambar 4.13.



GAMBAR 4.13
PENGARUH KARAKTERISTIK MASYARAKAT TERHADAP
AKTIVITAS MASYARAKAT DAN RESIKO GERAKAN TANAH

4.3 Analisis Penyebab Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Di Gununglurah

Setiap manusia atau masyarakat pada hakekatnya akan selalu berupaya untuk dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. Penyebab pemanfaatan lahan oleh masyarakat pada daerah rawan bencana tanah longsor di Gununglurah baik berupa permukiman, budidaya sawah, budidaya kolam ikan dan kebun/tegalan pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat yang menyangkut kondisi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Berdasarkan wawancara langsung yang telah dilakukan kepada narasumber, didapatkan data dan informasi bahwa sebagian besar masyarakat yang memanfaatkan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor di

Gununglurah disebabkan karena faktor kekerabatan dalam bentuk turun temurun. Kapasitas masyarakat yang rendah khususnya dalam bidang tingkat pendapatan menjadikan permukiman yang ditempati dan lahan yang dibudidayakan tersebut sebagai satu-satunya harta benda dan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain hal tersebut diatas, sebagian kecil dari masyarakat yang memanfaatkan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor di daerah penelitian dikarenakan alasan ketersediaan air baku yang cukup dan udara yang relatif masih bersih.

“Sebagian besar lahan di kota dimanfaatkan sebagai permukiman, sedangkan dipinggiran digunakan sebagai sawah, dan kebun/tegalan. Di sebelah Utara sebagian besar digunakan sebagai kebun/tegalan dan berupa hutan rakyat dan hutan produksi milik Perum Perhutani. Penggunaan lahan disini sebagian besar dipengaruhi karena faktor turun temurun dan keterbatasan kepemilikan lahan. Sedangkan sebagian kecil dikarenakan ketersediaan air yang melimpah dan udara yang masih bersih”, (TSE.W.07.04).

Selain alasan tersebut diatas, sebagian besar masyarakat di daerah rawan bencana tanah longsor beranggapan harga lahan yang lebih layak huni yang berada di daerah bawah sudah cukup tinggi sehingga dengan pendapatan dan kemampuan yang dimiliki mereka merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membeli lahan yang lebih layak huni.

“Sebagian besar harga lahan yang ada disini masih relatif rendah khususnya lahan yang berada di bagian Utara desa, namun harga lahan di pusat kota Gununglurah sudah termasuk tinggi”, (TSE.W.13.03).

“Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Berkaitan dengan pendapatan dari 1996 KK yang ada, sekitar 52% masyarakat Gununglurah termasuk keluarga pra sejahtera dan 18% keluarga sejahtera 1, selebihnya yaitu 30% termasuk keluarga sejahtera 2”, (TSE.W.07.02).

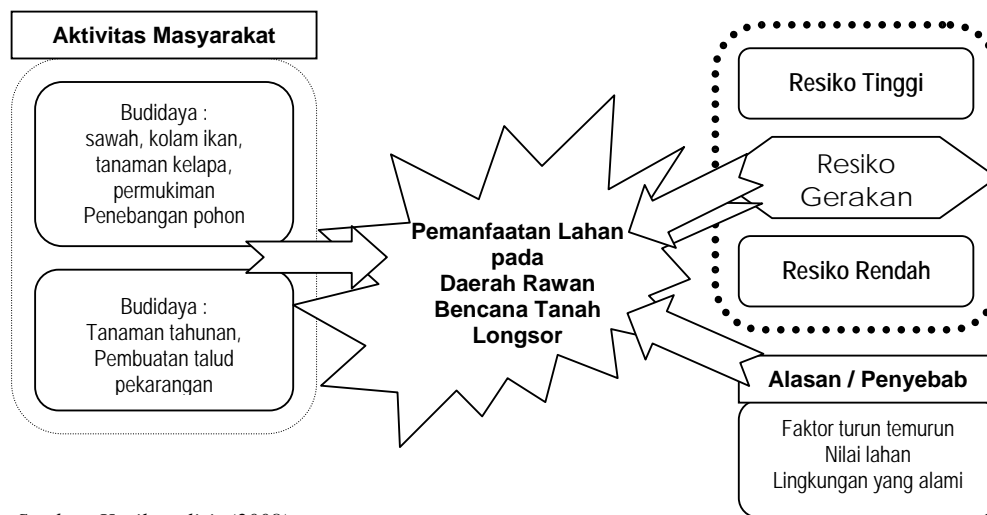
Berdasarkan kondisi ekonomi dan persepsi masyarakat setempat, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor dapat diketahui bahwa nilai lahan yang ada cukup bervariasi. Lahan yang berada

di bagian atas mempunyai nilai yang relatif rendah sedangkan di bagian bawah nilai lahan sudah cukup tinggi. Adapun kapasitas masyarakat untuk membeli lahan yang lebih layak huni masih sangat rendah.

Tingkat pendapatan dari sebagian besar masyarakat yang relatif masih rendah berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang rendah sehingga lahan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi sangat terbatas sebagai alasan penyebab pemanfaatan lahan pada daerah penelitian. Faktor kekerabatan dalam bentuk turun temurun dan persepsi masyarakat dalam bermukim yang tidak jauh dari lokasi kegiatan untuk pemenuhan ekonomi menjadikan salah satu alasan penyebab pemanfaatan lahan pada daerah penelitian.

Adapun sebagian lagi faktor pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor dalam bentuk permukiman yang ada disebabkan karena adanya kecukupan air baku dan lingkungan ataupun udara yang masih bersih. Desa Gununglurah yang berada pada bagian hulu dari suatu daerah aliran sungai menjadikan daerah penelitian menjadi daerah yang memiliki kecukupan air bersih dan udara yang relatif bersih.

Karakteristik fisik dan masyarakat akan mempengaruhi potensi gerakan tanah pada daerah penelitian. Karakteristik masyarakat juga akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat berpengaruh pada daerah yang mempunyai resiko gerakan tanah. Pemanfaatan lahan pada daerah penelitian dipengaruhi oleh kondisi tingkat resiko gerakan tanah dan alasan yang mendasari pemanfaatan lahan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 4.14 dibawah ini.



Sumber: Hasil analisis (2008)

GAMBAR 4.14
PENGARUH ALASAN DAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA
PEMANFAATAN LAHAN DI DAERAH RAWAN BENCANA

4.4 Analisis Kebijakan tentang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor

Penataan ruang di Kabupaten Banyumas diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas. Secara umum rencana tata ruang yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas sebagian besar daerah penelitian dialokasikan sebagai kawasan dengan fungsi lindung mengingat kondisi fisik yang ada di lapangan sebagian besar berupa lereng pegunungan dengan pemanfaatan sebagai hutan yang mempunyai fungsi untuk melindungi kawasan bawahnya dan sebagian lagi diarahkan sebagai

fungsi budidaya khususnya permukiman perdesaan dengan pemanfaatan utama sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Penataan ruang di ibukota kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Ibukota Kecamatan Cilongok. Adapun Desa Gununglurah berada diluar ibukota Kecamatan Cilongok sehingga penataan ruang menggunakan RTRW Kabupaten Banyumas. Peraturan daerah tersebut merupakan arahan dalam pengembangan suatu wilayah karena didalamnya terdapat pembagian fungsi pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada agar dapat bermanfaat bagi berbagai kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

“Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya, antara lain: budidaya lahan basah, budidaya lahan kering, budidaya hutan produksi dan budidaya hutan terbatas. Sedangkan maksud dari penetapan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Adapun targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan”, (KPR.W.01.01).

Pemanfaatan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat masih dijumpai adanya penyimpangan yang cukup signifikan khususnya pemanfaatan lahan pada kawasan fungsi lindung yang mempunyai potensi rawan terhadap bencana tanah longsor. Penyimpangan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak dapat dideteksi secara dini karena masyarakat tidak mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam membangun rumah tinggal. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6

Tahun 1992 tentang Bangunan, masyarakat mempunyai kewajiban untuk memiliki IMB sebelum membangun bangunan, sehingga pemanfaatan lahan yang diusulkan dan struktur serta kekuatan bangunan akan dapat dipantau. Penegakan hukum belum dapat dilaksanakan secara efektif dalam menangani penyimpangan pemanfaatan ruang.

Seiring dengan regulasi baru berupa Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan kondisi eksisting berupa penyimpangan pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas segera melakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang baru.

“Sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, pemberian *reward and punishment* dan penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum terhadap penyimpangan dari Rencana Tata Ruang”, (KPR.W.02.02).

Selain kedua produk hukum daerah tersebut diatas, pemerintah daerah juga melaksanakan pengendalian pemanfaatan lahan dengan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 1992 tentang Bangunan. Selain perencanaan penataan ruang, untuk mendapatkan IMB maka harus dilengkapi dengan syarat-syarat teknis bangunan seperti struktur bangunan, kekuatan bangunan, keamanan bangunan, dan lain-lain. Dengan demikian diterbitkannya IMB diharapkan semua bangunan yang akan dibangun dapat menyesuaikan dengan

persyaratan teknis yang telah ditetapkan pada ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada sehingga pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat dikendalikan dan dihindarkan dari kerusakan.

“Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat guna pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggunakan instrumen peragkat hukum Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, Perda tentang 43 Tahun 1995 tentang IKK Cilongok dan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman”, (KPR.W.03.03).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, secara spesifik belum mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan lindung termasuk pada daerah rawan bencana tanah longsor. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang RTRW baru sebatas memuat zonasi kawasan rawan bencana termasuk didalamnya kawasan rawan terhadap bencana tanah longsor. Pengaturan dan penetapan kawasan daerah rawan bencana tanah longsor dan daerah yang rawan terhadap bencana lainnya akan masuk dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan pada tahun ini dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan penataan ruang yang baru.

“Secara spesifik belum ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan penataan ruang pada daerah rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan akan ditetapkan kawasan rawan bencana termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor”, (KPB.W.01.04).

Penetapan dan pengaturan pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor dilakukan dengan beberapa tahap yang sebagian telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Adapun langkah-langkah yang telah

dilaksanakan adalah secara rutin Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas setiap tahun melakukan pemetaan daerah rawan bencana khususnya tanah longsor untuk tiap kecamatan. Selain itu pemerintah kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah yang menangani selalu melaksanakan survey lapangan khususnya setelah ada laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan bencana tanah longsor.

“Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan dari masyarakat dan survey lapangan”, (KPB.W.02.05).

Kawasan fungsi lindung yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Banyumas masih dimungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan fisik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat, khususnya dalam rangka untuk mitigasi bencana sepanjang pelaksanaan pembangunan fisik tersebut tidak mengganggu fungsi lindung itu sendiri.

“Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi karena mengingat tingkat kerawanan daerah tersebut terhadap bencana tanah longsor. Sedangkan pelaksanaan pembangunan di lokasi dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan terutama pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana dalam rangka untuk mitigasi bencana tanah longsor”, (KPB.W.04.06).

Pelaksanaan mitigasi bencana pada dasarnya terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu pelaksanaan mitigasi sebelum kejadian bencana berupa upaya pencegahan terhadap kejadian bencana dan mengurangi resiko bencana alam salah satunya dengan pemasangan *early warning system*, pelaksanaan mitigasi pada saat kejadian bencana dalam bentuk evakuasi korban dan tanggap darurat serta pelaksanaan mitigasi pasca kejadian bencana dalam bentuk rekonstruksi infrastruktur, rehabilitasi mental korban bencana dan relokasi permukiman.

”Mitigasi bencana tanah longsor terbagi menjadi 3 tahap. Sebelum kejadian dilakukan pendataan, identifikasi, pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor, bantuan teknologi mitigasi kepada masyarakat, *early warning system* yang berupa pemasangan *extensometer* untuk mendeteksi perubahan rekahan yang ada dan *tiltmeter* untuk mendeteksi deformasi gerakan tanah, pemantauan curah hujan secara *realtime* berbasis seluler yang dipancarkan ke Balai SABO Yogyakarta, Satlak PBP Kabupaten Banyumas dan Kepala Dinas ESDM. Pada saat bencana dilakukan evakuasi korban dan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh Satlak PBP. Sedangkan kegiatan pasca bencana berupa rekonstruksi, rehabilitasi dan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang”, (KPB.W.04.10).

Berdasarkan identifikasi tentang regulasi penataan ruang di Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas khususnya arahan, strategi dan rencana pemanfaatan ruang yang direncanakan maka diperlukan kajian kesesuaian antara arahan pemanfaatan ruang tersebut terhadap kondisi eksisting pada daerah penelitian yang meliputi karakteristik fisik, aktivitas masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan diketahui dan disimpulkan apakah kondisi pemanfaatan lahan yang ada sudah sesuai dengan kebijakan dan rencana tersebut.

Kriteria dasar yang digunakan untuk melakukan kajian kesesuaian lahan adalah kawasan yang memiliki kondisi fisik lahan yang sesuai untuk peruntukan arahan pemanfaatan dan rencana tata ruang. Adapun fokus kajian ditujukan kepada arahan kebijakan dalam rencana pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Banyumas dalam upaya pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan seperti terlihat pada Tabel IV.3 berupa kajian kesesuaian antara kebijakan dan rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan kondisi eksisting daerah penelitian.

TABEL IV.3
ANALISIS KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DENGAN KONDISI DAERAH PENELITIAN

NO	ARAHAN, STRATEGI DAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG	KONDISI	KAJIAN	KESIMPULAN
1	2	3	4	5
1	<p>Kawasan Lindung <u>Arahan Pemanfaatan:</u> Fungsi utama diarahkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang ada berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya dan kawasan perlindungan setempat.</p> <p><u>Strategi Pengembangan:</u> Strategi pengembangan berupa pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan. Pada kawasan ini tidak diperkenankan adanya aktivitas manusia atau kegiatan budidaya, yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya.</p> <p><u>Rencana Pelaksanaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah dan diarahkan pada pengembangan tanaman hutan oleh masyarakat misalnya hutan rakyat ❖ Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan hutan lindung, yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan kepada fungsi semula. ❖ Pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan dengan cara rehabilitasi dan konservasi lahan. ❖ Penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan ini dibatasi dan dikendalikan dengan pembebanan pajak yang lebih tinggi 	<p>Secara umum kondisi yang ada adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara topografis, merupakan kawasan pegunungan sampai dengan kaki pegunungan, kemiringan eabagian besar di atas 15 % dengan morfologi agak curam sampai curam. b. Mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani dan buruh tani. Pemanfaatan lahan didominasi oleh lahan belum terbangun sebesar 76,73% dan hanya 23,27% berupa lahan terbangun diantaranya berupa permukiman perdesaan sebesar 4,65%. c. Pola pemukiman penduduk menyebar dengan tingkat kepadatan tinggi d. Kawasan lindung (konservasi) meliputi kawasan hutan Gunung Slamet dengan luas 1.334,31 Ha e. Terdapat beberapa prasarana seperti jaringan air bersih, saluran irigasi dan jalan meskipun dengan kondisi yang tidak baik, serta sarana berupa sekolahan, pesantren, masjid dan bangunan lainnya serta kebun yang dibudidayakan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan arahan, strategi pengembangan dan rencana pelaksanaan, semua rencana tata ruang telah sesuai berdasarkan karakteristik fisik alam dan kegiatan yang ada di daerah penelitian. b. Terdapat realitas penyimpangan dalam pemanfaatan lahan yang telah direncanakan sehingga menjadi alasan untuk melakukan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 	<p>Arahan kebijakan dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik alam yang ada dan kecenderungan perkembangan kegiatan yang ada. Rencana penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk mengurangi resiko dan menganggulangi kejadian bencana tanah longsor.</p>

Sumber: Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyuma dan Hasil analisis (2008)

Berdasarkan Tabel IV.3 tentang kajian kesesuaian tersebut, terdapat penyimpangan antara arahan dan rencana pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan kondisi pemanfaatan lahan yang ada di daerah penelitian pada saat ini. Penyimpangan tersebut merupakan alasan dasar dari evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas disamping diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil analisis tersebut diatas sesuai dengan teori dari Jayadinata (1992) dan Tarigan (2004).

4.5 Analisis Pemanfaatan Lahan pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Gununglurah

Kajian pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor di Gununglurah ini didasarkan pada identifikasi dan hasil dari keempat analisis yang sudah dilakukan. Berdasarkan kondisi fisik yang ada, daerah penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) daerah yang mempunyai tingkat potensi terhadap gerakan tanah dan terbagi menjadi 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan fungsi lindung, penyangga dan kawasan budidaya. Pemanfaatan lahan di Gununglurah sebagian besar berupa hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat dan hutan negara, sebagian lagi berupa kebun/tegalan, semak belukar, sawah dan permukiman.

Pemahaman masyarakat setempat terhadap kondisi lingkungan akan dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dari tingkat pemahaman yang cukup tinggi, sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat kesadaran yang cukup tinggi dan masyarakat merasa ikut bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian. Kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat dalam ikut menjaga lingkungan adalah dengan menanam tanaman keras pada daerah yang kritis khususnya pada lahan yang mereka miliki. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang mempunyai kapasitas rendah masih melakukan aktivitas yang akan dapat mengganggu keseimbangan alam.

”Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti memotong lereng untuk kegiatan permukiman bahkan masih ada sebagian masyarakat yang mengolah sawah dan beternak ikan di daerah atas. Sedangkan di luar Gununglurah banyak industri pengolahan kayu, hal ini akan sangat mempengaruhi masyarakat sekitar karena sebagian masyarakat tersebut akan ikut *mensuplay* bahan baku kayu kepada industri tersebut”, (PKL.W.04.08).

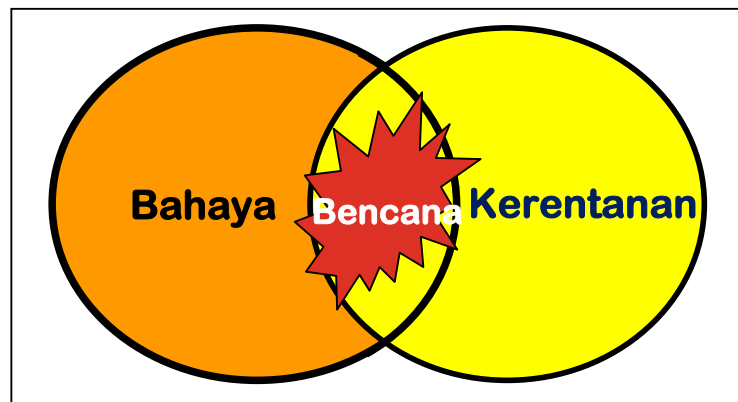
Adapun pemanfaatan lahan tersebut diatas sebagian besar disebabkan karena adanya faktor kekerabatan masyarakat dalam bentuk turun temurun, keterbatasan kepemilikan lahan dari masing-masing masyarakat karena rendahnya kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dibanding dengan nilai lahan layak huni yang ada. Sebagian lagi pemanfaatan lahan oleh masyarakat setempat disebabkan karena lingkungan yang alami yaitu ketersediaan air baku dan udara yang bersih.

”Pemanfaatan lahan sebagian besar di daerah ini berupa permukiman, sawah dan kebun/tegalan sedangkan dibagian atas merupakan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena lahan yang dibudidayakan merupakan lahan yang hanya dimiliki dan karena faktor turun temurun serta kekerabatan”, (TSE.W.08.04).

”Harga lahan yang ada di Gununglurah tergolong rendah sampai sedang dibanding dengan harga lahan yang ada di kota kecamatan. Harga lahan rendah terdapat pada daerah atas, sedangkan di daerah bawah harganya jauh lebih tinggi dari daerah atas”, (TSE.W.12.03).

Pemanfaatan lahan pada daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah akan menimbulkan suatu resiko gerakan tanah. Resiko gerakan tanah didasarkan pada tingkat potensi gerakan tanah terhadap ancaman kehidupan masyarakat, hasil budidaya manusia dan aktivitas masyarakat. Aktivitas dan budidaya masyarakat dalam bentuk permukiman pada daerah yang mempunyai potensi gerakan tanah

akan menjadikan resiko terhadap gerakan tanah menjadi tinggi sehingga bahaya bencana tanah longsor akan menjadi tinggi. Tingkat bahaya yang tinggi jika bertemu dengan tingkat kerentanan masyarakat yang tinggi akan terjadi bencana alam seperti terlihat pada Gambar 4.15.



Sumber: Sadisun (2008)

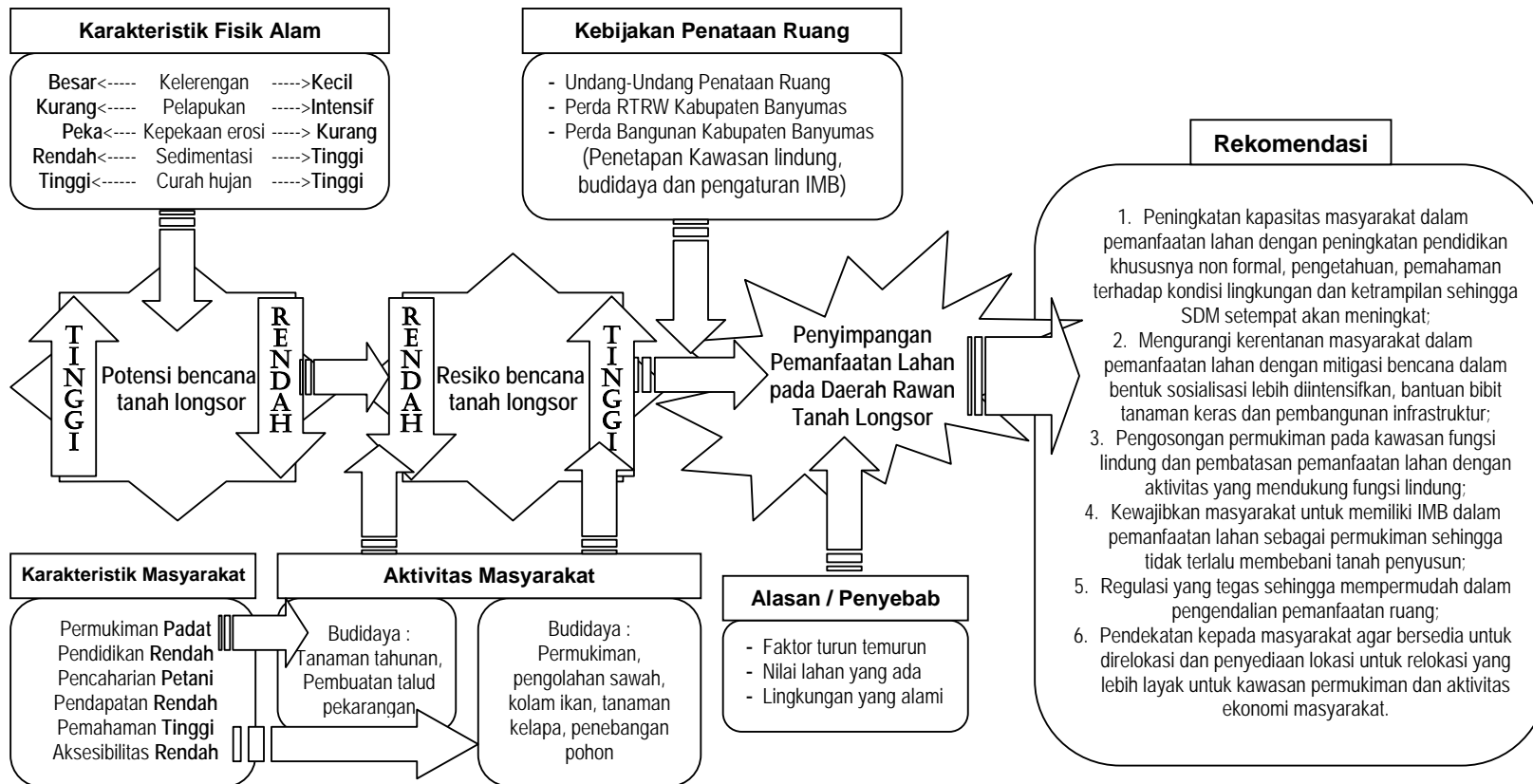
GAMBAR 4.15 PENGARUH KERENTANAN DAN BAHAYA TERHADAP BENCANA

Rencana tata ruang di Kabupaten Banyumas secara umum terdiri dari 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan fungsi lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005, pemanfaatan lahan yang ada di daerah penelitian terjadi suatu penyimpangan pemanfaatan lahan pada kawasan fungsi lindung dan kawasan penyangga. Penyimpangan pemanfaatan lahan pada daerah penelitian terdiri dari pemanfaatan lahan untuk permukiman pada kawasan penyangga dan kawasan fungsi lindung, budidaya pertanian lahan basah dan budidaya kolam ikan juga terjadi pada kawasan penyangga dan kawasan fungsi lindung seperti terlihat pada Gambar 4.16 dibawah ini.

4.6 Hubungan antar Analisis

Berdasarkan hasil analisis diatas, didapat suatu hubungan antar analisis yang telah dilakukan, seperti terlihat pada Gambar 4.17, yaitu:

1. Karakteristik fisik alam di daerah penelitian yang sebagian besar berupa pengunungan sampai kaki pegunungan dapat mempengaruhi tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat setempat. Kapasitas dan kerentanan masyarakat dalam pemanfaatan lahan yang dipengaruhi oleh karakteristik fisik alam adalah sektor jenis mata pencaharian yang sebagian besar adalah petani dan buruh tani dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah;
2. Tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat menjadi alasan/penyebab dari masyarakat untuk melakukan aktivitas pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor. Selain kapasitas dan kerentanan masyarakat yang dipengaruhi oleh karekteristik fisik, sektor kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat sosial kemasyarakatan dan tingkat pemahaman terhadap kondisi lingkungan menjadi alasan/penyebab pemanfaatan lahan di daerah penelitian;
3. Pemanfaatan lahan di daerah penelitian dipengaruhi oleh karakteristik fisik alam dan tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat yang dijadikan alasan/penyebab utama dalam pemanfaatan lahan di daerah penelitan;
4. Berdasar kebijakan tentang penataan ruang dan kondisi eksisting pemanfaatan lahan, sebagian terjadi penyimpangan dari kebijakan penataan ruang yang ada;
5. Berdasarkan kondisi eksisting penyimpangan pemanfaatan lahan yang ada dan kebijakan pemerintah tentang rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, diperlukan rekomendasi pengendalian pemanfaatan lahan di daerah penelitian.



Sumber: Hasil analisis (2008)

GAMBAR 4.17
POLA HUBUNGAN ANTAR ANALISIS

4.7 Temuan Studi

Berdasarkan proses analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditemukan penyimpangan pemanfaatan lahan pada kawasan fungsi lindung dan fenomena karakteristik masyarakat di daerah penelitian yang mempengaruhi pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor. Temuan studi dalam penelitian ini antara lain:

1. Tingkat potensi gerakan tanah di daerah penelitian dikontrol oleh faktor kemiringan lahan, tingkat pelapukan dan kepekaan terhadap erosi dari batuan atau tanah penyusun serta dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan;
2. Kondisi fisik alam berupa kelerengan, tanah penyusun dan intensitas curah hujan berpengaruh pada ketersediaan lapangan pekerjaan di bidang pertanian dan secara tidak langsung berpengaruh pada penentuan jenis mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani;
3. Sebagian besar tingkat pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani relatif masih rendah sehingga sebagian besar masyarakat termasuk dalam kriteria keluarga pra sejahtera;
4. Sebagian besar masyarakat di daerah penelitian memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan tingkat aksesibilitas dalam pelaksanaan interaksi social dan berhubungan dengan wilayah lain relatif rendah;
5. Kepadatan penduduk di daerah penelitian pada kawasan terbangun sudah cukup padat yang sebagian besar mempunyai hubungan kekerabatan;
6. Sebagian besar masyarakat di daerah penelitian mempunyai tingkat sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat pemahaman terhadap kondisi lingkungan sudah cukup tinggi;

7. Secara umum masyarakat di daerah penelitian mempunyai tingkat kapasitas yang relatif rendah dan kerentanan yang relatif tinggi;
8. Aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat di daerah penelitian dipengaruhi oleh karakteristik fisik alam, karakteristik sosial ekonomi masyarakat; faktor turun temurun, tingginya nilai lahan yang layak huni dan kondisi lingkungan yang masih alami;
9. Pemanfaatan lahan di lokasi penelitian terjadi pada lokasi yang bervariasi, mulai dari lahan dengan kelerengan rendah sampai lahan dengan kelerengan tinggi;
10. Terdapat penyimpangan pemanfaatan lahan pada kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi penyangga.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari identifikasi lapangan yang ada, hasil analisis yang telah dilakukan dan temuan studi yang didapat pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Daerah penelitian mempunyai tingkat potensi terhadap gerakan tanah yang bervariasi. Tingkat potensi gerakan tanah yang dipengaruhi oleh aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat akan menjadikan daerah penelitian mempunyai resiko terhadap gerakan tanah. Tingkat resiko gerakan tanah menjadi meningkat seiring dengan menurunnya tingkat kapasitas masyarakat dan meningkatnya tingkat kerentanan masyarakat;
2. Kejadian bencana tanah longsor di daerah penelitian sangat dipengaruhi oleh tingkat potensi bencana gerakan tanah dan aktivitas masyarakat yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan;
3. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di daerah penelitian sebagian terjadi penyimpangan terhadap peraturan pemerintah tentang penataan ruang yang telah ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung dan kawasan penyangga. Penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah penelitian seperti permukiman, pengolahan sawah dan budidaya ikan di kolam akan memicu terjadinya bencana tanah longsor sehingga perlu upaya untuk pengendalian pemanfaatan lahan di daerah penelitian.

5.2. Rekomendasi

Dari identifikasi, hasil analisis, temuan studi dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa rekomendasi, antara lain:

6. Perlu upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan lahan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan non formal sehingga pengetahuan dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan akan meningkat dan mempunyai ketrampilan untuk melindungi lingkungan, selanjutnya diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik;
7. Perlu upaya mengurangi kerentanan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana tanah longsor dengan kegiatan mitigasi bencana dalam bentuk sosialisasi yang intensif, bantuan bibit tanaman keras dan pembangunan infrastruktur khususnya sarana penghubung berupa jalan dan jembatan sebagai upaya penanganan bencana tanah longsor;
8. Perlu upaya permukiman kembali (*resettlement*) masyarakat yang bermukim pada kawasan fungsi lindung dan pembatasan pemanfaatan lahan dengan aktivitas yang mendukung fungsi lindung seperti budidaya tanaman keras dan tanaman tahunan serta pembentukan kelompok tani hutan sehingga lebih mudah dilakukan pembinaan, pengawasan dan penataan kawasan;
9. Perlu upaya evaluasi pelaksanaan atau implementasi kewajiban kepemilikan Ijin Mendirikan Bangunan sebagai pengendali pemanfaatan lahan khususnya permukiman pada kawasan penyangga agar tidak membebani tanah antara lain melalui penguatan kelembagaan dan bimbingan teknis kepada petugas;

10. Perlu adanya regulasi yang tegas berupa sanksi hukum kepada siapapun yang membangun bangunan dengan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sehingga mempermudah dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Perlu upaya pendekatan kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan pada kawasan fungsi lindung agar bersedia untuk direlokasi dan penyediaan lokasi untuk relokasi yang lebih layak huni untuk kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H.Z. 2003. *Pengantar Bencana Gerakan Tanah*. Bandung : Pusat Penelitian Geoteknologi, LIPI.
- Arikunto, S. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Penerbit Asdi Mahastya.
- Asikin, S., dan H.A. Prastistho. 1992. *Peta Geologi Lembar Banyumas, Jawa, Skala 1:100.000*. Bandung : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Departemen Pertambangan dan Energi.
- Djuri M., Samodra H., dan Amin T.T. 1996. *Peta Geologi Teknik Lembar Tegal-Purwokerto, Jawa, Skala 1:100.000*. Bandung : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Departemen Pertambangan dan Energi.
- Ibrahim, J.T. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang : Penerbit UMM.
- Jayadinata, J.T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : Penerbit ITB.
- Karnawati, D. 2003. *Manajemen Bencana Gerakan Tanah*. Diktat Kuliah. Yogyakarta : Jurusan Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada.
- Kecamatan Cilongok Dalam Angka*, BPS Kabupaten Banyumas, 2007.
- Koentjaraningrat (ed.) 1977. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. cetakan II, Jakarta : PT. Gramedia.
- Leverson, D. 1980. *Geology and Urban Environment*. Oxford : Oxford University Press Inc.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. : PT. Prasetia Widya Pratama.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cetakan ke 8, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B. dan M.A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : UI-Press.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Yogyakarta : Penerbit Aditya Media
- Natzir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Paimin. 2005. "Efektivitas Hutan Tanaman Mahoni (*Swietenia Macrophylla*) dalam Mengendalikan Erosi dan Limpasan." *Journal Geografi*, vol. 19, no.1, Surakarta : Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Pemetaan Daerah Rawan Bencana Alam Gerakan Tanah di Wilayah Cilongok Kabupaten Banyumas*, Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas, 2007.

- Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas 2006*, Bappeda dan BPS Kabupaten Banyumas, 2007.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 1992 tentang *Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)*, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 1995 tentang *(RUTRK/RDTRK) Ibukota Kecamatan Cilongok*, Bappeda Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas 2005-2015*, Bappeda Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Nomor 05 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas*.
- Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Cilongok*, BPN Kabupaten Banyumas, 2000.
- Rahim, S.E. 2000. *Pengendalian Erosi Tanah: Dalam Ranga Pelestarian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Penerbit Puri Aksara.
- Sadisun, I.A. 2008. *Dasar-dasar Penganggulangan Bencana*. Purwokerto : Laboratorium Eng-Geo.
- Selby M.J. 1993. *Hillslope Material and Processes*. Second edition, Oxford : Oxford University Press.
- Seyhan, E. 1990. *Dasar-dasar Hidrologi*. Terjemahan Sentot Subagyo. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Subowo, E. 2003. *Pengenalan Gerakan Tanah*. Bandung : Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Sudarsono, U. 2003. *Penanggulangan Bencana Gerakan Tanah, Bahan Diklat Mitigasi Gerakan Tanah*, BIKK UPT LIPI, Karangasambung – Kebumen.
- Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sujoko, S.A. 2003. *Rekayasa Vegetasi dalam Pengendalian Daur Air*. Makalah. Yogyakarta : Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.
- Sumarto. 1999. *Teknologi SIG di Masa Depan, Perkembangan dan Pemanfaatannya untuk Menunjang Pembangunan Daerah*, Makalah. Bandung : Jurusan Teknik Geodesi, ITB.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11/1980 tentang *Kriteria dan Tata Cara Penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya*, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Suripin, 2002. *Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sutikno, 2001, *Mengenal Tanah Longsor*, Direktorat Geologi Tata Lingkungan –

Departemen Pertambangan dan Energi, Bandung.

- Tarigan, R. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Van Zuidam, R.W. 1983. *Guide to Geomorphologic Aerial Photographic Interpretation and Mapping*. Netherland : The Haque Martinus Nijhoff.
- Varnes, D.J. 1978. "Slope Movement and Type and Processes, Landslide Analysis and Control." *Transportation Research Board*, special Report 176, Washington D.C. : National Research Council.
- Verstappen, H.T. 1983. *Applied Geomorphology: Geomorphological Surveys for Environmental Development*. Netherland : Elsevier Science Publishier, B.V.
- Winarso (ed.). 2002. *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*. Bandung : Departemen Teknik Planologi, ITB.
- Yudohusodo, S., S. Salam dan D. Djoekardi. 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta : Penerbit Yayasan Padamu Negeri
- Yunus, H.S. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN A

PANDUAN WAWANCARA

A. KONDISI FISIK DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

(Pertanyaan diajukan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas)

1. Bagaimana Penataan Ruang secara umum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan apa yang mendasari dilakukannya Penataan Ruang di Kabupaten Banyumas ? (Maksud, Tujuan dan Targetnya)
2. Apakah dalam Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas telah mengacu pada UU nomor 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang dan seperti apakah Penataan Ruang yang akan dilaksanakan nanti ?
3. Bagaimana pemanfaatan lahan yang terjadi selama ini dan bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyumas ?
4. Kebijakan apa saja yang telah dibuat dalam rencana Penataan Ruang di daerah rawan bencana tanah longsor ?
5. Dalam merealisasikan rencana tersebut, tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas ?
6. Bagaimana menurut Anda, Apakah semua keinginan masyarakat yang tertuang dalam bentuk pembangunan di daerah rawan bencana perlu diakomodir oleh pemerintah ?
7. Bagaimana kondisi fisik alam yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan Bagaimana kondisi iklim dan vegetasi yang ada di Desa Gununglurah ?
8. Bagaimana aktivitas masyarakat / perlakuan masyarakat terhadap lingkungan yang ada ?
9. Bagaimana kejadian bencana alam tanah longsor yang ada di Gununglurah ? (frekuensi, waktu dan korban)
10. Bagaimana penanganan bencana tanah longsor yang ada ? (pra- saat – pasca)

B. KAPASITAS DAN KARENTANAN MASYARAKAT

(Pertanyaan diajukan kepada masyarakat Desa Gununglurah)

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Gununglurah ?
2. Bagaimana dengan jenis mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Gununglurah dan bagaimana tingkat pendapatan mereka ?
3. Bagaimana dengan nilai lahan yang ada di Desa Gununglurah ?
4. Bagaimana pemanfaatan lahan yang terjadi di Gununglurah selama ini dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan lahan tersebut ?
5. Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa daerah tempat pemanfaatan lahan termasuk daerah rawan bencana tanah longsor dan bagaimana tanggapan masyarakat mensikapi hal tersebut ?
6. Bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Gununglurah ?
7. Bagaimana pemerintah daerah melakukan sosialisasi atau memberikan penjelasan kepada masyarakat Desa Gununglurah terhadap kondisi wilayah dan apakah sosialisasi tersebut banyak membantu masyarakat ?

LAMPIRAN B

HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

Nomor Catatan 01

Nama : Dedy Noerhasan, ST
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Instansi : BAPPEDA Kabupaten Banyumas
Waktu : Selasa, 07 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya, antara lain: budidaya lahan basah, budidaya lahan kering, budidaya hutan produksi dan budidaya hutan terbatas. Sedangkan maksud dari penetapan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Adapun targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan"
2. "Belum, sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sedangkan pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, pemberian *punishment and reward* dan penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum tentang penyimpangan Rencana Tata Ruang"
3. "Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman"

4. "Secara spesifik belum ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan penataan ruang pada daerah rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan akan ditetapkan kawasan rawan bencana termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor"
5. "Tahapan yang akan dilakukan antara lain dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan-pemetaan daerah yang mempunyai kerawanan terhadap bencana, laporan masyarakat dan survey lapangan"
6. "Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan termasuk pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana"
7. "Berdasarkan data yang ada wilayah Kabupaten Banyumas tersusun atas pergunungan di bagian Utara, perbukitan membentang mulai di bagian Barat sampai Timur, dataran rendah dibagian tengah dan Telatan dan cekungan berada di bagian Tenggara. Curah hujan yang ada di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman holtikultura sampai tanaman keras. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolaannya berada di Perum Perhutani"
8. "Sebagian masyarakat sudah sadar akan lingkungan, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung"
9. "Berdasarkan laporan dan pendataan yang ada, frekuensi tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Namun sampai saat ini, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa"
10. "Penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian dengan sekretariat di Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas"

Nomor Catatan 02

Nama : Sudarsono, ST
 Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
 Instansi : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kab. Banyumas
 Waktu : Kamis, 09 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya. Maksud dari penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Adapun targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan”

2. ”Sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, pemberian *reward and punishment* dan penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum terhadap penyimpangan dari Rencana Tata Ruang”
3. ”Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan menggunakan instrumen perangkat hukum Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, Perda tentang 43 Tahun 1995 tentang IKK Cilongok dan perda tentang teknis bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman khususnya kegiatan perekonomian”
4. ”Secara umum dalam RTRW baru menentukan kawasan rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas akan ditetapkan kawasan rawan bencana dengan pengaturan pemanfaatan lahannya termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor”
5. ”Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan dari masyarakat dan survey lapangan”
6. ”Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada kawasan rawan bencana, sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan”

7. "Kondisi alam di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, antara lain pegunungan di bagian Utara, perbukitan di bagian Barat sampai Timur, dataran dibagian tengah dan Selatan dan cekungan berada di bagian Tenggara. Sepengetahuan saya kondisi curah hujan di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolaannya berada di Perum Perhutani"
8. "Sebagian masyarakat sudah sadar akan kondisi lingkungan yang ada, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung"
9. "Berdasarkan yang saya tahu, frekuensi tanah longsor terjadi hampir tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan dengan skala kecil"
10. "Setahu saya untuk penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas"

Nomor Catatan 03

Nama : Kuwat Sudarso, ST
 Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 Instansi : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kab. Banyumas
 Waktu : Kamis, 09 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya. Maksud dari penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Sedangkan targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan"
2. "Sebagian besar perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada Tahun Anggaran 2008 ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda

Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum terhadap penyimpangan dari Rencana Tata Ruang”

3. ”Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat guna pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggunakan instrumen peragkat hukum Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, Perda tentang 43 Tahun 1995 tentang IKK Cilongok dan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman”
4. ”Secara umum dalam rencana tata ruang yang ada baru menentukan kawasan rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas akan ditetapkan kawasan rawan bencana dengan pengaturan pemanfaatan lahannya termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor”
5. ”Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan dari masyarakat dan pelaksanaan survey lapangan”
6. ”Sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan, termasuk di daerah rawan bencana”
7. ”Fisik alam yang ada di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, mulai dari pegunungan di bagian Utara, perbukitan di bagian Barat sampai Timur, dataran dibagian tengah dan Selatan sampai cekungan berada di bagian Tenggara. Sepengetahuan saya kondisi curah hujan di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Jenis vegetasi juga sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras dimanfaatkan di lahan budidaya dan sebagian dari tanaman keras di tanam di lahan kritis. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolaannya berada di Perum Perhutani”
8. ”Sebagian dari masyarakat sudah sadar akan kondisi lingkungan yang ada, sedangkan sebagian lagi masih belum seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung”

9. "Setahu saya, frekuensi tanah longsor terjadi hampir tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan dengan skala kecil"
10. "Sepengetahuan saya, kegiatan penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas"

Nomor Catatan 04

Nama : Ir. Djunaedi, MT
 Jabatan : Kepala Bidang Geologi
 Instansi : Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
 Waktu : Selasa, 07 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan yang mendasari penataan ruang setahu saya adalah untuk mengatur pembangunan yang akan dilaksanakan agar serasi, selaras dan seimbang"
2. "Belum, sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda akan melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang"
3. "Masih dijumpainya penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga berupa permukiman, pengolahan sawah dan kebun/tegalan yang berada di daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman, sedangkan usaha preventif dilaksanakan oleh dinas terkait termasuk didalamnya Dinas ESDM dengan sosialisasi di daerah rawan tanah longsor"
4. "Secara spesifik belum ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan penataan ruang pada daerah rawan bencana, kegiatan sudah banyak dilaksanakan oleh berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang kejadian tanah longsor dan upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor setelah ditentukannya kawasan rawan bencana tanah longsor"
5. "Tahapan yang akan dilakukan dalam penataan ruang di daerah rawan tanah longsor antara lain dengan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah wilayah dan Perum Perhutani dalam rangka menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan

bencana, sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui poster dan leaflet”

6. ”Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi karena mengingat tingkat kerawanan daerah tersebut terhadap bencana tanah longsor. Sedangkan pelaksanaan pembangunan di lokasi dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan terutama pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana dalam rangka untuk mitigasi bencana tanah longsor”
7. ”Kondisi fisik alam yang ada di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, mulai dari cekungan di bagian Tenggara sampai pegunungan di bagian Utara. Sedangkan dari batuan penyusunnya, wilayah Banyumas tersusun atas litologi dari Formasi Rambatan (Tmr), Formasi Halang (Tmph), Formasi Tapak (Tpt), Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) dan Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls). Desa Gununglurah secara fisik tersusun atas pegunungan sampai dengan kaki pegunungan dengan relief sedang sampai kasar. Litologi yang ada berupa Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) yang tersusun atas breksi gunungapi, tufa dan lapisan lava serta Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls) yang tersusun atas perlapisan lahar dan lava. Secara umum litologi tersebut cukup resisten dalam keadaan *fresh* (segar), namun karena curah hujan sangat tinggi yaitu antara 3500 – 5000 mm/tahun, maka tingkat pelapukan disana cukup tinggi sehingga tufa dan endapan lahar menjadi lemah, lapuk sampai dengan sekitar 10 m dan sangat berpotensi untuk terjadinya gerakan tanah. Curah hujan yang tinggi dan adanya aktivitas masyarakat yang memotong lereng untuk kepentingan budidaya khususnya permukiman dan pengolahan sawah akan menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani sebagian berupa pinus dan damar”
8. ”Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti memotong lereng untuk kegiatan permukiman bahkan masih ada sebagian masyarakat yang mengolah sawah dan beternak ikan di daerah atas. Sedangkan di luar Gununglurah banyak industri pengolahan kayu, hal ini akan sangat mempengaruhi masyarakat sekitar karena sebagian masyarakat tersebut akan ikut mensuplai bahan baku kayu kepada industri tersebut”
9. ”Berdasar laporan yang masuk dan inventarisasi yang dilakukan frekuensi kejadian tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini, dan terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Berdasarkan pengamatan di lapangan kejadian tanah longsor yang ada termasuk dalam skala kecil dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa”

10. "Mitigasi bencana tanah longsor terbagi menjadi 3 tahap. Sebelum kejadian dilakukan pendataan, identifikasi, pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor, bantuan teknologi mitigasi kepada masyarakat, early warning system yang berupa pemasangan *extensometer* untuk mendeteksi perubahan rekahan yang ada dan *tiltmeter* untuk mendeteksi deformasi gerakan tanah, pemantauan curah hujan secara *realtime* berbasis seluler yang dipancarkan ke Balai SABO Yogyakarta, Satlak PBP Kabupaten Banyumas dan Kepala Dinas ESDM. Pada saat bencana dilakukan evakuasi korban dan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh Satlak PBP. Sedangkan kegiatan pasca bencana berupa rekonstruksi, rehabilitasi dan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang"

Nomor Catatan 05

Nama : Sudiyono, SH
 Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
 Instansi : Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
 Waktu : Senin, 13 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan untuk pengaturan di kota Cilongok sendiri menggunakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 1995 tentang RUTRK/RDTRK Ibukota Kecamatan Cilongok. Adapun yang mendasari penataan ruang setahu saya adalah untuk mengatur pembangunan agar serasi, selaras, seimbang dan dapat berkelanjutan"
2. "Sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas setahu saya masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Bappeda akan melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang"
3. "Secara eksisting masih dijumpainya penyimpangan dari rencana tata ruang yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga berupa permukiman. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang"
4. "Kegiatan yang dilaksanakan di daerah rawan longsor berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya resiko tanah longsor dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor. Kegiatan ini

dilaksanakan oleh dinas terkait dari kabupaten, termasuk dari petugas kecamatan maupun dari masing-masing perangkat desa”

5. ”Tahapan yang akan dilakukan setahu saya berupa menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan masyarakat dan survey lapangan yang dilaksanakan oleh dinas dari kabupaten”
6. ”Pembangunan harus menyentuh dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kebutuhan pembangunan di daerah rawan tanah longsor, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan tidak mengganggu lingkungan, saya pikir hal tersebut dapat dilaksanakan. Lebih-lebih pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengurangi resiko bencana tanah longsor”
7. ”Wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai kondisi alam yang sangat bervariasi, sedangkan untuk wilayah Desa Gununglurah terdiri dari pegunungan, kaki gunung dan dataran di bagian Selatan Desa Gununglurah. Curah hujan yang ada di Kecamatan Cilongok cukup tinggi lebih-lebih desa yang berada di lereng Gunung Slamet termasuk di Gununglurah, hal ini karena adanya Gunung Slamet. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani di lereng-lereng Gunung Slamet”
8. ”Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah yang rawan terhadap tanah longsor sehingga warga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti *repek* (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung”
9. ”Berdasarkan laporan yang masuk, frekuensi kejadian tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini. Kejadian tanah longsor menurut data terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Namun Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa”
10. ”Penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas dan pihak Kecamatan Cilongok”

Nomor Catatan 06

Nama : Hj. Muzayanatul A., SH
 Jabatan : Kepala Desa Gununglurah
 Instansi : Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
 Waktu : Rabu, 15 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Setahu saya secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hal itu disusun untuk mengatur pembangunan yang akan dilaksanakan agar serasi, selaras, seimbang dan dapat berkelanjutan"
2. "Saya belum begitu tahu, menurut saya sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang karena Perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas ditetapkan pada tahun 2005. Saya yakin kalo secepatnya pemerintah kabupaten akan menyesuaikan dengan undang-undang yang baru"
3. "Secara kenyataan masih dijumpainya banyak penggunaan yang dikelola sebagai sawah, kebun/tegalan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga maupun berupa permukiman di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah rawan tanah longsor. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal oleh pemerintah kabupaten melalui kecamatan"
4. "Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembuatan peta kawasan lindung dan peta kawasan rawan bencana tanah longsor dan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya resiko tanah longsor dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas terkait dari kabupaten, termasuk dari petugas kecamatan maupun dari masing-masing perangkat desa"
5. "Tahapan yang sudah dilakukan setahu saya berupa menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana dan survey lapangan yang dilaksanakan oleh dinas dari kabupaten"
6. "Sepanjang pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di daerah rawan dan tidak terlalu mengganggu keseimbangan lingkungan, usulan masyarakat di daerah rawan dapat diakomodir dan dilaksanakan, lebih-lebih pelaksanaan pembangunan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor"
7. "Wilayah Kecamatan Cilongok mempunyai kondisi alam yang sangat bervariasi, sedangkan untuk wilayah Desa Gununglurah terdiri dari pegunungan di bagian Utara, kaki gunung di tengah dan dataran di bagian

Selatan Desa Gununglurah. Sebagian besar curah hujan yang ada di lereng Gunung Slamet cukup tinggi termasuk Desa Gununglurah. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani di lereng-lereng Gunung Slamet”

8. ”Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah rawan tanah longsor sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras di lahan masing-masing yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti *repek* (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung”
9. ”Berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi, frekuensi kejadian tanah longsor di Desa Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini. Kejadian tanah longsor terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan walaupun dimensinya tidak begitu besar. Namun Alhamdulillah sampai saat ini bencana tanah longsor tersebut tidak menelan korban jiwa”
10. ”Penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas dan pihak Kecamatan Cilongok”

Nomor Catatan 07

Nama : Suhartono, BA. (Ketua BPD)
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Alamat : RT 05 / RW I (Grumbul Karangklesem)
 Waktu : Rabu, 15 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. ”Tingkat pendidikan masyarakat Gununglurah 80 % tidak tamat SD dan tamat SD, selebihnya sekolah menengah dan hanya beberapa masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi”
2. ”Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Berkaitan dengan pendapatan dari 1996 KK yang ada, sekitar 52 % masyarakat di Desa Gununglurah termasuk keluarga pra sejahtera dan 18 % keluarga sejahtera 1, selebihnya yaitu 30 % termasuk keluarga sejahtera 2”
3. ”Di pusat kotanya Gununglurah sudah cukup mahal, namun di banyak tempat masih sangat murah”
4. ”Sebagian besar lahan di kota dimanfaatkan sebagai permukiman, sedangkan dipinggiran digunakan sebagai sawah, dan kebun/tegalan. Di sebelah Utara sebagian besar digunakan sebagai kebun/tegalan dan berupa hutan rakyat dan hutan produksi milik Perum Perhutani. Penggunaan lahan disini sebagian

besar dipengaruhi karena faktor turun temurun dan keterbatasan kepemilikan lahan. Sedangkan sebagian kecil dikarenakan ketersediaan air yang melimpah dan udara yang masih bersih”

5. ”Masyarakat mengetahui kerawanan tanah longsor di daerah ini setelah adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas terkait dari kabupaten, petugas kecamatan serta perangkat desa. Beragam tanggapan yang muncul di masyarakat, namun sebagian besar merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor apalagi masih adanya masyarakat penjual kayu bakar tapi masyarakat tetap bersikukuh karena hanya mempunyai lahan disitu. Sebagian besar dari masyarakat melakukan penanaman tanaman keras bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas di lahan yang mereka punya”
6. ”Gotong royong masih berjalan baik dengan menggunakan mediasi kentongan, demikian pula kalau masyarakat setempat mempunyai hajat. Namun sekarang kegiatan gotong royong sedikit mengalami kemunduran karena imbas dari program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Program Padat Karya beberapa tahun yang lalu, apalagi sekarang ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak seluruh masyarakat Gununglurah menjadi sasaran dari program tersebut”
7. ”Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak pemerintah kabupaten. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa yang dihadiri oleh petugas kecamatan dan perangkat desa. Sebetulnya kegiatan tersebut cukup membantu menyadarkan masyarakat, namun agar lebih efektif perlu dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di lokasi rawan tanah longsor”

Nomor Catatan 08

Nama : Ahmad Daldiri (Komandan Peleton Linmas Desa Gununglurah)
 Pekerjaan : Kepala Dusun III
 Alamat : RT 05 / RW IX (Grumbul Gununglurah)
 Waktu : Selasa, 21 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. ”Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat disini adalah SR atau SD”
2. ”Sebagian besar masyarakat disini berprofesi sebagai petani dan buruh. Pendapatan mereka sebagai buruh dan dari pertanian masih rendah”
3. ”Lahan disini mempunyai harga rendah sampai sedang”
4. ”Pemanfaatan lahan sebagian besar di daerah ini berupa permukiman, sawah dan kebun/tegalan sedangkan dibagian atas merupakan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena lahan yang dibudidayakan

merupakan lahan yang hanya dimiliki dan karena faktor turun temurun serta kekerabatan”

5. ”Masyarakat mengetahui bahwa Desa Gununglurah merupakan daerah rawan longsor dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, sedangkan sebagian mengetahui setelah adanya kejadian tanah longsor yang terjadi hampir tiap tahun. Dalam menanggapi hal tersebut sebagian besar merasa khawatir khususnya masyarakat yang berada di lokasi tanah longsor, namun mereka masih tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lahan yang mereka sendiri dengan meningkatkan dan memahami gejala alam yang ada khususnya pada musim penghujan”
6. ”Kehidupan sosial kemasyarakatan di Gununglurah masih cukup tinggi, hal ini tercermin dalam kegiatan gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat setempat, media komunikasi berupa kentongan. Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan Langsung Tunai (BLT) membuat kecemburuan pada sebagian masyarakat yang merasa tidak mampu namun tidak menjadi sasaran program, hal ini menjadikan kegiatan gotong royong tidak seramai sebelum ada program tersebut”
7. ”Sosialisasi pernah dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dari beberapa desa yang dianggap rawan longsor untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak dinas terkait dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa. Hal itu cukup membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi Desa Gununglurah yang rawan terhadap longsor. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah khususnya yang bermukim di daerah yang sangat rawan tanah longsor”

Nomor Catatan 09

Nama : Ali Sahrudin (Ketua RW IV)
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : RT 01 / RW IV (Grumbul Pesawahan)
 Waktu : Sabtu, 18 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. ”Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Gununglurah hanya tamat SD, sebagian lagi tidak tamat SD”
2. ”Mata pencaharian masyarakat disini sebagian besar adalah buruh, yaitu buruh tani dan buruh penderes kelapa. Tingkat pendapatan dari pekerjaan buruh masih rendah”
3. ”Harga lahan yang ada disini rendah”

4. "Penggunaan lahan sebagian besar di daerah ini berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena keturunan dan keterbatasan lahan yang dimiliki"
5. "Kami mengetahui Desa Gunungkurah merupakan daerah rawan tanah longsor dari petugas kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Karena di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor dan sudah terbiasa hidup disini, maka sebagian besar masyarakat disini tidak khawatir"
6. "Kegiatan gotong royong masih berjalan, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat sekitar melalui alat berupa kentongan"
7. "Kami bersama dengan masyarakat dari wilayah lain diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan-pertemuan rutin. Sudah cukup membantu memberi informasi, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu diseringkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah yang bermukim di daerah rawan tanah longsor"

Nomor Catatan 10

Nama : Maslah (Ketua RW V)
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : RT 02 / RW V (Grumbul Krinjing)
 Waktu : Selasa, 21 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Sebagian besar hanya tamatan SD, bahkan banyak pula yang tidak lulus SD"
2. "Sebagian besar masyarakat berpenghasilan dari buruh tani dan buruh penderes kelapa. Penghasilan masyarakat sebagai buruh masih rendah"
3. "Harga lahan yang ada bawah cukup tinggi sehingga kami tetap berada disini karena tidak mampu membeli lahan yang agak aman"
4. "Sebagian besar di daerah ini berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik perhutani, dibeberapa tempat yang lain ada pemanfaatan sebagai sawah dan kolam ikan. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena sudah turun temurun dan keterbatasan lahan yang dimiliki"
5. "Kami tahu kalau Desa Gununglurah adalah daerah rawan tanah longsor dari pegawai kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Kami sudah terbiasa hidup disini dan di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor, maka sebagian besar dari kami tidak khawatir"

6. "Disini gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat disini melalui alat kantong sebagai tanda kumpul"
7. "Bersama dengan warga RW lain, kami diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan-pertemuan rutin. Pemberitahuan tersebut cukup membantu memberi informasi, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat yang bermukim di daerah rawan tanah longsor"

Nomor Catatan 11

Nama : Yasmidi (Ketua RT 03 / RW IV)
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : RT 03 / RW IV (Grumbul Bumi wastu)
 Waktu : Sabtu, 18 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. "Tingkat pendidikan yang ada adalah hanya tamat SD dan tidak tamat SD"
2. "Pekerjaan masyarakat disini sebagian besar adalah buruh, yaitu buruh tani dan buruh penderes kelapa dan sebagian lagi mengolah kebun/tegalan. Pendapatan mereka masih rendah dan belum dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari"
3. "Harga lahan yang ada disini masih rendah sedangkan yang dibawah sudah cukup tinggi"
4. "Lahan yang ada di daerah ini sebagian besar berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik pemerintah. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena sudah lama dan turun temurun serta lahan yang ada hanya ini"
5. "Masyarakat disini mengetahui Desa Gunungkurah merupakan daerah rawan tanah longsor dari pegawai kecamatan dan pamong desa pada saat melakukan sosialisasi. Kami sudah terbiasa hidup disini dan daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor, maka sebagian masyarakat disini tidak khawatir"
6. "Gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan grumbul ataupun keperluan masyarakat sini melalui alat berupa kantong sebagai tanda untuk berkumpul"
7. "Sebagian masyarakat bersama dengan masyarakat dari wilayah lain diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan rutin yang sering dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut sudah cukup membantu, namun

masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah yang bermukim di daerah rawan tanah longsor”

Nomor Catatan 12

Nama : Haji Siswato (Toga)
 Pekerjaan : Pamong Desa
 Alamat : RT 01 / RW X (Grumbul Bojongkidul)
 Waktu : Kamis, 23 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. ”Tingkat pendidikan masyarakat Gununglurah masih cukup memprihatinkan, sebagian besar hanya tamat SD dan tidak tamat SD, selebihnya lulusan sekolah menengah dan sebagian kecil dapat menyelesaikan pendidikan tinggi”
2. ”Mata pencaharian masyarakat sebagaian besar adalah petani dan buruh tani, baik buruh tani sawah ataupun buruh penderes kelapa. Tingkat pendapatan rata-rata dari sebagian besar masyarakat di Gununglurah tergolong masih rendah”
3. ”Harga lahan yang ada di Gununglurah tergolong rendah sampai sedang dibanding dengan harga lahan yang ada di kota kecamatan. Harga lahan rendah terdapat pada daerah atas, sedangkan di daerah bawah harganya jauh lebih tinggi dari daerah atas”
4. ”Pemanfaatan lahan yang ada sebagian besar berupa hutan negara milik perhutani, sebagian lagi berupa pemanfaatan sebagai sawah, kebun/tegalan dan permukiman. Menurut pendapat saya pemanfaatan lahan yang ada disebabkan karena faktor turun temurun dan keterbatasan lahan untuk ditempati dan budidayakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari”
5. ”Masyarakat mengetahui daerah ini merupakan daerah rawan longsor dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta setelah adanya kejadian tanah longsor yang terjadi tiap tahun. Masyarakat menanggapi hal tersebut sebagian besar merasa takut dan khawatir khususnya masyarakat yang berada di lokasi tanah longsor, namun mereka masih tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari di lahan yang mereka punya dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala alam yang ada khususnya pada musim penghujan”
6. ”Kehidupan sosial kemasyarakatan di Gununglurah masih cukup tinggi, hal ini tercermin dalam kegiatan gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat setempat, media komunikasi berupa kentongan”
7. ”Sosialisasi dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan. Pernah pula

dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa. Hal tersebut cukup membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kerawanan terhadap longsor di Desa Gununglurah, namun frekuensi kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah khususnya yang bermukim di daerah rawan tanah longsor”

Nomor Catatan 13

Nama : Burhan (Tokoh Pemuda)
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : RT 02 / RW VII (Grumbul Munggangwuni)
 Waktu : Kamis, 23 Oktober 2008

Hasil wawancara:

1. ”Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Gununglurah tidak tamat SD dan tamat SD, selebihnya sekolah menengah keatas”
2. ”Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani disusul dengan buruh industri dan bangunan. Sedangkan pendapatan masyarakat Gununglurah termasuk masih rendah”
3. ”Sebagian besar harga lahan yang ada disini masih relatif rendah khususnya lahan yang berada di bagian Utara desa, namun harga lahan di pusat kota Gununglurah sudah termasuk tinggi”
4. ”Sebagian besar lahan berupa hutan khususnya yang berada disebelah atas, sebagian lagi berupa sawah dan kebun/tegalan. Di kota dan dibeberpa tempat penggunaan lahan dalam bentuk permukiman. Pemanfaatan lahan disini sebagian besar karena faktor turun temurun dan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat”
5. ”Masyakat tahun adanya kerawanan tanah longsor di Gununglurah ini setelah adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas dari pemerintah kabupaten, petugas kecamatan dan perangkat desa. Dalam menanggapi hal tersebut, sebagian besar merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor apalagi adanya kegiatan repek dari masyarakat di daerah atas tapi masyarakat tetap bersikukuh menetap di sini karena hanya mempunyai lahan disitu. Masyarakat sebagian besar melakukan penanaman tanaman keras bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas di lahan yang mereka masing-masing”
6. ”Budaya gotong royong masih berjalan baik dengan menggunakan mediasi alat tradisional berupa kentongan, demikian pula dengan masyarakat setempat yang mempunyai hajatan. Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Program Padat Karya yang pernah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, apalagi dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekarang ini, kegiatan gotong royong sedikit mengalami kemunduran karena yang tidak seluruh masyarakat Gununglurah menjadi sasaran dari program tersebut”

7. ”Setahu saya kegiatan sosialisasi dilaksanakan di pendopo kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kabupaten. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa yang dihadiri oleh petugas kecamatan dan perangkat desa. Pada dasarnya kegiatan tersebut cukup membantu untuk menyadarkan masyarakat, namun agar lebih efektif perlu dilakukan sosialisasi langsung secara intensif kepada masyarakat di lokasi rawan tanah longsor”

LAMPIRAN C

TABEL KARTU INDEKS

NO	CUPLIKAN DATA / SATUAN INFORMASI	KODE
1	2	3
1	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya, antara lain: budidaya lahan basah, budidaya lahan kering, budidaya hutan produksi dan budidaya hutan terbatas. Sedangkan maksud dari penetapan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terseleenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Adapun targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan	KPR.W.01.01
2	Belum, sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sedangkan pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, pemberian punishment and reward dan penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum tentang penyimpangan Rencana Tata Ruang	KPR.W.01.02
3	Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman	KPR.W.01.03
4	Secara spesifik belum ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan penataan ruang pada daerah rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan akan ditetapkan kawasan rawan bencana termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor	KPB.W.01.04
5	Tahapan yang akan dilakukan antara lain dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan-pemetaan daerah yang mempunyai kerawanan terhadap bencana, laporan masyarakat dan survey lapangan	KPB.W.01.05
6	Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan termasuk pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana	KPB.W.01.06
7	Berdasarkan data yang ada wilayah Kabupaten Banyumas tersusun atas pergunungan di bagian Utara, perbukitan membentang mulai di bagian Barat sampai Timur, dataran rendah dibagian tengah dan Telatan dan cekungan berada di bagian Tenggara. Curah hujan yang ada di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolannya berada di Perum Perhutani	KFL.W.01.07
8	Sebagian masyarakat sudah sadar akan lingkungan, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.01.08
9	Berdasarkan laporan dan pendataan yang ada, frekuensi tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Namun sampai saat ini, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa	KFL.W.01.09

10	Penanganan bencana dilaksanakan oleh Sallak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian dengan sekretariat di Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	KPB.W.01.10
11	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya. Maksud dari penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Adapun targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan	KPR.W.02.01
12	Sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, pemberian reward and punishment dan penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum terhadap penyimpangan dari Rencana Tata Ruang	KPR.W.02.02
13	Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan menggunakan instrumen perangkat hukum Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, Perda tentang 43 Tahun 1995 tentang IKK Cilongok dan perda tentang teknis bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman khususnya kegiatan perekonomian	KPR.W.02.03
14	Secara umum dalam RTRW baru menentukan kawasan rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas akan ditetapkan kawasan rawan bencana dengan pengaturan pemanfaatan lahannya termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor	KPB.W.02.04
15	Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan dari masyarakat dan survey lapangan	KPB.W.02.05
16	Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada kawasan rawan bencana, sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan	KPB.W.02.06
17	Kondisi alam di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, antara lain pegunungan di bagian Utara, perbukitan di bagian Barat sampai Timur, dataran dibagian tengah dan Selatan dan cekungan berada di bagian Tenggara. Sepengetahuan saya kondisi curah hujan di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolannya berada di Perum Perhutani	KFL.W.02.07
18	Sebagian masyarakat sudah sadar akan kondisi lingkungan yang ada, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.02.08
19	Berdasarkan yang saya tahu, frekuensi tanah longsor terjadi hampir tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan dengan skala kecil	KFL.W.02.09
20	Setahu saya untuk penanganan bencana dilaksanakan oleh Sallak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas	KPB.W.02.10
21	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya. Maksud dari penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Sedangkan	KPR.W.03.01

	targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan	
22	Sebagian besar perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada Tahun Anggaran 2008 ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum terhadap penyimpangan dari Rencana Tata Ruang	KPR.W.03.02
23	Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat guna pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggunakan instrumen peragkat hukum Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, Perda tentang 43 Tahun 1995 tentang IKK Cilongok dan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman	KPR.W.03.03
24	Secara umum dalam rencana tata ruang yang ada baru menentukan kawasan rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas akan ditetapkan kawasan rawan bencana dengan pengaturan pemanfaatan lahannya termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor	KPB.W.03.04
25	Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan dari masyarakat dan pelaksanaan survey lapangan	KPB.W.03.05
26	Sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan, termasuk di daerah rawan bencana	KPB.W.03.06
27	Fisik alam yang ada di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, mulai dari pegunungan di bagian Utara, perbukitan di bagian Barat sampai Timur, dataran dibagian tengah dan Selatan sampai cekungan berada di bagian Tenggara. Sepengetahuan saya kondisi curah hujan di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Jenis vegetasi juga sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras dimanfaatkan di lahan budidaya dan sebagian dari tanaman keras di tanam di lahan kritis. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolaannya berada di Perum Perhutani	KFL.W.03.07
28	Sebagian dari masyarakat sudah sadar akan kondisi lingkungan yang ada, sedangkan sebagian lagi masih belum seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.03.08
29	Setahu saya, frekuensi tanah longsor terjadi hampir tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan dengan skala kecil	KFL.W.03.09
30	Sepengetahuan saya, kegiatan penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas	KPB.W.03.10
31	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan yang mendasari penataan ruang setahu saya adalah untuk mengatur pembangunan yang akan dilaksanakan agar serasi, selaras dan seimbang	KPR.W.04.01
32	Belum, sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda akan melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	KPR.W.04.02
33	Masih dijumpainya penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga berupa permukiman, pengolahan sawah dan kebun/tegalan yang berada di daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman, sedangkan usaha preventif dilaksanakan oleh dinas terkait termasuk didalamnya Dinas ESDM dengan	KPR.W.04.03

	sosialisasi di daerah rawan tanah longsor	
34	Secara spesifik belum ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan penataan ruang pada daerah rawan bencana, kegiatan sudah banyak dilaksanakan oleh berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang kejadian tanah longsor dan upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor setelah ditentukannya kawasan rawan bencana tanah longsor	KPB.W.04.04
35	Tahapan yang akan dilakukan dalam penataan ruang di daerah rawan tanah longsor antara lain dengan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah wilayah dan Perum Perhutani dalam rangka menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui poster dan leaflet	KPB.W.04.05
36	Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi karena mengingat tingkat kerawanan daerah tersebut terhadap bencana tanah longsor. Sedangkan pelaksanaan pembangunan di lokasi dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan terutama pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana dalam rangka untuk mitigasi bencana tanah longsor	KPB.W.04.06
37	Kondisi fisik alam yang ada di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, mulai dari cekungan di bagian Tenggara sampai pegunungan di bagian Utara. Sedangkan dari batuan penyusunnya, wilayah Banyumas tersusun atas litologi dari Formasi Rambatan (Tmr), Formasi Halang (Tmph), Formasi Tapak (Tpt), Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) dan Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls). Desa Gununglurah secara fisik tersusun atas pegunungan sampai dengan kaki pegunungan dengan relief sedang sampai kasar. Litologi yang ada berupa Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) yang tersusun atas breksi gunungapi, tufa dan lapisan lava serta Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls) yang tersusun atas perlapisan lahar dan lava. Secara umum litologi tersebut cukup resisten dalam keadaan <i>fresh</i> (segar), namun karena curah hujan sangat tinggi yaitu antara 3500 – 5000 mm/tahun, maka tingkat pelapukan disana cukup tinggi sehingga tufa dan endapan lahar menjadi lemah, lapuk sampai dengan sekitar 10 m dan sangat berpotensi untuk terjadinya gerakan tanah. Curah hujan yang tinggi dan adanya aktivitas masyarakat yang memotong lereng untuk kepentingan budidaya khususnya permukiman dan pengolahan sawah akan menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani sebagian berupa pinus dan damar	KFL.W.04.07
38	Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti memotong lereng untuk kegiatan permukiman bahkan masih ada sebagian masyarakat yang mengolah sawah dan beternak ikan di daerah atas. Sedangkan di luar Gununglurah banyak industri pengolahan kayu, hal ini akan sangat mempengaruhi masyarakat sekitar karena sebagian masyarakat tersebut akan ikut mensuplai bahan baku kayu kepada industri tersebut	PKL.W.04.08
39	Berdasar laporan yang masuk dan inventarisasi yang dilakukan frekuensi kejadian tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini, dan terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Berdasarkan pengamatan di lapangan kejadian tanah longsor yang ada termasuk dalam skala kecil dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa	KFL.W.04.09
40	Mitigasi bencana tanah longsor terbagi menjadi 3 tahap. Sebelum kejadian dilakukan pendataan, identifikasi, pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor, bantuan teknologi mitigasi kepada masyarakat, <i>early warning system</i> yang berupa pemasangan <i>extensometer</i> untuk mendeteksi perubahan rekahan yang ada dan <i>tillimeter</i> untuk mendeteksi deformasi gerakan tanah, pemantauan curah hujan secara <i>realtime</i> berbasis seluler yang dipancarkan ke Balai SABO Yogyakarta, Satlak PBP Kabupaten Banyumas dan Kepala Dinas ESDM. Pada saat bencana dilakukan evakuasi korban dan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh Satlak PBP. Sedangkan kegiatan pasca bencana berupa rekonstruksi, rehabilitasi dan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	KPB.W.04.10
41	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan untuk pengaturan di kota Cilongok sendiri menggunakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 1995 tentang RUTRK/RDTRK Ibukota Kecamatan Cilongok. Adapun yang mendasari penataan ruang setahu saya adalah untuk mengatur pembangunan agar serasi, selaras, seimbang dan dapat berkelanjutan	KPR.W.05.01
42	Sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas setahu saya masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Bappeda akan melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang	KPR.W.05.02

	Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	
43	Secara eksisting masih dijumpainya penyimpangan dari rencana tata ruang yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga berupa permukiman. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	KPR.W.05.03
44	Kegiatan yang dilaksanakan di daerah rawan longsor berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya resiko tanah longsor dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas terkait dari kabupaten, termasuk dari petugas kecamatan maupun dari masing-masing perangkat desa	KPB.W.05.04
45	Tahapan yang akan dilakukan selanjutnya berupa menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan masyarakat dan survey lapangan yang dilaksanakan oleh dinas dari kabupaten	KPB.W.05.05
46	Pembangunan harus menyentuh dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kebutuhan pembangunan di daerah rawan tanah longsor, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan tidak mengganggu lingkungan, saya pikir hal tersebut dapat dilaksanakan. Lebih-lebih pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengurangi resiko bencana tanah longsor	KPB.W.05.06
47	Wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai kondisi alam yang sangat bervariasi, sedangkan untuk wilayah Desa Gununglurah terdiri dari pegunungan, kaki gunung dan dataran di bagian Selatan Desa Gununglurah. Curah hujan yang ada di Kecamatan Cilongok cukup tinggi lebih-lebih desa yang berada di lereng Gunung Slamet termasuk di Gununglurah, hal ini karena adanya Gunung Slamet. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani di lereng-lereng Gunung Slamet	KFL.W.05.07
48	Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah yang rawan terhadap tanah longsor sehingga warga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti repek (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.05.08
49	Berdasarkan laporan yang masuk, frekuensi kejadian tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini. Kejadian tanah longsor menurut data terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Namun Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa	KFL.W.05.09
50	Penanganan bencana dilaksanakan oleh Sattak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas dan pihak Kecamatan Cilongok	KPB.W.05.10
51	Setahu saya secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hal itu disusun untuk mengatur pembangunan yang akan dilaksanakan agar serasi, selaras, seimbang dan dapat berkelanjutan	KPR.W.06.01
52	Saya belum begitu tahu, menurut saya sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang karena Perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas ditetapkan pada tahun 2005. Saya yakin kalo secepatnya pemerintah kabupaten akan menyesuaikan dengan undang-undang yang baru	KPR.W.06.02
53	Secara kenyataan masih dijumpainya banyak penggunaan yang dikelola sebagai sawah, kebun/tegalan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga maupun berupa permukiman di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah rawan tanah longsor. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal oleh pemerintah kabupaten melalui kecamatan	KPR.W.06.03
54	Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembuatan peta kawasan lindung dan peta kawasan rawan bencana tanah longsor dan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya resiko tanah longsor dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas terkait dari kabupaten, termasuk dari petugas kecamatan maupun dari masing-masing perangkat desa	KPB.W.06.04
55	Tahapan yang sudah dilakukan selanjutnya berupa menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana dan survey lapangan yang dilaksanakan oleh dinas dari kabupaten	KPB.W.06.05

56	Sepanjang pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di daerah rawan dan tidak terlalu mengganggu keseimbangan lingkungan, usulan masyarakat di daerah rawan dapat diakomodir dan dilaksanakan, lebih-lebih pelaksanaan pembangunan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor	KPB.W.06.06
57	Wilayah Kecamatan Cilongok mempunyai kondisi alam yang sangat bervariasi, sedangkan untuk wilayah Desa Gununglurah terdiri dari pegunungan di bagian Utara, kaki gunung di tengah dan dataran di bagian Selatan Desa Gununglurah. Sebagian besar curah hujan yang ada di lereng Gunung Slamet cukup tinggi termasuk Desa Gununglurah. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani di lereng-lereng Gunung Slamet	KFL.W.06.07
58	Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah rawan tanah longsor sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras di lahan masing-masing yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti repek (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.06.08
59	Berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi, frekuensi kejadian tanah longsor di Desa Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini. Kejadian tanah longsor terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan walaupun dimensinya tidak begitu besar. Namun Alhamdulillah sampai saat ini bencana tanah longsor tersebut tidak menelan korban jiwa	KFL.W.06.09
60	Penanganan bencana dilaksanakan oleh Sattak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas dan pihak Kecamatan Cilongok	KPB.W.06.10
61	Tingkat pendidikan masyarakat Gununglurah 80 % tidak tamat SD dan tamat SD, selebihnya sekolah menengah dan hanya beberapa masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi	TSE.W.07.01
62	Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Berkaitan dengan pendapatan dari 1996 KK yang ada, sekitar 52 % masyarakat di Desa Gununglurah termasuk keluarga pra sejahtera dan 18 % keluarga sejahtera 1, selebihnya yaitu 30 % termasuk keluarga sejahtera 2	TSE.W.07.02
63	Di pusat kotanya Gununglurah sudah cukup mahal, namun di banyak tempat masih sangat murah	TSE.W.07.03
64	Sebagian besar lahan di kota dimanfaatkan sebagai permukiman, sedangkan dipinggiran digunakan sebagai sawah, dan kebun/tegalan. Di sebelah Utara sebagian besar digunakan sebagai kebun/tegalan dan berupa hutan rakyat dan hutan produksi milik Perum Perhutani. Penggunaan lahan disini sebagian besar dipengaruhi karena faktor turun temurun dan keterbatasan kepemilikan lahan. Sedangkan sebagian kecil dikarenakan ketersediaan air yang melimpah dan udara yang masih bersih	TSE.W.07.04
65	Masyarakat mengetahui kerawanan tanah longsor di daerah ini setelah adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas terkait dari kabupaten, petugas kecamatan serta perangkat desa. Beragam tanggapan yang muncul di masyarakat, namun sebagian besar merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor apalagi masih adanya masyarakat penjual kayu bakar tapi masyarakat tetap bersikukuh karena hanya mempunyai lahan disitu. Sebagian besar dari masyarakat melakukan penanaman tanaman keras bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas di lahan yang mereka punya	PKL.W.07.05
66	Gotong royong masih berjalan baik dengan menggunakan mediasi kentongan, demikian pula kalau masyarakat setempat mempunyai hajat. Namun sekarang kegiatan gotong royong sedikit mengalami kemunduran karena imbas dari program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Program Padat Karya beberapa tahun yang lalu, apalagi sekarang ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak seluruh masyarakat Gununglurah menjadi sasaran dari program tersebut	TSM.W.07.06
67	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak pemerintah kabupaten. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa yang dihadiri oleh petugas kecamatan dan perangkat desa. Sebetulnya kegiatan tersebut cukup membantu menyadarkan masyarakat, namun agar lebih efektif perlu dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di lokasi rawan tanah longsor	PKL.W.07.07
68	Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat disini adalah SR atau SD	TSE.W.08.01
69	Sebagian besar masyarakat disini berprofesi sebagai petani dan buruh. Pendapatan mereka sebagai buruh dan dari pertanian masih rendah	TSE.W.08.02
70	Lahan disini mempunyai harga rendah sampai sedang	TSE.W.08.03

71	Pemanfaatan lahan sebagian besar di daerah ini berupa permukiman, sawah dan kebun/tegalan sedangkan dibagian atas merupakan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena lahan yang dibudidayakan merupakan lahan yang hanya dimiliki dan karena faktor turun temurun serta kekerabatan	TSE.W.08.04
72	Masyarakat mengetahui bahwa Desa Gununglurah merupakan daerah rawan longsor dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, sedangkan sebagian mengetahui setelah adanya kejadian tanah longsor yang terjadi hampir tiap tahun. Dalam menanggapi hal tersebut sebagian besar merasa khawatir khususnya masyarakat yang berada di lokasi tanah longsor, namun mereka masih tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lahan yang mereka sendiri dengan meningkatkan dan memahami gejala alam yang ada khususnya pada musim penghujan	PKL.W.08.05
73	Kehidupan sosial kemasyarakatan di Gununglurah masih cukup tinggi, hal ini tercermin dalam kegiatan gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat setempat, media komunikasi berupa kentongan. Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan Langsung Tunai (BLT) membuat kecemburuan pada sebagian masyarakat yang merasa tidak mampu namun tidak menjadi sasaran program, hal ini menjadikan kegiatan gotong royong tidak seramai sebelum ada program tersebut	TSM.W.08.06
74	Sosialisasi pernah dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dari beberapa desa yang dianggap rawan longsor untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak dinas terkait dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa. Hal itu cukup membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi Desa Gununglurah yang rawan terhadap longsor. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah khususnya yang bermukim di daerah yang sangat rawan tanah longsor	PKL.W.08.07
75	Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Gununglurah hanya tamat SD, sebagian lagi tidak tamat SD	TSE.W.09.01
76	Mata pencaharian masyarakat disini sebagian besar adalah buruh, yaitu buruh tani dan buruh penderes kelapa. Tingkat pendapatan dari pekerjaan buruh masih rendah	TSE.W.09.02
77	Harga lahan yang ada disini rendah	TSE.W.09.03
78	Penggunaan lahan sebagian besar di daerah ini berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena keturunan dan keterbatasan lahan yang dimiliki	TSE.W.09.04
79	Kami mengetahui Desa Gununglurah merupakan daerah rawan tanah longsor dari petugas kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Karena di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor dan sudah terbiasa hidup disini, maka sebagian besar masyarakat disini tidak khawatir	PKL.W.09.05
80	Kegiatan gotong royong masih berjalan, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat sekitar melalui alat berupa kentongan	TSM.W.09.06
81	Kami bersama dengan masyarakat dari wilayah lain diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan-pertemuan rutin. Sudah cukup membantu memberi informasi, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu diseringkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah yang bermukim di daerah rawan tanah longsor	PKL.W.09.07
82	Sebagian besar hanya tamatan SD, bahkan banyak pula yang tidak lulus SD	TSE.W.10.01
83	Sebagian besar masyarakat berpenghasilan dari buruh tani dan buruh penderes kelapa. Penghasilan masyarakat sebagai buruh masih rendah	TSE.W.10.02
84	Harga lahan yang ada bawah cukup tinggi sehingga kami tetap berada disini karena tidak mampu membeli lahan yang agak aman	TSE.W.10.03
85	Sebagian besar di daerah ini berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik perhutani, di beberapa tempat yang lain ada pemanfaatan sebagai sawah dan kolam ikan. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena sudah turun temurun dan keterbatasan lahan yang dimiliki	TSE.W.10.04
86	Kami tahu kalau Desa Gununglurah adalah daerah rawan tanah longsor dari pegawai kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Kami sudah terbiasa hidup disini dan di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor, maka sebagian besar dari kami tidak khawatir	PKL.W.10.05

87	Disini gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat disini melalui alat kentongan sebagai tanda kumpul	TSM.W.10.06
88	Bersama dengan warga RW lain, kami diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan-pertemuan rutin. Pemberitahuan tersebut cukup membantu memberi informasi, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat yang bermukim di daerah rawan tanah longsor	PKL.W.10.07
89	Tingkat pendidikan yang ada adalah hanya tamat SD dan tidak tamat SD	TSE.W.11.01
90	Pekerjaan masyarakat disini sebagian besar adalah buruh, yaitu buruh tani dan buruh penderes kelapa dan sebagian lagi mengolah kebun/tegalan. Pendapatan mereka masih rendah dan belum dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari	TSE.W.11.02
91	Harga lahan yang ada disini masih rendah sedangkan yang dibawah sudah cukup tinggi	TSE.W.11.03
92	Lahan yang ada di daerah ini sebagian besar berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik pemerintah. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena sudah lama dan turun temurun serta lahan yang ada hanya ini	TSE.W.11.04
93	Masyarakat disini mengetahui Desa Gunungkurah merupakan daerah rawan tanah longsor dari pegawai kecamatan dan pamong desa pada saat melakukan sosialisasi. Kami sudah terbiasa hidup disini dan daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor, maka sebagian masyarakat disini tidak khawatir	PKL.W.11.05
94	Gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan grumbul ataupun keperluan masyarakat sini melalui alat berupa kentongan sebagai tanda untuk berkumpul	TSM.W.11.06
95	Sebagian masyarakat bersama dengan masyarakat dari wilayah lain diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan rutin yang sering dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut sudah cukup membantu, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah yang bermukim di daerah rawan tanah longsor	PKL.W.11.07
96	Tingkat pendidikan masyarakat Gununglurah masih cukup memprihatinkan, sebagian besar hanya tamat SD dan tidak tamat SD, selebihnya lulusan sekolah menengah dan sebagian kecil dapat menyelesaikan pendidikan tinggi	TSE.W.12.01
97	Mata pencaharian masyarakat sebagaian besar adalah petani dan buruh tani, baik buruh tani sawah ataupun buruh penderes kelapa. Tingkat pendapatan rata-rata dari sebagian besar masyarakat di Gununglurah tergolong masih rendah	TSE.W.12.02
98	Harga lahan yang ada di Gununglurah tergolong rendah sampai sedang dibanding dengan harga lahan yang ada di kota kecamatan. Harga lahan rendah terdapat pada daerah atas, sedangkan di daerah bawah harganya jauh lebih tinggi dari daerah atas	TSE.W.12.03
99	Pemanfaatan lahan yang ada sebagian besar berupa hutan negara milik perhutani, sebagian lagi berupa pemanfaatan sebagai sawah, kebun/tegalan dan permukiman. Menurut pendapat saya pemanfaatan lahan yang ada disebabkan karena faktor turun temurun dan keterbatasan lahan untuk ditempati dan budidayakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari	TSE.W.12.04
100	Masyarakat mengetahui daerah ini merupakan daerah rawan longsor dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta setelah adanya kejadian tanah longsor yang terjadi tiap tahun. Masyarakat menanggapi hal tersebut sebagian besar merasa takut dan khawatir khususnya masyarakat yang berada di lokasi tanah longsor, namun mereka masih tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari di lahan yang mereka punya dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala alam yang ada khususnya pada musim penghujan	PKL.W.12.05
101	Kehidupan sosial kemasyarakatan di Gununglurah masih cukup tinggi, hal ini tercermin dalam kegiatan gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat setempat, media komunikasi berupa kentongan	TSM.W.12.06
102	Sosialisasi dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa. Hal tersebut cukup membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kerawanan terhadap longsor di Desa Gununglurah, namun frekuensi kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah khususnya yang bermukim di daerah rawan tanah	PKL.W.12.07

	longsor	
103	Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Gununglurah tidak tamat SD dan tamat SD, selebihnya sekolah menengah keatas	TSE.W.13.01
104	Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani disusul dengan buruh industri dan bangunan. Sedangkan pendapatan masyarakat Gununglurah termasuk masih rendah	TSE.W.13.02
105	Sebagian besar harga lahan yang ada disini masih relatif rendah khususnya lahan yang berada di bagian Utara desa, namun harga lahan di pusat kota Gununglurah sudah termasuk tinggi	TSE.W.13.03
106	Sebagian besar lahan berupa hutan khususnya yang berada disebelah atas, sebagian lagi berupa sawah dan kebun/tegalan. Di kota dan di beberapa tempat penggunaan lahan dalam bentuk permukiman. Pemanfaatan lahan disini sebagian besar karena faktor turun temurun dan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat	TSE.W.13.04
107	Masyarakat tahun adanya kerawanan tanah longsor di Gununglurah ini setelah adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas dari pemerintah kabupaten, petugas kecamatan dan perangkat desa. Dalam menanggapi hal tersebut, sebagian besar merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor apalagi adanya kegiatan repek dari masyarakat di daerah atas tapi masyarakat tetap bersikukuh menetap di sini karena hanya mempunyai lahan disitu. Masyarakat sebagian besar melakukan penanaman tanaman keras bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas di lahan yang mereka masing-masing	PKL.W.13.05
108	Budaya gotong royong masih berjalan baik dengan menggunakan mediasi alat tradisional berupa kentongan, demikian pula dengan masyarakat setempat yang mempunyai hajatan. Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Program Padat Karya yang pernah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, apalagi dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekarang ini, kegiatan gotong royong sedikit mengalami kemunduran karena yang tidak seluruh masyarakat Gununglurah menjadi sasaran dari program tersebut	TSM.W.13.06
109	Setahu saya kegiatan sosialisasi dilaksanakan di pendopo kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kabupaten. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa yang dihadiri oleh petugas kecamatan dan perangkat desa. Pada dasarnya kegiatan tersebut cukup membantu untuk menyadarkan masyarakat, namun agar lebih efektif perlu dilakukan sosialisasi langsung secara intensif kepada masyarakat di lokasi rawan tanah longsor	PKL.W.13.07

KETERANGAN KODE:

- KPR** = Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Ruang
KPB = Kebijakan Penataan Ruang pada Daerah Rawan Bencana
KFL = Karakteristik Fisik Lingkungan
PKL = Pemahaman Masyarakat terhadap Kondisi Lingkungan
TSE = Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat
TSM = Tingkat Sosial Kemasyarakatan Setempat

LAMPIRAN D

TABEL KATEGORISASI DATA

❖ KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN RUANG

NO KARTU	APLIKASI DATA	KODE
1	2	3
1	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya, antara lain: budidaya lahan basah, budidaya lahan kering, budidaya hutan produksi dan budidaya hutan terbatas. Sedangkan maksud dari penetapan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Adapun targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan	KPR.W.01.01
2	Belum, sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sedangkan pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, pemberian <i>reward and punishment</i> dan penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum tentang penyimpangan Rencana Tata Ruang	KPR.W.01.02
3	Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman	KPR.W.01.03
11	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya. Maksud dari penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Adapun targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan	KPR.W.02.01
12	Sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, pemberian <i>reward and punishment</i> dan penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum terhadap penyimpangan dari Rencana Tata Ruang	KPR.W.02.02
13	Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan menggunakan instrumen perangkat hukum Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, Perda tentang 43	KPR.W.02.03

	Tahun 1995 tentang IKK Cilongok dan perda tentang teknis bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman khususnya kegiatan perekonomian	
21	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan kawasan budidaya itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa jenis budidaya. Maksud dari penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas adalah untuk memberi arahan tentang pemanfaatan ruang yang ada di wilayah, sedangkan tujuannya adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan aktivitas manusia serta terselenggaranya pembangunan yang lebih tegas di Kabupaten Banyumas. Sedangkan targetnya adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan	KPR.W.03.01
22	Sebagian besar perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas baru mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada Tahun Anggaran 2008 ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda Kabupaten Banyumas baru melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya tentang penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, penegasan pada pengendalian pemanfaatan ruang serta tindakan hukum terhadap penyimpangan dari Rencana Tata Ruang	KPR.W.03.02
23	Pemanfaatan ruang yang terjadi selama ini sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang, namun demikian masih terjadi penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat guna pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggunakan instrumen peragkat hukum Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang RTRW Kabupaten Banyumas, Perda tentang 43 Tahun 1995 tentang IKK Cilongok dan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman	KPR.W.03.03
31	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan yang mendasari penataan ruang setahu saya adalah untuk mengatur pembangunan yang akan dilaksanakan agar serasi, selaras dan seimbang	KPR.W.04.01
32	Belum, sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bappeda akan melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	KPR.W.04.02
33	Masih dijumpainya penyimpangan yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga berupa permukiman, pengolahan sawah dan kebun/tegalan yang berada di daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman, sedangkan usaha preventif dilaksanakan oleh dinas terkait termasuk didalamnya Dinas ESDM dengan sosialisasi di daerah rawan tanah longsor	KPR.W.04.03
41	Secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sedangkan untuk pengaturan di kota Cilongok sendiri menggunakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 43 Tahun 1995 tentang RUTRK/RDTRK Ibukota Kecamatan Cilongok. Adapun yang mendasari penataan ruang setahu saya adalah untuk mengatur pembangunan agar serasi, selaras, seimbang dan dapat berkelanjutan	KPR.W.05.01
42	Sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas setahu saya masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada tahun anggaran ini Bappeda akan melakukan revisi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	KPR.W.05.02

43	Secara eksisting masih dijumpainya penyimpangan dari rencana tata ruang yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga berupa permukiman. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kegiatan permukiman dan oleh tim perijinan Kabupaten Banyumas untuk kegiatan non permukiman oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	KPR.W.05.03
51	Setahu saya secara umum Penataan Ruang yang ada di Kabupaten Banyumas tertuang dalam Perda Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hal itu disusun untuk mengatur pembangunan yang akan dilaksanakan agar serasi, selaras, seimbang dan dapat berkelanjutan	KPR.W.06.01
52	Saya belum begitu tahu, menurut saya sebagian besar materi perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas masih mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang karena Perda tentang RTRW Kabupaten Banyumas ditetapkan pada tahun 2005. Saya yakin kalo secepatnya pemerintah kabupaten akan menyesuaikan dengan undang-undang yang baru	KPR.W.06.02
53	Secara kenyataan masih dijumpainya banyak penggunaan yang dikelola sebagai sawah, kebun/tegalan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga maupun berupa permukiman di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah rawan tanah longsor. Pengendalian pemanfaatan lahan dilakukan melalui penebitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal oleh pemerintah kabupaten melalui kecamatan	KPR.W.06.03

❖ KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PADA DAERAH RAWAN BENCANA

NO KARTU	APLIKASI DATA	KODE
1	2	3
4	Secara spesifik belum ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan penataan ruang pada daerah rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan akan ditetapkan kawasan rawan bencana termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor	KPB.W.01.04
5	Tahapan yang akan dilakukan antara lain dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan-pemetaan daerah yang mempunyai kerawanan terhadap bencana, laporan masyarakat dan survey lapangan	KPB.W.01.05
6	Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan termasuk pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana	KPB.W.01.06
10	Penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian dengan sekretariat di Bagian Kesra Setda Kabupaten Banyumas	KPB.W.01.10
14	Secara umum dalam RTRW baru menentukan kawasan rawan bencana, namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas akan ditetapkan kawasan rawan bencana dengan pengaturan pemanfaatan lahannya termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor	KPB.W.02.04
15	Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan dari masyarakat dan survey lapangan	KPB.W.02.05
16	Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada kawasan rawan bencana, sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan	KPB.W.02.06
20	Setahu saya untuk penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas	KPB.W.02.10
24	Secara umum dalam rencana tata ruang yang ada baru menentukan kawasan rawan bencana,	KPB.W.03.04

	namun dalam evaluasi RTRW Kabupaten Banyumas akan ditetapkan kawasan rawan bencana dengan pengaturan pemanfaatan lahannya termasuk didalamnya daerah rawan bencana tanah longsor	
25	Tahapan yang akan dilakukan adalah dengan menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan dari masyarakat dan pelaksanaan survey lapangan	KPB.W.03.05
26	Sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan, termasuk di daerah rawan bencana	KPB.W.03.06
30	Sepengetahuan saya, kegiatan penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas	KPB.W.03.10
34	Secara spesifik belum ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan penataan ruang pada daerah rawan bencana, kegiatan sudah banyak dilaksanakan oleh berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang kejadian tanah longsor dan upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor setelah ditentukannya kawasan rawan bencana tanah longsor	KPB.W.04.04
35	Tahapan yang akan dilakukan dalam penataan ruang di daerah rawan tanah longsor antara lain dengan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah wilayah dan Perum Perhutani dalam rangka menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui poster dan leaflet	KPB.W.04.05
36	Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi karena mengingat tingkat kerawanan daerah tersebut terhadap bencana tanah longsor. Sedangkan pelaksanaan pembangunan di lokasi dapat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sepanjang kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih dapat diterima sepanjang tidak mengganggu lingkungan terutama pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana dalam rangka untuk mitigasi bencana tanah longsor	KPB.W.04.06
40	Mitigasi bencana tanah longsor terbagi menjadi 3 tahap. Sebelum kejadian dilakukan pendataan, identifikasi, pemetaan daerah rawan bencana tanah longsor, bantuan teknologi mitigasi kepada masyarakat, early warning system yang berupa pemasangan extensometer untuk mendeteksi perubahan rekahan yang ada dan tiltmeter untuk mendeteksi deformasi gerakan tanah, pemantauan curah hujan secara realtime berbasis seluler yang dipancarkan ke Balai SABO Yogyakarta, Satlak PBP Kabupaten Banyumas dan Kepala Dinas ESDM. Pada saat bencana dilakukan evakuasi korban dan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh Satlak PBP. Sedangkan kegiatan pasca bencana berupa rekonstruksi, rehabilitasi dan relokasi yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	KPB.W.04.10
44	Kegiatan yang dilaksanakan di daerah rawan longsor berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya resiko tanah longsor dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas terkait dari kabupaten, termasuk dari petugas kecamatan maupun dari masing-masing perangkat desa	KPB.W.05.04
45	Tahapan yang akan dilakukan setahu saya berupa menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana, laporan masyarakat dan survey lapangan yang dilaksanakan oleh dinas dari kabupaten	KPB.W.05.05
46	Pembangunan harus menyentuh dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kebutuhan pembangunan di daerah rawan tanah longsor, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan tidak mengganggu lingkungan, saya pikir hal tersebut dapat dilaksanakan. Lebih-lebih pelaksanaan pembangunan dalam rangka mengurangi resiko bencana tanah longsor	KPB.W.05.06
50	Penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas dan pihak Kecamatan Cilongok	KPB.W.05.10
54	Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembuatan peta kawasan lingdung dan peta kawasan rawan bencana tanah longsor dan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya resiko tanah longsor dan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kerawanan terhadap tanah longsor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dinas terkait dari kabupaten, termasuk dari petugas kecamatan maupun dari masing-masing perangkat desa	KPB.W.06.04
55	Tahapan yang sudah dilakukan setahu saya berupa menginventaris daerah yang mempunyai potensi terhadap kejadian bencana dalam bentuk pemetaan daerah rawan bencana dan survey lapangan yang dilaksanakan oleh dinas dari kabupaten	KPB.W.06.05
56	Sepanjang pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di	KPB.W.06.06

	daerah rawan dan tidak terlalu mengganggu keseimbangan lingkungan, usulan masyarakat di daerah rawan dapat diakomodir dan dilaksanakan, lebih-lebih pelaksanaan pembangunan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor	
60	Penanganan bencana dilaksanakan oleh Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsian Kabupaten Banyumas dan pihak Kecamatan Cilongok	KPB.W.06.10

❖ KARAKTERISTIK FISIK LINGKUNGAN

NO KARTU	APLIKASI DATA	KODE
1	2	3
7	Berdasarkan data yang ada wilayah Kabupaten Banyumas tersusun atas pegunungan di bagian Utara, perbukitan membentang mulai di bagian Barat sampai Timur, dataran rendah dibagian tengah dan Telatan dan cekungan berada di bagian Tenggara. Curah hujan yang ada di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolaannya berada di Perum Perhutani	KFL.W.01.07
9	Berdasarkan laporan dan pendataan yang ada, frekuensi tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Namun sampai saat ini, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa	KFL.W.01.09
17	Kondisi alam di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, antara lain pegunungan di bagian Utara, perbukitan di bagian Barat sampai Timur, dataran dibagian tengah dan Selatan dan cekungan berada di bagian Tenggara. Sepengetahuan saya kondisi curah hujan di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras dimanfaatkan di lahan budidaya dan sebagian dari tanaman keras di tanam di lahan kritis. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolaannya berada di Perum Perhutani	KFL.W.02.07
19	Berdasarkan yang saya tahu, frekuensi tanah longsor terjadi hampir tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan dengan skala kecil	KFL.W.02.09
27	Fisik alam yang ada di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, mulai dari pegunungan di bagian Utara, perbukitan di bagian Barat sampai Timur, dataran dibagian tengah dan Selatan sampai cekungan berada di bagian Tenggara. Sepengetahuan saya kondisi curah hujan di Kabupaten Banyumas termasuk tinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya Gunung Slamet. Jenis vegetasi juga sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras dimanfaatkan di lahan budidaya dan sebagian dari tanaman keras di tanam di lahan kritis. Sebagian besar tanaman keras terdiri dari pohon kelapa dan albasia tersebar merata, pohon jati berada di bagian Barat dan Timur serta pohon pinus dan damar yang berada di sekitar Gunung Slamet yang pengelolaannya berada di Perum Perhutani	KFL.W.03.07
29	Selahu saya, frekuensi tanah longsor terjadi hampir tiap tahun, khususnya pada pertengahan sampai akhir musim penghujan dengan skala kecil	KFL.W.03.09
37	Kondisi fisik alam yang ada di Kabupaten Banyumas sangat bervariasi, mulai dari cekungan di bagian Tenggara sampai pegunungan di bagian Utara. Sedangkan dari batuan penyusunnya, wilayah Banyumas tersusun atas litologi dari Formasi Rambatan (Tmr), Formasi Halang (Tmph), Formasi Tapak (Tpt), Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) dan Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls). Desa Gununglurah secara fisik tersusun atas pegunungan sampai dengan kaki pegunungan dengan relief sedang sampai kasar. Litologi yang ada berupa Batuan Gunungapi Slamet Tak Teruraikan (Qvs) yang tersusun atas breksi gunungapi, tufa dan lapisan lava serta Endapan Lahar Gunungapi Slamet (Qls) yang tersusun atas perlapisan lahar dan lava. Secara umum litologi tersebut cukup resisten dalam keadaan <i>fresh</i> (segar), namun karena curah hujan sangat tinggi yaitu antara 3500 – 5000 mm/tahun, maka tingkat pelapukan disana cukup tinggi sehingga tufa dan endapan lahar menjadi lemah, lapuk sampai dengan sekitar 10 m dan sangat berpotensi untuk terjadinya gerakan tanah. Curah hujan yang tinggi dan adanya	KFL.W.04.07

	aktivitas masyarakat yang memotong lereng untuk kepentingan budidaya khususnya permukiman dan pengolahan sawah akan menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani sebagian berupa pinus dan damar	
39	Berdasar laporan yang masuk dan inventarisasi yang dilakukan frekuensi kejadian tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini, dan terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Berdasarkan pengamatan di lapangan kejadian tanah longsor yang ada termasuk dalam skala kecil dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa	KFL.W.04.09
47	Wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai kondisi alam yang sangat bervariasi, sedangkan untuk wilayah Desa Gununglurah terdiri dari pegunungan, kaki gunung dan dataran di bagian Selatan Desa Gununglurah. Curah hujan yang ada di Kecamatan Cilongok cukup tinggi lebih-lebih desa yang berada di lereng Gunung Slamet termasuk di Gununglurah, hal ini karena adanya Gunung Slamet. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani di lereng-lereng Gunung Slamet	KFL.W.05.07
49	Berdasarkan laporan yang masuk, frekuensi kejadian tanah longsor di Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini. Kejadian tanah longsor menurut data terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan. Namun Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa	KFL.W.05.09
57	Wilayah Kecamatan Cilongok mempunyai kondisi alam yang sangat bervariasi, sedangkan untuk wilayah Desa Gununglurah terdiri dari pegunungan di bagian Utara, kaki gunung di tengah dan dataran di bagian Selatan Desa Gununglurah. Sebagian besar curah hujan yang ada di lereng Gunung Slamet cukup tinggi termasuk Desa Gununglurah. Sedangkan jenis vegetasi sangat beragam, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura sampai tanaman keras. Sebagian tanaman keras dibudidayakan oleh masyarakat sedangkan selebihnya dikelola oleh Perum Perhutani di lereng-lereng Gunung Slamet	KFL.W.06.07
59	Berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi, frekuensi kejadian tanah longsor di Desa Gununglurah terjadi tiap tahun di lima tahun terakhir ini. Kejadian tanah longsor terjadi pada pertengahan sampai akhir musim penghujan walaupun dimensinya tidak begitu besar. Namun Alhamdulillah sampai saat ini bencana tanah longsor tersebut tidak menelan korban jiwa	KFL.W.06.09

❖ PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN

NO KARTU	APLIKASI DATA	KODE
1	2	3
8	Sebagian masyarakat sudah sadar akan lingkungan, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.01.08
18	Sebagian masyarakat sudah sadar akan kondisi lingkungan yang ada, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.02.08
28	Sebagian dari masyarakat sudah sadar akan kondisi lingkungan yang ada, sedangkan sebagian lagi masih belum seperti menebang ranting pohon di hutan untuk mencari kayu bakar dan bahkan bermukim di kawasan yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.03.08
38	Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti memotong lereng untuk kegiatan permukiman bahkan masih ada sebagian masyarakat yang mengolah sawah dan beternak ikan di daerah atas. Sedangkan di luar Gununglurah banyak industri pengolahan kayu, hal ini akan sangat mempengaruhi masyarakat sekitar karena sebagian masyarakat tersebut akan ikut mensuplay	PKL.W.04.08

	bahan baku kayu kepada industri tersebut	
48	Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah yang rawan terhadap tanah longsor sehingga warga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti <i>repek</i> (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.05.08
58	Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan lingkungan yang ditinggali merupakan daerah rawan tanah longsor sehingga ikut menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras di lahan masing-masing yang merupakan bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas, sedangkan sebagian lagi masih memperlakukan lingkungan dengan tidak semestinya seperti <i>repek</i> (memotong ranting pohon) di hutan untuk mencari kayu bakar, bermukim dan mengolah lahan sebagai sawah bahkan kolam ikan di daerah atas yang seharusnya untuk fungsi lindung	PKL.W.06.08
65	Masyarakat mengetahui kerawanan tanah longsor di daerah ini setelah adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas terkait dari kabupaten, petugas kecamatan serta perangkat desa. Beragam tanggapan yang muncul di masyarakat, namun sebagian besar merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor apalagi masih adanya masyarakat penjual kayu bakar tapi masyarakat tetap bersikukuh karena hanya mempunyai lahan disitu. Sebagian besar dari masyarakat melakukan penanaman tanaman keras bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas di lahan yang mereka punya	PKL.W.07.05
67	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak pemerintah kabupaten. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa yang dihadiri oleh petugas kecamatan dan perangkat desa. Sebetulnya kegiatan tersebut cukup membantu menyadarkan masyarakat, namun agar lebih efektif perlu dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di lokasi rawan tanah longsor	PKL.W.07.07
72	Masyarakat mengetahui bahwa Desa Gununglurah merupakan daerah rawan longsor dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, sedangkan sebagian mengatahui setelah adanya kejadian tanah longsor yang terjadi hampir tiap tahun. Dalam menanggapi hal tersebut sebagian besar merasa khawatir khususnya masyarakat yang berada di lokasi tanah longsor, namun mereka masih tetap melaksanakan pekerjaan sehari-hari di lahan yang mereka sendiri dengan meningkatkan dan memahami gejala alam yang ada khususnya pada musim penghujan	PKL.W.08.05
74	Sosialisasi pernah dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dari beberapa desa yang dianggap rawan longsor untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak dinas terkait dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa. Hal itu cukup membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi Desa Gununglurah yang rawan terhadap longsor. Kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah khususnya yang bermukim di daerah yang sangat rawan tanah longsor	PKL.W.08.07
79	Kami mengetahui Desa Gununglurah merupakan daerah rawan tanah longsor dari petugas kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Karena di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor dan sudah terbiasa hidup disini, maka sebagian besar masyarakat disini tidak khawatir	PKL.W.09.05
81	Kami bersama dengan masyarakat dari wilayah lain diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan-pertemuan rutin. Sudah cukup membantu memberi informasi, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu diseringkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah yang bermukim di daerah rawan tanah longsor	PKL.W.09.07
86	Kami tahu kalau Desa Gununglurah adalah daerah rawan tanah longsor dari pegawai kecamatan dan perangkat desa yang melakukan sosialisasi. Kami sudah terbiasa hidup disini dan di daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor, maka sebagian besar dari kami tidak khawatir	PKL.W.10.05
88	Bersama dengan warga RW lain, kami diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan-pertemuan rutin. Pemberitahuan tersebut cukup membantu memberi informasi, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada	PKL.W.10.07

	seluruh masyarakat yang bermukim di daerah rawan tanah longsor	
93	Masyarakat disini mengetahui Desa Gunungkurah merupakan daerah rawan tanah longsor dari pegawai kecamatan dan pamong desa pada saat melakukan sosialisasi. Kami sudah terbiasa hidup disini dan daerah ini belum pernah terjadi tanah longsor, maka sebagian masyarakat disini tidak khawatir	PKL.W.11.05
95	Sebagian masyarakat bersama dengan masyarakat dari wilayah lain diundang di balai desa untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kecamatan dan desa. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah pada pertemuan rutin yang sering dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut sudah cukup membantu, namun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya, sehingga sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah yang bermukim di daerah rawan tanah longsor	PKL.W.11.07
100	Masyarakat mengetahui daerah ini merupakan daerah rawan longsor dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta setelah adanya kejadian tanah longsor yang terjadi tiap tahun. Masyarakat menanggapi hal tersebut sebagian merasa takut dan khawatir khususnya masyarakat yang berada di lokasi tanah longsor, namun mereka masih tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari di lahan yang mereka punya dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala alam yang ada khususnya pada musim penghujan	PKL.W.12.05
102	Sosialisasi dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi penjelasan, pengarahan dan sosialisasi di kecamatan oleh pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan. Pernah pula dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa. Hal tersebut cukup membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kerawanan terhadap longsor di Desa Gununglurah, namun frekuensi kegiatan sosialisasi tersebut perlu ditingkatkan lagi kepada seluruh masyarakat Desa Gununglurah khususnya yang bermukim di daerah rawan tanah longsor	PKL.W.12.07
107	Masyarakat tahun adanya kerawanan tanah longsor di Gununglurah ini setelah adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh dinas dari pemerintah kabupaten, petugas kecamatan dan perangkat desa. Dalam menanggapi hal tersebut, sebagian besar merasa khawatir akan terjadinya tanah longsor apalagi adanya kegiatan repek dari masyarakat di daerah atas tapi masyarakat tetap bersikukuh menetap di sini karena hanya mempunyai lahan disitu. Masyarakat sebagian besar melakukan penanaman tanaman keras bantuan dari Dishutbun Kabupaten Banyumas di lahan yang mereka masing-masing	PKL.W.13.05
109	Setahu saya kegiatan sosialisasi dilaksanakan di pendopo kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat dari beberapa desa yang rawan longsor untuk diberi pengarahan dan sosialisasi oleh pihak pemerintah kabupaten. Sosialisasi juga pernah dilaksanakan langsung kepada masyarakat Gununglurah di balai desa yang dihadiri oleh petugas kecamatan dan perangkat desa. Pada dasarnya kegiatan tersebut cukup membantu untuk menyadarkan masyarakat, namun agar lebih efektif perlu dilakukan sosialisasi langsung secara intensif kepada masyarakat di lokasi rawan tanah longsor	PKL.W.13.07

❖ TINGKAT SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

NO KARTU	APLIKASI DATA	KODE
1	2	3
61	Tingkat pendidikan masyarakat Gununglurah 80 % tidak tamat SD dan tamat SD, selebihnya sekolah menengah dan hanya beberapa masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi	TSE.W.07.01
62	Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Berkaitan dengan pendapatan dari 1996 KK yang ada, sekitar 52 % masyarakat di Desa Gununglurah termasuk keluarga pra sejahtera dan 18 % keluarga sejahtera 1, selebihnya yaitu 30 % termasuk keluarga sejahtera 2	TSE.W.07.02
63	Di pusat kotanya Gununglurah sudah cukup mahal, namun di banyak tempat masih sangat murah	TSE.W.07.03

64	Sebagian besar lahan di kota dimanfaatkan sebagai permukiman, sedangkan dipinggiran digunakan sebagai sawah, dan kebun/tegalan. Di sebelah Utara sebagian besar digunakan sebagai kebun/tegalan dan berupa hutan rakyat dan hutan produksi milik Perum Perhutani. Penggunaan lahan disini sebagian besar dipengaruhi karena faktor turun temurun dan keterbatasan kepemilikan lahan. Sedangkan sebagian kecil dikarenakan ketersediaan air yang melimpah dan udara yang masih bersih	TSE.W.07.04
68	Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat disini adalah SR atau SD	TSE.W.08.01
69	Sebagian besar masyarakat disini berprofesi sebagai petani dan buruh. Pendapatan mereka sebagai buruh dan dari pertanian masih rendah	TSE.W.08.02
70	Lahan disini mempunyai harga rendah sampai sedang	TSE.W.08.03
71	Pemanfaatan lahan sebagian besar di daerah ini berupa permukiman, sawah dan kebun/tegalan sedangkan dibagian atas merupakan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena lahan yang dibudidayakan merupakan lahan yang hanya dimiliki dan karena faktor turun temurun serta kekerabatan	TSE.W.08.04
75	Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Gununglurah hanya tamat SD, sebagian lagi tidak tamat SD	TSE.W.09.01
76	Mata pencaharian masyarakat disini sebagian besar adalah buruh, yaitu buruh tani dan buruh penderes kelapa. Tingkat pendapatan dari pekerjaan buruh masih rendah	TSE.W.09.02
77	Harga lahan yang ada disini rendah	TSE.W.09.03
78	Penggunaan lahan sebagian besar di daerah ini berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik perhutani. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena keturunan dan keterbatasan lahan yang dimiliki	TSE.W.09.04
82	Sebagian besar hanya tamatan SD, bahkan banyak pula yang tidak lulus SD	TSE.W.10.01
83	Sebagian besar masyarakat berpenghasilan dari buruh tani dan buruh penderes kelapa. Penghasilan masyarakat sebagai buruh masih rendah	TSE.W.10.02
84	Harga lahan yang ada bawah cukup tinggi sehingga kami tetap berada disini karena tidak mampu membeli lahan yang agak aman	TSE.W.10.03
85	Sebagian besar di daerah ini berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik perhutani, di beberapa tempat yang lain ada pemanfaatan sebagai sawah dan kolam ikan. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena sudah turun temurun dan keterbatasan lahan yang dimiliki	TSE.W.10.04
89	Tingkat pendidikan yang ada adalah hanya tamat SD dan tidak tamat SD	TSE.W.11.01
90	Pekerjaan masyarakat disini sebagian besar adalah buruh, yaitu buruh tani dan buruh penderes kelapa dan sebagian lagi mengolah kebun/tegalan. Pendapatan mereka masih rendah dan belum dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari	TSE.W.11.02
91	Harga lahan yang ada disini masih rendah sedangkan yang dibawah sudah cukup tinggi	TSE.W.11.03
92	Lahan yang ada di daerah ini sebagian besar berupa kebun/tegalan dan untuk rumah tinggal, selebihnya merupakan hutan milik pemerintah. Sebagian besar masyarakat bermukim disini karena sudah lama dan turun temurun serta lahan yang ada hanya ini	TSE.W.11.04
96	Tingkat pendidikan masyarakat Gununglurah masih cukup memperhatikan, sebagian besar hanya tamat SD dan tidak tamat SD, selebihnya lulusan sekolah menengah dan sebagian kecil dapat menyelesaikan pendidikan tinggi	TSE.W.12.01
97	Mata pencaharian masyarakat sebagaian besar adalah petani dan buruh tani, baik buruh tani sawah ataupun buruh penderes kelapa. Tingkat pendapatan rata-rata dari sebagian besar masyarakat di Gununglurah tergolong masih rendah	TSE.W.12.02
98	Harga lahan yang ada di Gununglurah tergolong rendah sampai sedang dibanding dengan harga lahan yang ada di kota kecamatan. Harga lahan rendah terdapat pada daerah atas, sedangkan di daerah bawah harganya jauh lebih tinggi dari daerah atas	TSE.W.12.03
99	Pemanfaatan lahan yang ada sebagian besar berupa hutan negara milik perhutani, sebagian lagi berupa pemanfaatan sebagai sawah, kebun/tegalan dan permukiman. Menurut pendapat saya pemanfaatan lahan yang ada disebabkan karena faktor turun temurun dan keterbatasan	TSE.W.12.04

	lahan untuk ditempati dan budidayakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari	
103	Tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Gununglurah tidak tamat SD dan tamat SD, selebihnya sekolah menengah keatas	TSE.W.13.01
104	Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani disusul dengan buruh industri dan bangunan. Sedangkan pendapatan masyarakat Gununglurah termasuk masih rendah	TSE.W.13.02
105	Sebagian besar harga lahan yang ada disini masih relatif rendah khususnya lahan yang berada di bagian Utara desa, namun harga lahan di pusat kota Gununglurah sudah termasuk tinggi	TSE.W.13.03
106	Sebagian besar lahan berupa hutan khususnya yang berada disebelah atas, sebagian lagi berupa sawah dan kebun/tegalan. Di kota dan diberbea tempat penggunaan lahan dalam bentuk permukiman. Pemanfaatan lahan disini sebagian besar karena faktor turun temurun dan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat	TSE.W.13.04

❖ TINGKAT SOSIAL KEMASYARAKATAN SETEMPAT

NO KARTU	APLIKASI DATA	KODE
1	2	3
66	Gotong royong masih berjalan baik dengan menggunakan mediasi kentongan, demikian pula kalau masyarakat setempat mempunyai hajat. Namun sekarang kegiatan gotong royong sedikit mengalami kemunduran karena imbas dari program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Program Padat Karya beberapa tahun yang lalu, apalagi sekarang ada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak seluruh masyarakat Gununglurah menjadi sasaran dari program tersebut	TSM.W.07.06
73	Kehidupan sosial kemasyarakatan di Gununglurah masih cukup tinggi, hal ini tercermin dalam kegiatan gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat setempat, media komunikasi berupa kentongan. Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan Langsung Tunai (BLT) membuat kecemburuan pada sebagian masyarakat yang merasa tidak mampu namun tidak menjadi sasaran program, hal ini menjadikan kegiatan gotong royong tidak seramai sebelum ada program tersebut	TSM.W.08.06
80	Kegiatan gotong royong masih berjalan, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat sekitar melalui alat berupa kentongan	TSM.W.09.06
87	Disini gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat disini melalui alat kentongan sebagai tanda kumpul	TSM.W.10.06
94	Gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan grumbul ataupun keperluan masyarakat sini melalui alat berupa kentongan sebagai tanda untuk berkumpul	TSM.W.11.06
101	Kehidupan sosial kemasyarakatan di Gununglurah masih cukup tinggi, hal ini tercermin dalam kegiatan gotong royong masih berjalan dengan baik, baik untuk keperluan kampung ataupun keperluan masyarakat setempat, media komunikasi berupa kentongan	TSM.W.12.06
108	Budaya gotong royong masih berjalan baik dengan menggunakan mediasi alat tradisional berupa kentongan, demikian pula dengan masyarakat setempat yang mempunyai hajat. Namun dengan adanya program pemerintah berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Program Padat Karya yang pernah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, apalagi dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sekarang ini, kegiatan gotong royong sedikit mengalami kemunduran karena yang tidak seluruh masyarakat Gununglurah menjadi sasaran dari program tersebut	TSM.W.13.06

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 09 Maret 1970 oleh Ibunda tercinta Siti Umi Sapartinah (yang sudah dipanggil untuk menghadap-Nya pada tanggal 17 Juli 1994) yang menikah dengan Bapak yang bernama Semin Suhadi dengan diberi nama Joko Purwoko Suranto, yang mengandung arti Anak Lelaki pertama yang dilahirkan pada bulan Sura. Sebagian besar masa kecil penulis dihabiskan di kampung halaman tercinta Pajimatan, Imogiri, Yogyakarta. Sekarang penulis dan keluarga bertempat tinggal di Desa Sambeng Kulon RT 02 / RW 01, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

Sebelum menempuh pendidikan di Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro, Semarang, penulis menyelesaikan seluruh pendidikan di Kota Pelajar Yogyakarta. Pada tahun 1983 menyelesaikan pendidikan dasar di SD Pundung II, Imogiri, Bantul, pendidikan menengah SMP 1 Imogiri, Bantul diselesaikan pada tahun 1986 dan pada tahun 1989 menyelesaikan pendidikan di SMA 5 Yogyakarta. Sedangkan pendidikan tinggi diselesaikan di tahun 1999 pada Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penulis memasuki dunia pelayanan publik pada tahun 2003 di Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas. Sebelum melaksanakan tugas belajar di MTPWK-UNDIP, penulis bertugas sebagai staf teknis pada Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah di BAPPEDA Kabupaten Banyumas mulai dari pengangkatan pertama sebagai CPNS pada tahun 2003.

Saat menyelesaikan tesis ini, penulis baru dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Bagus Marhaendra Wijaya yang dilahirkan pada tanggal 20 Februari 2002 dan Muhammad Rizky Wijaya yang dilahirkan pada tanggal 08 Juni 2006. Kedua anak tersayang tersebut dilahirkan dari seorang istri tercinta Elis Rahmawati yang dinikahi oleh penulis pada tanggal 29 Agustus 2000 di Wonosobo. Selain bersama-sama dengan penulis membimbing dan mendidik anak-anak yang telah diamanahkan kepada kami, istri penulis juga mendidik calon generasi penerus pemimpin bangsa dengan mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai Guru SDN 01 Sambeng Kulon, UPK Kembaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.